

Pemerintah  
Kabupaten  
Majalengka



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG :  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**R K P D**

KABUPATEN MAJALENGKA  
**TAHUN 2024**





BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 267);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
  10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

- Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 15);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RTRW Kabupaten Majalengka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Renja Dinas Pendidikan;
  - b. Renja Dinas Kesehatan;
  - c. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
  - d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
  - e. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - f. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - h. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. Renja Dinas Sosial;
  - k. Renja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - l. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - m. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - n. Renja Dinas Lingkungan Hidup;

- o. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Renja Dinas Perhubungan;
- r. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- v. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- aa. Renja Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Renja Sekretariat Daerah;
- cc. Renja Sekretariat DPRD;
- dd. Renja Inspektorat;
- ee. Renja Kecamatan Argapura;
- ff. Renja Kecamatan Banjaran;
- gg. Renja Kecamatan Bantarujeg;
- hh. Renja Kecamatan Cigasong;
- ii. Renja Kecamatan Cikijing;
- jj. Renja Kecamatan Cingambul;
- kk. Renja Kecamatan Dawuan;
- ll. Renja Kecamatan Jatitujuh;
- mm. Renja Kecamatan Jatiwangi;
- nn. Renja Kecamatan Kadipaten;
- oo. Renja Kecamatan Kasokandel;
- pp. Renja Kecamatan Kertajati;
- qq. Renja Kecamatan Lemahsugih;
- rr. Renja Kecamatan Leuwimunding;
- ss. Renja Kecamatan Ligung;
- tt. Renja Kecamatan Maja;
- uu. Renja Kecamatan Majalengka;
- vv. Renja Kecamatan Malausma;
- ww. Renja Kecamatan Palasah;
- xx. Renja Kecamatan Panyingkiran;
- yy. Renja Kecamatan Rajagaluh;
- zz. Renja Kecamatan Sindang;
- aaa. Renja Kecamatan Sindangwangi;
- bbb. Renja Kecamatan Sukahaji;
- ccc. Renja Kecamatan Sumberjaya; dan
- ddd. Renja Kecamatan Talaga.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003



## Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	11
1.4 Maksud dan Tujuan .....	12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Majalengka.....	1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	10
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	13
2.1.1.4 Demografi.....	15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	18
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	18
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat .....	31
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya .....	36
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	37
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar..	37
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	58
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	77
2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan....	90
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	95
2.1.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	99
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	103
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	107
2.2 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten	109



	Halaman
Majalengka.....	
2.2.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19....	109
2.2.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2022.....	110
2.2.3 Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2022.....	110
2.2.4 Kondisi Pelaksanaan Anggar Tahun 2022	111
2.3 Evaluasi RKPD Tahun 2022 Kabupaten Majalengka ....	112
2.3.1 Capaian Indikator Makro .....	116
2.3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	119
2.3.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	121
2.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan .....	136
2.4.1 Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran dalam RKPD dan APBD.....	136
2.4.2 Pencapaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan dalam RKPD.....	140
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.....	143
2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	144
2.6 Inovasi .....	176
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.</b>	<b>1</b>
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	2
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Awal Tahun 2023 dan Prediksi Tahun 2024.....	2
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	2
3.1.1.2 Inflasi.....	3
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	5
3.1.1.4 Gini Ratio.....	6
3.1.1.5 Kemiskinan.....	8
3.1.1.6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024.....	9
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	10



	Halaman
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka.....	16
3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	16
3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka.....	16
3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka	18
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	21
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	22
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	24
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	26
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	32
3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	34
3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	34
3.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Prov).....	34
3.3.3 Dana Masyarakat/Umat.....	35
3.3.4 <i>Corporate Social Responsibility</i> (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	35
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	2
4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 .....	2
4.1.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	9
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	12
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	15
4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	15
4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi	18



Jawa Barat Tahun 2024.....	
4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka.....	19
4.2.4 Isu Strategis.....	21
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka	35
4.3 Kebijakan Pembangunan.....	99
4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang .....	102
4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang .....	104
4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana .....	106
4.4 Inovasi Pembangunan .....	112
4.4.1 Inovasi pada Proses Perencanaan.....	112
4.4.2 Inovasi pada Proses Program/Kegiatan Perangkat Daerah.....	114
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>1</b>
5.1 Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2024.....	1
5.1.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2024.....	1
5.1.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat (Bankeu) Tahun 2024.....	8
5.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	16
5.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024.....	37
5.4 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 .....	56
5.5 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024..	65
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>1</b>



## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka..... 3
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka..... 6
Tabel 2.3	Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka..... 7
Tabel 2.4	Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka..... 8
Tabel 2.5	Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka..... 9
Tabel 2.6	Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka..... 13
Tabel 2.7	Data Lokasi Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka..... 15
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka..... 16
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka Tahun 2022..... 16
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki..... 17
Tabel 2.11	Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah)..... 19
Tabel 2.12	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka..... 21
Tabel 2.13	Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022..... 24
Tabel 2.14	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka..... 25
Tabel 2.15	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional..... 26
Tabel 2.16	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 28



	Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	
Tabel 2.17	Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	30
Tabel 2.18	Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka.....	30
Tabel 2.19	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	31
Tabel 2.20	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	32
Tabel 2.21	Perbandingan Angka Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	33
Tabel 2.22	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Majalengka.....	35
Tabel 2.23	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Majalengka....	36
Tabel 2.24	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Majalengka	36
Tabel 2.25	Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Majalengka.....	38
Tabel 2.26	Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka.....	41
Tabel 2.27	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka.....	41
Tabel 2.28	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka.....	42
Tabel 2.29	Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Pendidikan Tahun 2022.	42
Tabel 2.30	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Majalengka.....	43
Tabel 2.31	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka.....	44
Tabel 2.32	Perkembangan Rasio Posyandu di Kabupaten Majalengka.....	45
Tabel 2.33	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik Kabupaten Majalengka Tahun 2022.....	46
Tabel 2.34	Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu.....	47



	Halaman
Tabel 2.35 Rasio Dokter terhadap 1.000 penduduk Kabupaten Majalengka.....	47
Tabel 2.36 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Majalengka.....	48
Tabel 2.37 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Majalengka.....	49
Tabel 2.38 Data Prevalensi Stunting Kabupaten Majalengka 2018-2022.....	50
Tabel 2.39 Cakupan Penemuan Penyakit TBC dan AIDs Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022.....	50
Tabel 2.40 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Kesehatan Tahun 2022..	52
Tabel 2.41 Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka.....	52
Tabel 2.42 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka.....	53
Tabel 2.43 Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka.....	53
Tabel 2.44 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	54
Tabel 2.45 Kondisi Perumahan Kabupaten Majalengka.....	54
Tabel 2.46 Kondisi Rumah Layak huni di Kabupaten Majalengka.....	55
Tabel 2.47 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	55
Tabel 2.48 Indikator Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka.....	56
Tabel 2.49 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Trantibumlinmas Tahun 2022.....	57
Tabel 2.50 Data Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Majalengka.....	57
Tabel 2.51 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Sosial Tahun 2022.....	58
Tabel 2.52 Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka.....	60



	Halaman
Tabel 2.53 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	61
Tabel 2.54 Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka.....	63
Tabel 2.55 Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	65
Tabel 2.56 Capaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	66
Tabel 2.57 Perkembangan Posyandu dan Kelompok PKK Kabupaten Majalengka.....	67
Tabel 2.58 Perkembangan Desa Mandiri Kabupaten Majalengka.....	67
Tabel 2.59 Indikator Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka....	68
Tabel 2.60 Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka.....	68
Tabel 2.61 Jumlah Kendaraan Yang diuji di Kabupaten Majalengka.	69
Tabel 2.62 Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka.....	70
Tabel 2.63 Indikator Capaian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.....	70
Tabel 2.64 Jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka	71
Tabel 2.65 Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif di Kabupaten Majalengka.....	72
Tabel 2.66 Jumlah UMKM di Kabupaten Majalengka.....	72
Tabel 2.67 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Majalengka.....	73
Tabel 2.68 Data Kategori Perusahaan di Kabupaten Majalengka.....	73
Tabel 2.69 Jumlah Prasarana Olahraga di Kabupaten Majalengka...	74
Tabel 2.70 Perkembangan Indikator Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Majalengka.....	74
Tabel 2.71 Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Majalengka.	75
Tabel 2.72 Kegiatan Bidang Kebudayaan Kabupaten Majalengka.....	76
Tabel 2.73 Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka.....	76
Tabel 2.74 Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka.....	77
Tabel 2.75 Indikator Capaian Kepariwisata Kabupaten Majalengka.....	78
Tabel 2.76 Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka.....	79
Tabel 2.77 Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten	79



		Halaman
	Majalengka.....	
Tabel 2.78	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka.....	80
Tabel 2.79	Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka.....	81
Tabel 2.80	Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka.....	81
Tabel 2.81	Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka.....	81
Tabel 2.82	Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Majalengka.....	82
Tabel 2.83	Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka.....	82
Tabel 2.84	Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka.....	83
Tabel 2.85	Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka..	83
Tabel 2.86	Jumlah dan Jenis Pasar di Majalengka.....	84
Tabel 2.87	Jenis Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022.....	85
Tabel 2.88	Produksi Ikan Kabupaten Majalengka.....	86
Tabel 2.89	Indikator Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Majalengka.....	87
Tabel 2.90	Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka.....	88
Tabel 2.91	Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka.....	88
Tabel 2.92	Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka.....	89
Tabel 2.93	Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka.....	89
Tabel 2.94	Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022.....	91
Tabel 2.95	Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Majalengka.....	92
Tabel 2.96	Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Majalengka.....	92



	Halaman
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022..... 93
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022..... 94
Tabel 2.99	Perhitungan Sektor Basis Kabupaten/Kota di Wilayah Ciayumajakuning 2018-2021..... 97
Tabel 2.100	Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Majalengka..... 99
Tabel 2.101	Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka..... 101
Tabel 2.102	Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka.. 101
Tabel 2.103	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majalengka..... 103
Tabel 2.104	Jumlah Kriminalitas Yang Tertangani..... 103
Tabel 2.105	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Majalengka..... 104
Tabel 2.106	Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022..... 105
Tabel 2.107	Tabel Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Majalengka..... 106
Tabel 2.108	Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 113
Tabel 2.109	Realisasi Visi dan Misi Kabupaten Majalengka..... 114
Tabel 2.110	Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023..... 116
Tabel 1.111	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022..... 119
Tabel 2.112	Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022..... 122
Tabel 2.113	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2022..... 136
Tabel 2.114	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Perubahan dan APBD Pada Setiap OPD Triwulan IV Tahun 2022..... 136
Tabel 2.115	Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD Perubahan dan Alokasi APBD Perubahan Tahun 2022..... 138
Tabel 2.116	Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2022.... 141
Tabel 2.117	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka..... 144
Tabel 2.118	Daftar Inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat 177



	Daerah Kabupaten Majalengka.....	
Tabel 3.1	Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 3.2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	6
Tabel 3.3	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	7
Tabel 3.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka.....	9
Tabel 3.5	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	9
Tabel 3.6	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka.....	10
Tabel 3.7	Proyeksi Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	14
Tabel 3.8	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	14
Tabel 3.9	Proyeksi Indikator Pembangunan.....	15
Tabel 3.10	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2025.....	26
Tabel 3.11	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025.....	30
Tabel 3.12	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2025.....	33
Tabel 4.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.....	13
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024.....	17
Tabel 4.3	Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	19
Tabel 4.4	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	23
Tabel 4.5	Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	34
Tabel 4.6	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan	36



	Prioritas Kabupaten Majalengka 2024.....	
Tabel 4.7	Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2024 dan Sasaran RKPD 2024 Kabupaten Majalengka.....	36
Tabel 4.8	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	38
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka.....	43
Tabel 4.10	Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2024.....	52
Tabel 4.11	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional Dalam RPJMN.....	97
Tabel 4.12	Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka.....	102
Tabel 4.13	Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka.....	105
Tabel 4.14	Proyek dan Program Kawasan Rebana di Kabupaten Majalengka.....	108
Tabel 5.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024.....	2
Tabel 5.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Sumber Dana Bantuan Keuangan Tahun 2024.....	9
Tabel 5.3	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab.....	17
Tabel 5.4	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional Dalam Rancangan RKP 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Majalengka 2024.....	38
Tabel 5.5	Rekapitulasi Pagu Anggaran Per Perangkat Daerah Tahun 2024.....	51
Tabel 5.6	Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024.....	58



	Halaman
Tabel 6.1 Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	2
Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	3
Tabel 6.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	4



## Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	4
Gambar 1.2 Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	5
Gambar 1.3 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	12
Gambar 2.1 Peta Geografis Kabupaten Majalengka.....	2
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Majalengka.....	5
Gambar 2.3 Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Struktur Ruang Jawa Barat Tahun 2025.....	6
Gambar 2.4 Data Perkembangan Curah Hujan Bulanan Kabupaten Majalengka.....	9
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah.....	10
Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka.....	18
Gambar 2.7 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	23
Gambar 2.8 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	24
Gambar 2.9 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka..	26
Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka.....	28
Gambar 2.11 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka.....	32
Gambar 2.12 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka.....	33
Gambar 2.13 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka.....	34
Gambar 2.14 Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka.....	38
Gambar 2.15 Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka.....	39



	Halaman
Gambar 2.16 Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka.....	40
Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Majalengka.....	73
Gambar 2.18 Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2021.....	96
Gambar 2.19 Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Majalengka.....	107
Gambar 2.20 Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan Kabupaten Majalengka.....	108
Gambar 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	3
Gambar 3.2 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	4
Gambar 3.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka..	7
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	2
Gambar 4.2 Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	35
Gambar 4.3 Tampilan Muka Aplikasi SIPD-RI.....	113
Gambar 4.4 Tampilan Muka Aplikasi E-Renja.....	114



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2024 merupakan



dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2024.

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam peraturan tersebut perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; dan
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat **SMART**.

Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;

3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, menggunakan pendekatan:

1. **Teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3. **Politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. **Atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD provinsi Jawa Barat.

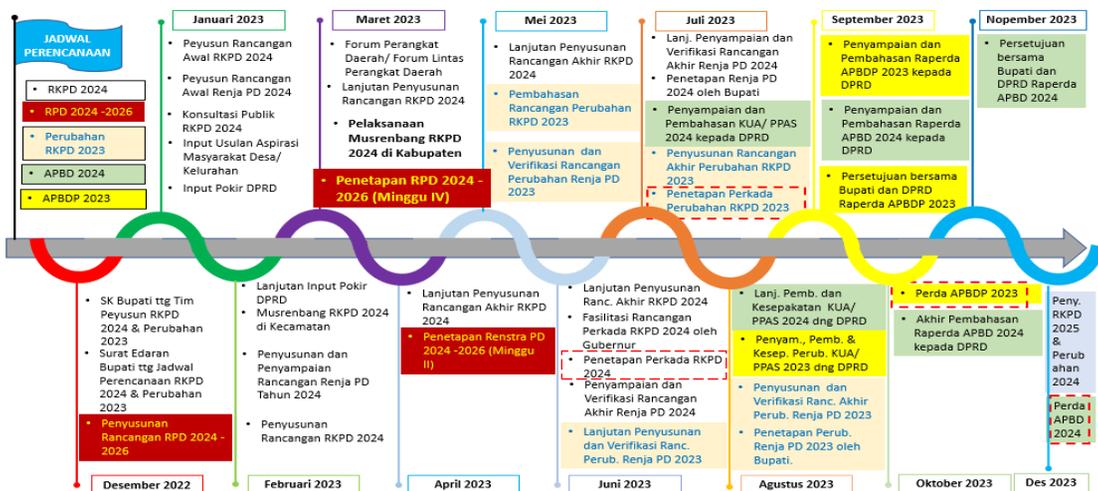
Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, menggunakan pendekatan:

1. **Holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

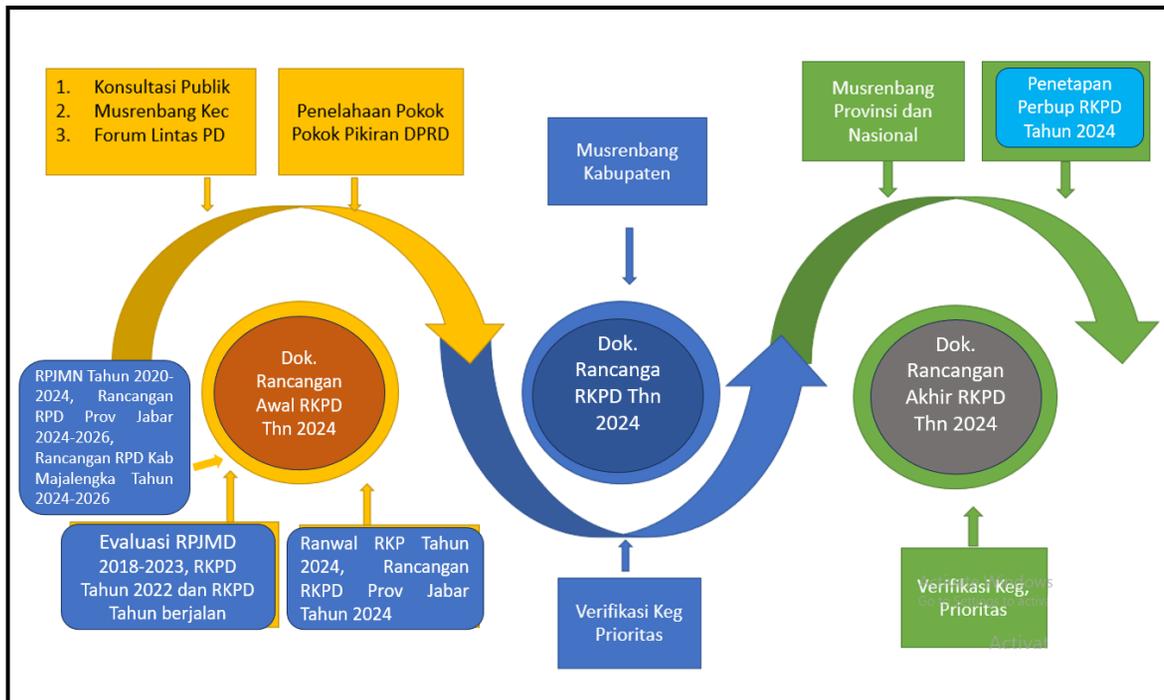
2. **Integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
3. **Spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan *Kick Off Meeting*, Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan terakhir Musrenbang Nasional. Setelah pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2024 untuk penajaman dan penetapan daftar program/kegiatan prioritas Kabupaten Majalengka. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2024 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 pada akhir Bulan Juni 2023. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024**



**Gambar 1.2**  
**Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan**  
**RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024**



RKPD juga merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPD, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sehingga kehadirannya harus memberikan kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang pada tahun depan akan diselenggarakannya Pemilu serentak untuk pemilihan presiden, anggota legislatif dan Kepala Daerah, tentunya sedikit banyaknya akan berpengaruh tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam



penyusunan RKPD Tahun 2024 terutama dalam penentuan target indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks Trantibum dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menghimpun data-data dari setiap Perangkat Daerah maupun dari desa dan kecamatan. Penghimpunan usulan masyarakat yang dikompilasi oleh desa/kelurahan yang diverifikasi oleh mitra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka untuk selanjutnya menjadi bahan musrenbang kecamatan. Setelah musrenbang kecamatan selesai maka usulan diverifikasi oleh kecamatan untuk dibahas dalam forum OPD dan usulan masuk dalam OPD yang dituju. Hasil verifikasi dari forum OPD selanjutnya diverifikasi oleh TAPD Kabupaten Majalengka. Setelah itu barulah usulan masyarakat bisa disetujui dan akan masuk ke sub kegiatan pada OPD tujuan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);



16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)



- Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236)
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)
  27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor ...);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6).

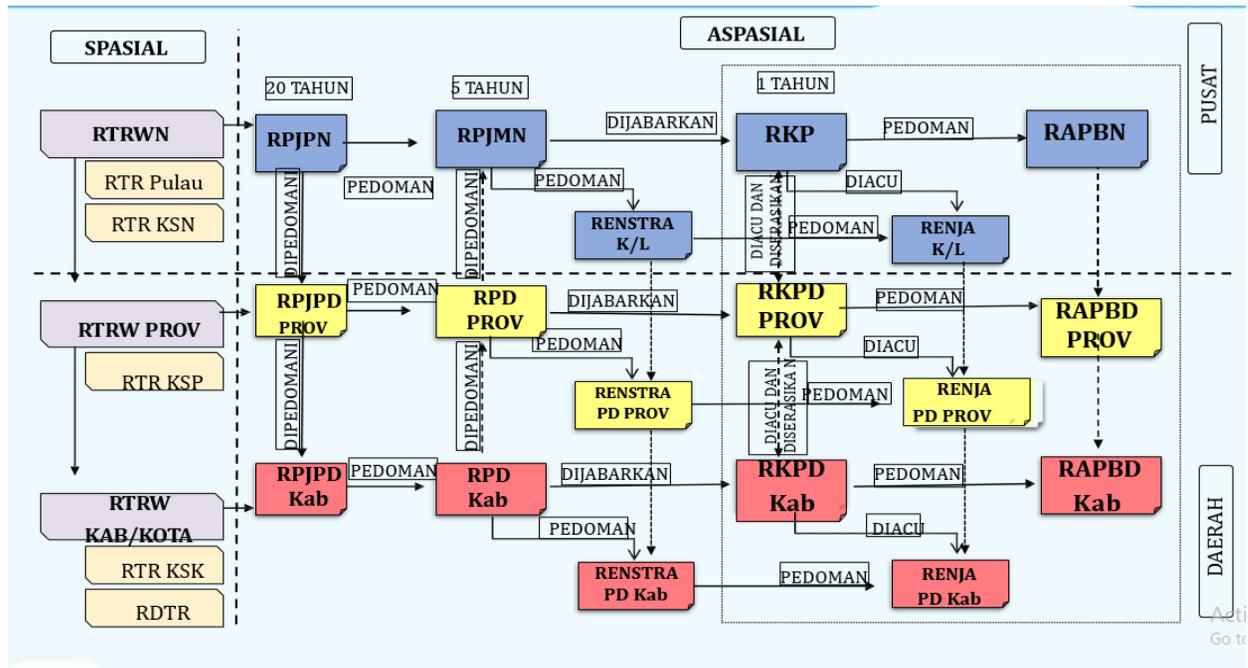
### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Terdapat 2 (dua) ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. RKPD Tahun 2024 mengacu dan mendukung RKP dan Program Strategis Nasional Tahun 2024
2. RKPD Tahun 2024 mengacu dan mendukung RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
3. RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026;
4. RKPD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan hasil pembangunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023;
5. RKPD Tahun 2024 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
6. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD dengan Renja PD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling melengkapi; dan
7. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Majalengka dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3.

**Gambar 1.3.**  
**Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sumber: Analisa tim penyusun RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja utama pembangunan Kabupaten Majalengka dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renja PD;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;



5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2024, dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2024, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD, capaian kinerja dan program kegiatan, permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka, dan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka.

**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Majalengka.

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024, kebijakan pembangunan, inovasi pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka yang menjadi unggulan.

**BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.



**BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII : PENUTUP**  
Memuat tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Majalengka

Dinamika pembangunan Kabupaten Majalengka menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks tantangan pun semakin berkembang bagi pemerintah daerah untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan capaian hasil pembangunan.

Gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Majalengka terkini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang telah diterapkan maupun sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Gambaran ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Diharapkan melalui uraian analisis berbasis data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan efektif.

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 km<sup>2</sup> atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 km<sup>2</sup>).

Secara geografis, Kabupaten Majalengka berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

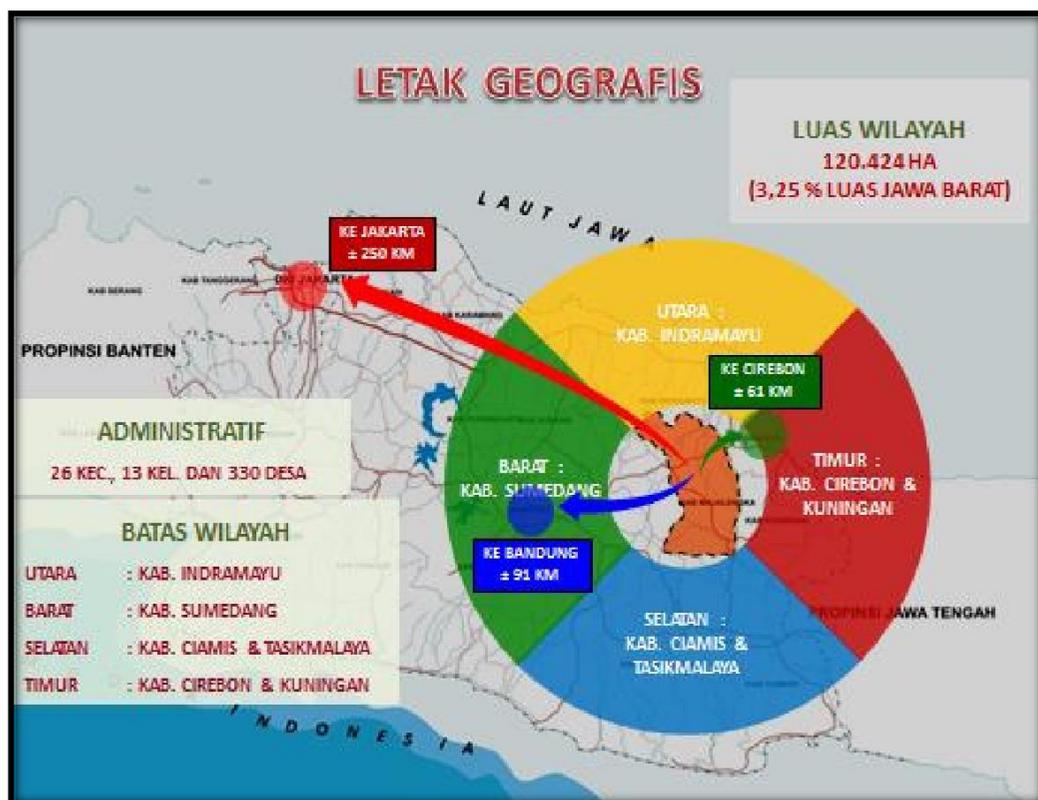
1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;

3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya;
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis: Bagian Barat antara  $108^{\circ} 03'$ - $108^{\circ} 19'$  Bujur Timur, bagian Timur antara  $108^{\circ} 12'$ - $108^{\circ} 25'$  Bujur Timur, Bagian Utara antara  $6^{\circ} 36'$ - $6^{\circ} 58'$  Lintang Selatan dan Bagian Selatan antara  $6^{\circ} 43'$ - $7^{\circ} 03'$  Lintang Selatan.

Dalam konteks zona waktu Indonesia yang merupakan negara tropis dengan 3 wilayah waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur), seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat).

**Gambar 2.1**  
**Peta Geografis Kabupaten Majalengka**



Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.



Secara geostrategis, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan utama regional metropolitan rebana di wilayah timur laut provinsi Jawa Barat bersama dua kabupaten lain, seperti Cirebon, Subang, dan tiga daerah penyangga, seperti Indramayu, Sumedang dan Kuningan. Bukan hanya itu, Kabupaten Majalengka juga digadang-gadang menjadi kawasan industri baru seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Tol Cikopo Palimanan, Pelabuhan Patimban dan Tol Cisumdawu kini sedang dikebut pengerjaannya. Bahkan rencananya pemerintah provinsi juga akan merelokasi industri dari Bandung Raya ke wilayah timur laut yang tidak lain salah satunya adalah Majalengka.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Majalengka	4	10	14.	Sindangwangi	10	-
2.	Panyingkiran	9	-	15.	Sukahaji	13	-
3.	Kadipaten	7	-	16.	Sindang	7	-
4.	Dawuan	11	-	17.	Cigasong	7	3
5.	Kasokandel	10	-	18.	Maja	18	-
6.	Kertajati	14	-	19.	Argapura	14	-
7.	Jatitujuh	15	-	20.	Banjaran	13	-
8.	Jatiwangi	16	-	21.	Talaga	17	-
9.	Palasah	13	-	22.	Cikijing	15	-
10.	Ligung	19	-	23.	Cingambul	13	-
11.	Sumberjaya	15	-	24.	Bantarujeg	13	-
12.	Leuwimunding	14	-	25.	Lemahsugih	19	-
13.	Rajagaluh	13	-	26.	Malausma	11	-
<b>Jumlah</b>	<b>Kecamatan</b>					<b>26</b>	
	<b>Desa</b>					<b>330</b>	
	<b>Kelurahan</b>					<b>13</b>	

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2023.

Topografis Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: landai atau dataran rendah (0 - 15 persen), berbukit bergelombang (15 - 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas



wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alam yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar aliran sungai dan mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu daerah yang mempunyai kelerengan curam.

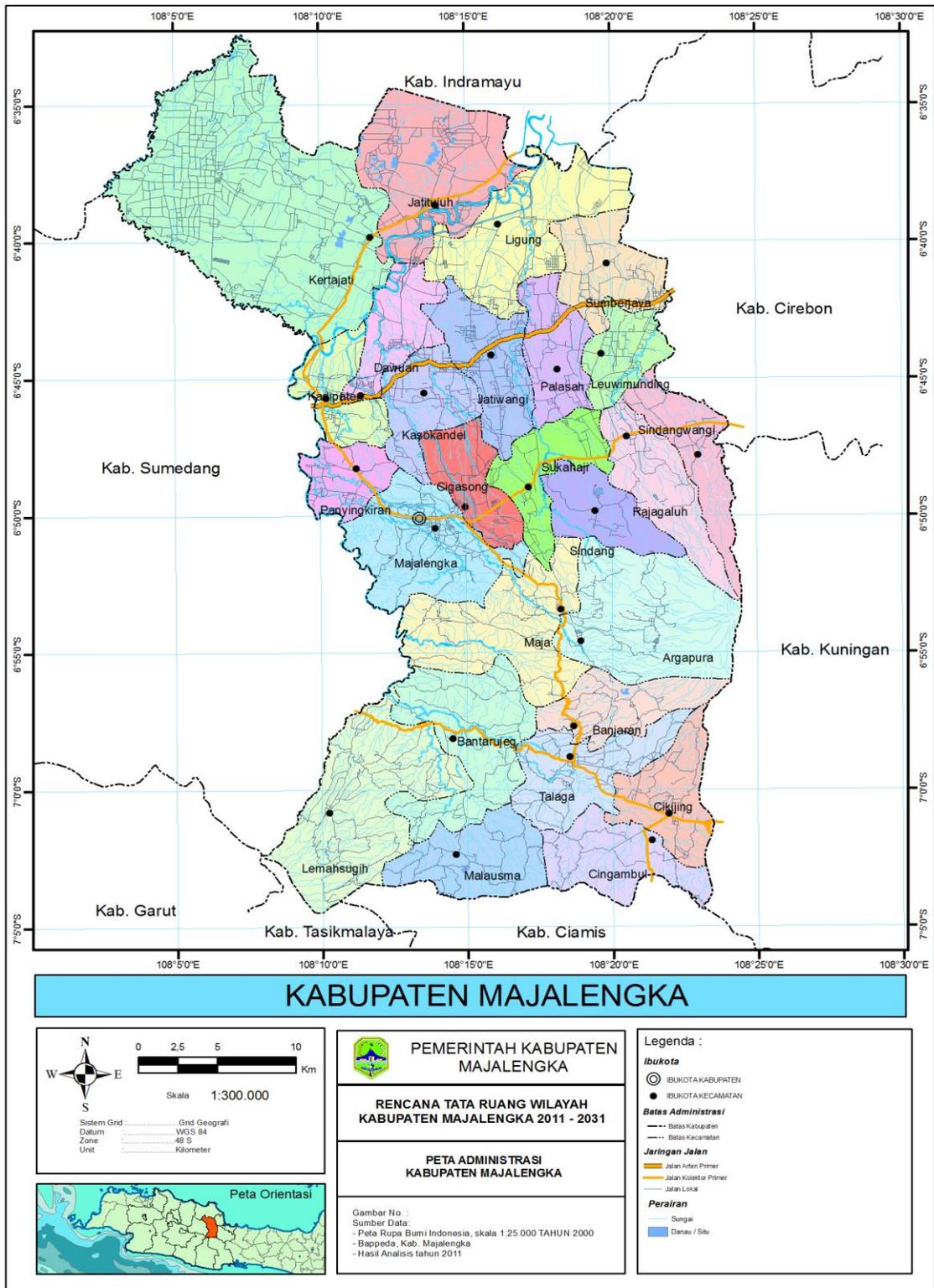
Adapun distribusi ketiga topografi yang ada di Kabupaten Majalengka sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Dataran rendah, mempunyai kemiringan tanah antara 0-15%, meliputi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri atas Kecamatan Cigasong, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung, dan Palasah;
2. Berbukit gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15%-40%, meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Kasokandel, Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, dan Talaga; dan
3. Perbukitan terjal, kemiringan tanahnya >40%, meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, Sumberjaya, dan Talaga.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl), dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl).



**Gambar 2.2**  
**Peta Administrasi Kabupaten Majalengka**



Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Adapun untuk mengetahui luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Majalengka dijelaskan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.2  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase	No.	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Majalengka	57,00	4,73	14.	Sindangwangi	31,76	2,64
2.	Panyingkiran	22,98	1,91	15.	Sukahaji	32,52	2,7
3.	Kadipaten	21,86	1,82	16.	Sindang	23,97	1,99
4.	Dawuan	23,80	1,98	17.	Cigasong	24,17	2,01
5.	Kasokandel	31,61	2,62	18.	Maja	65,21	5,42
6.	Kertajati	138,36	11,49	19.	Argapura	60,56	5,03
7.	Jatitujuh	73,66	6,12	20.	Banjaran	41,98	3,49
8.	Jatiwangi	40,03	3,32	21.	Talaga	43,50	3,61
9.	Palasah	38,69	3,21	22.	Cikijing	43,54	3,62
10.	Ligung	62,25	5,17	23.	Cingambul	37,03	3,07
11.	Sumberjaya	32,73	2,72	24.	Bantarujeg	66,52	5,52
12.	Leuwimunding	32,46	2,7	25.	Lemahsugih	78,64	6,53
13.	Rajagaluh	34,37	2,85	26.	Malausma	45,04	3,74
<b>Kabupaten Majalengka</b>		<b>Luas Kabupaten Majalengka (Km<sup>2</sup>)</b>				<b>1.204,24</b>	
		<b>Persentase</b>				<b>100,00</b>	

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.3  
Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042





Berdasarkan sebaran dan struktur batuanannya, kondisi geologis Kabupaten Majalengka meliputi: *Aluvium* seluas 17.162 Ha (14,25%), *Pleistocene Sedimentary Facies* seluas 13.716 Ha (13,39%), *Miocene Sedimentary Facies* seluas 23,48 Ha (19,50%), *Undiferentionet Vulcanic Product* seluas 51.650 Ha (42,89%), *Pliocene Sedimentary Facies*, seluas 3.870 Ha (3,22%), *Liparite Dacite* seluas 179 Ha (0,15%), *Eosene* seluas 78 Ha (0,006%), *Old Quartenary Volkanik Product* seluas 10.283 Ha (8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur.

Kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi kedalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. Air Tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka**

No.	Nama Sungai	Bendungan	Areal Layanan (Ha)	Debit (Liter/detik)	
				Maksimal	Minimal
1.	Cilutung	Kamun	9.289	50,73	0,41
2.	Cideres	Tirtanegara, Cigasong	2.741	3,94	0,65
3.	Cikeruh	Cikeruh, Cicutul	3.354	10,68	0,99
4.	Ciherang	Ciherang	1.009	1,76	0,3
5.	Cikadongdong	Cikemangi, Cikondang	2.411	1,47	0,4
6.	Ciwaringin	Ciwaringin	3.387	6,36	0,44
7.	Cilongkrang	Ciminggiri	Suplai ke Bd Ciawi	0,79	0,29
8.	Ciawi	Ciawi	151	1,02	0,28
9.	Cimanuk	Rentang	571	900	500



No.	Nama Sungai	Bendungan	Areal Layanan (Ha)	Debit (Liter/detik)	
				Maksimal	Minimal
10.	Cihikeu	Citeureup	348	1.252	0,26
11.	Cihieum	Cihieum	556	4.512	0,25
12.	Cisampora	Cimingking	383	1.439	0,18
<b>JUMLAH</b>			<b>24.230</b>	<b>8.179,75</b>	<b>504,45</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031.

**Tabel 2.4**  
**Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka**

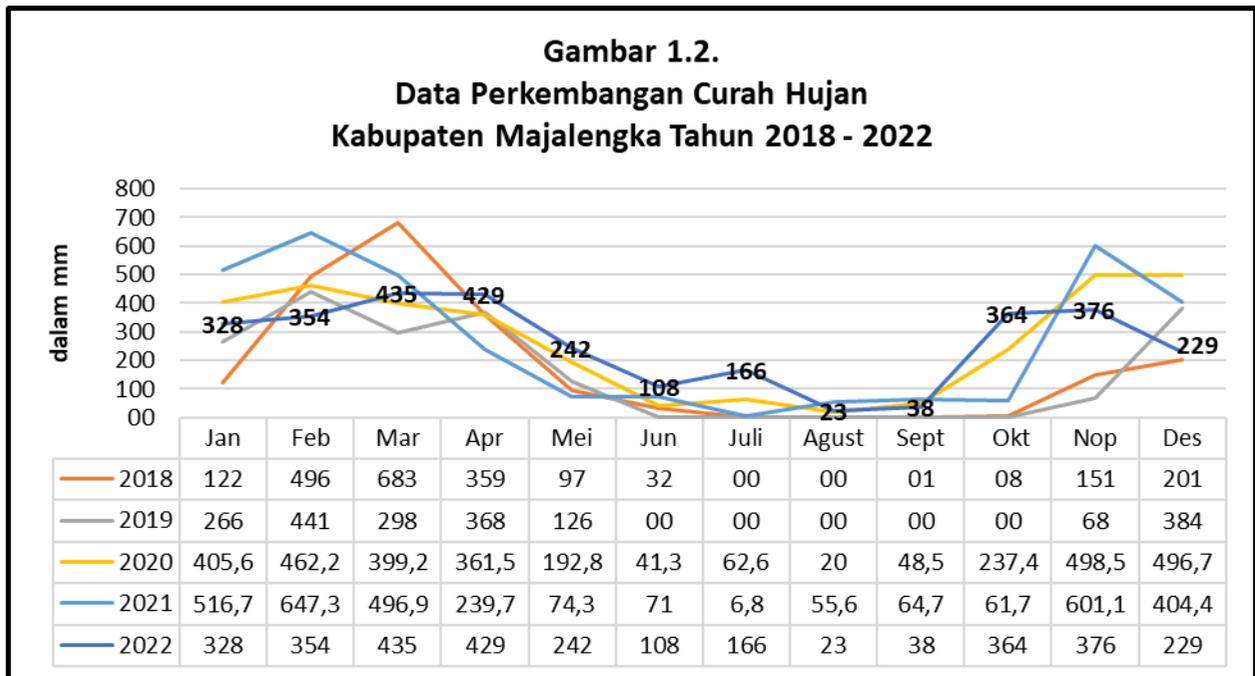
No.	Kisaran Indeks Rata-Rata	Kecamatan	Kelas	Keterangan
1.	1,64 – 2,01	Kertajati – Ligung – Dawuan dan Kasokandel – Jatiwangi	D	Kurang Berpotensi
2.	2,01 – 2,31	Palasah – Leuwimunding - Panyingkiran – Majalengka – Cigasong – Sukahaji dan Sindang – Bantarujeg dan Malausma- Talaga – Cingambul	C	Potensi Sedang
3.	2,31 – 2,61	Sumberjaya – Rajagaluh – Maja – Lemahsugih – Banjaran	B	Berpotensi
4.	2,61 - 3,14	Kadipaten – Sindangwangi – Argapura – Jatitujuh – Cikijing	A	Sangat Berpotensi

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031.

Kondisi klimatologis di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 435 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 23 mm. Kecepatan angin rata-rata berkisar 3 knot dan kecepatan tertinggi 26 knot dan kecepatan angin terendah 1 knot. Kabupaten Majalengka terkenal dengan sebutan Kota Angin karena memang pada bulan-bulan tertentu di musim kemarau angin berhembus dengan kecepatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Suhu terendah di Kabupaten Majalengka selama tahun 2022 mencapai 19,8°C dan suhu tertinggi mencapai 36,2°C. Sementara kelembapan udara terendah mencapai 39% dan kelembapan udara tertinggi mencapai 99%.

**Gambar 2.4**  
**Data Perkembangan Curah Hujan Bulanan Kabupaten Majalengka**



Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Jatiwangi Tahun 2023 (diolah).

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Lahan Sawah</b>						
1.	Irigasi	36.870	36.816	36.802	36.462	36.101
2.	Tadah Hujan	13.535	13.506	13.479	13.555	13.364
<i>Luas Lahan Sawah</i>		<b>50.405</b>	<b>50.405</b>	<b>50.281</b>	<b>50.017</b>	<b>49.465</b>
<b>Lahan Bukan Sawah</b>						
1.	Pekarangan/bangunan	13.566	13.649	13.690	3.693	14.245
2.	Tegal/Kebun	23.694	23.694	23.694	23.958	23.958
3.	Ladang/Huma	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	495	495	495	495	495
5.	Ditanami pohon/Hutan Rakyat	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
6.	Hutan Negara	14.641	14.641	14.641	14.641	14.641
7.	Perkebunan	739	739	739	739	739
8.	Lahan lainnya	7.714	7.813	7.813	7.711	7.712
9.	Rawa-rawa	99	99	99	99	99
10.	Kolam/empang	1.521	1.422	1.422	1.521	1520
<i>Luas Lahan Bukan Sawah</i>		<b>70.019</b>	<b>70.019</b>	<b>70.143</b>	<b>70.407</b>	<b>70.959</b>
<b>Luas Lahan Keseluruhan</b>		<b>120.424</b>	<b>120.424</b>	<b>120.424</b>	<b>120.424</b>	<b>120.424</b>

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

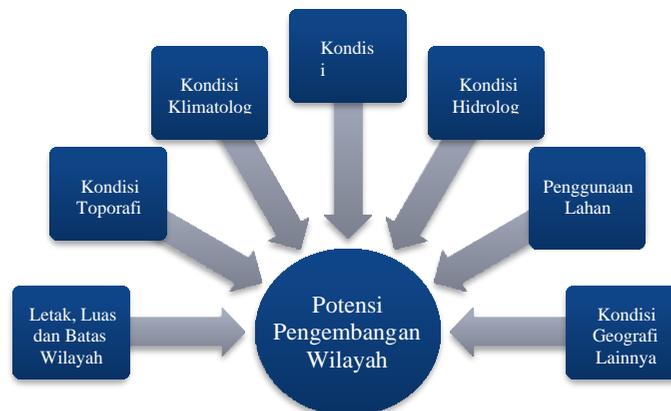
Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Berdasarkan data di atas, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2022 didominasi lahan non sawah, yaitu seluas 70.959 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.958 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 14.641 Ha. Luas lahan sawah pada tahun 2022 seluas 49.465 Ha menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Kabupaten Majalengka masih pada sektor pertanian.

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah**



Sumber: Analisa Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda dimaksud kawasan budidaya Kabupaten Majalengka terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukkan hutan produksi: Kawasan peruntukkan hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 12.934 hektar. Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 10.779 Ha, Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.135 Ha.
- b. Kawasan peruntukkan pertanian: Kawasan peruntukkan pertanian seluas 43.946 Ha terdiri atas:
  - 1) Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan;
  - 2) Kawasan Peruntukkan Hortikultura;
  - 3) Kawasan Peruntukkan Perkebunan; dan
  - 4) Kawasan Peruntukkan Peternakan.
- c. Kawasan peruntukkan perikanan seluas 1.717 hektar
- d. Kawasan peruntukkan pertambangan seluas kurang lebih 1.724 hektar
- e. Kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 1.324 hektar
- f. Kawasan peruntukkan pariwisata.  
Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas:
  - 1) Pariwisata budaya
  - 2) Pariwisata alam
  - 3) Pariwisata buatan
- g. Kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 13.455 hektar terdiri atas:
  - 1) Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.480 hektar;
  - 2) Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.975 hektar.
- h. Kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas:
  - 1) Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
  - 2) Kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity, meliputi: pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 hektar; dan pengembangan kawasan Kertajati Aerocity seluas kurang



lebih 3.200 hektar; dan

3) Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan.

Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Perkotaan:

- 1) *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)*, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Ruang wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan.
- 2) *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)*, adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga.
- 3) *Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)* adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran.

b. Pusat Kegiatan Perdesaan:

Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan beserta fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Pusat Kegiatan / Kecamatan	Fungsi Pelayanan
<b>A.</b>	<b>Pusat Kegiatan Perkotaan</b>	
<b>1.</b>	<b>Pusat Kegiatan Wilayah</b>	
	a. PKW Kadipaten (Kec. Kadipaten dan Dawuan)	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, serta pendukung kegiatan industri.
<b>2.</b>	<b>Pusat Kegiatan Lokal</b>	
	a. Perkotaan Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, Panyingkiran)	Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031.

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian 400-500 m di atas permukaan laut dan berhawa relatif panas.

Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka hampir seluruh Kabupaten Majalengka mempunyai potensi bencana yang mungkin dapat terjadi setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana persisnya bencana tersebut akan terjadi. Kabupaten Majalengka termasuk daerah rawan terjadinya bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat perbukitan dan aliran sungai yang cukup besar.

Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang masuk ke dalam kawasan Sesar Baribis. Sesar Baribis adalah Sesar aktif yang membentang dari timur hingga barat Pulau Jawa. Sesar Baribis merupakan sesar terpanjang di Pulau Jawa. Sesar ini juga melintasi sisi barat Subang dan Purwakarta, Karawang, Cibatu (Bekasi), Jakarta hingga Tangerang dan Rangkasbitung.



Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka yang kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan sangat berpotensi terjadinya bencana longsor dan pergeseran tanah di daerah ini, sesuai hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Jawa Barat.

Sedangkan wilayah utara yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekwensi adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai-sungai kecil yang bermuara di sungai-sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir.

Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung yang melanda Kabupaten Majalengka dan sering menimbulkan kerugian harta benda masyarakat.

Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Mengamati fenomena-fenomena di atas, Kabupaten Majalengka yang relatif tidak aman dari bencana, harus tetap waspada agar dampak negatifnya berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Data Lokasi Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka**

No.	Kecamatan	Potensi Bencana				
		Longsor	Tektonik	Vulkanik	Banjir	Cuaca Ekstrem
1.	Argapura	14 desa	14 desa	13 desa	14 desa	14 desa
2.	Banjaran	13 desa	13 desa	2 desa	13 desa	13 desa
3.	Bantarujeg	13 desa	13 desa	-	13 desa	13 desa
4.	Cigasong	10 desa	7 desa	4 desa	10 desa	10 desa
5.	Cikijing	15 desa	13 desa	1 desa	15 desa	15 desa
6.	Cingambul	13 desa	8 desa	-	13 desa	13 desa
7.	Dawuan	11 desa	-	-	11 desa	11 desa
8.	Jatitujuh	15 desa	-	-	15 desa	15 desa
9.	Jatiwangi	16 desa	7 desa	6 desa	16 desa	16 desa
10.	Kadipaten	7 desa	3 desa	-	7 desa	7 desa
11.	Kasokandel	10 desa	4 desa	-	10 desa	10 desa
12.	Kertajati	14 desa	-	-	14 desa	14 desa
13.	Lemahsugih	19 desa	19 desa	-	19 desa	19 desa
14.	Leuwimunding	14 desa	6 desa	7 desa	14 desa	14 desa
15.	Ligung	19 desa	-	-	19 desa	19 desa
16.	Maja	18 desa	19 desa	14 desa	18 desa	18 desa
17.	Majalengka	14 desa	8 desa	1 desa	14 desa	14 desa
18.	Malausma	11 desa	11 desa	-	11 desa	11 desa
19.	Palasah	13 desa	5 desa	7 desa	13 desa	13 desa
20.	Panyingkiran	9 desa	6 desa	-	9 desa	9 desa
21.	Rajagaluh	13 desa	10 desa	10 desa	13 desa	13 desa
22.	Sindang	7 desa	7 desa	5 desa	7 desa	7 desa
23.	Sindangwangi	10 desa	10 desa	7 desa	10 desa	10 desa
24.	Sukahaji	13 desa	13 desa	9 desa	13 desa	13 desa
25.	Sumberjaya	15 desa	-	4 desa	15 desa	15 desa
26.	Talaga	17 desa	14 desa	2 desa	17 desa	17 desa
<b>Desa</b>		<b>343 desa</b>	<b>210 desa</b>	<b>92 desa</b>	<b>343 desa</b>	<b>343 desa</b>
<b>Kecamatan</b>		<b>26 kec</b>	<b>21 kec</b>	<b>15 kec</b>	<b>26 kec</b>	<b>26 kec</b>

Sumber: BPBD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### 2.1.1.4 Demografi

Sumberdaya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mencapai 1.328.894 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,38%. Sempat terjadi lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2019 dikarenakan migrasi dari daerah-daerah sekitar



Kabupaten Majalengka sebagai dampak dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pembangunan industri di Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan Kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.278.753	1.307.995	1.315.272	1.323.854	1.328.894
	Laki-laki (Jiwa)	645.435	659.543	662.772	665.612	668.505
	Perempuan (Jiwa)	633.318	648.452	652.500	658.242	660.389
2.	Sex Ratio	101,91	101,71	101,57	101,12	101,23
3.	LPP (%)	0,75	2,29	0,56	0,65	0,38
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.062	1.086	1.092	1.099	1.104

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Majalengka Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Lemahsugih	33,074	32,061	65,135	103,16
2.	Bantarujeg	24,071	23,969	48,040	100,43
3.	Cikijing	35,043	34,224	69,267	102,39
4.	Talaga	24,933	24,316	49,249	102,54
5.	Argapura	18,619	18,002	36,621	103,43
6.	Maja	26,736	26,490	53,226	100,93
7.	Majalengka	36,881	37,244	74,125	99,03
8.	Sukahaji	24,191	24,107	48,298	100,35
9.	Rajagaluh	23,916	23,622	47,538	101,24
10.	Leuwimunding	32,886	32,058	64,944	102,58
11.	Jatiwangi	46,067	45,477	91,544	101,30
12.	Dawuan	23,940	23,904	47,844	100,15
13.	Kadipaten	23,704	23,289	46,993	101,78
14.	Kertajati	24,217	24,243	48,460	99,89
15.	Jatitujuh	27,705	27,967	55,672	99,06
16.	Ligung	33,326	33,491	66,817	99,51
17.	Sumberjaya	32,741	32,376	65,117	101,13
18.	Panyingkiran	16,477	16,359	32,836	100,72



No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
19.	Palasah	27,047	26,846	53,893	100,75
20.	Cigasong	19,155	18,779	37,934	102,00
21.	Sindangwangi	17,682	17,249	34,931	102,51
22.	Banjaran	12,853	12,921	25,774	99,47
23.	Cingambul	22,145	21,647	43,792	102,30
24.	Kasokandel	26,943	26,714	53,657	100,86
25.	Sindang	8,555	8,605	17,160	99,42
26.	Malausma	25,598	24,429	50,027	104,79
Kabupaten Majalengka		<b>668,505</b>	<b>660,389</b>	<b>1,328,894</b>	<b>101,23</b>

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Karakteristik Penduduk berdasarkan Pendidikan, salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018-2022.

**Tabel 2.10**  
**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas**  
**Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tidak/Belum Punya Ijazah SD	12,61	26,19	26,92	18,30	26,83
2.	SD	50,66	41,97	41,14	8,50	38,64
3.	SLTP	18,80	15,91	16,36	39,12	16,84
4.	SLTA	14,09	12,41	12,18	16,69	13,86
5.	D I/ D3	1,16	0,97	0,93	14,57	0,95
6.	S1	2,54	2,41	2,35	2,68	2,74
7.	S2	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
8.	S3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

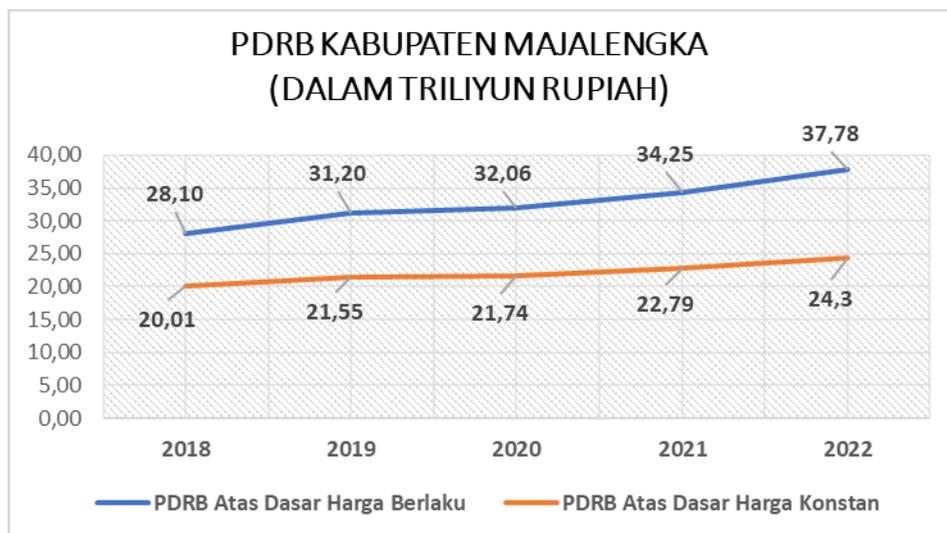
## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 20,01 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 24,3 triliun pada tahun 2022, dengan laju PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 sebesar 6,63%.

**Gambar 2.6**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka disebabkan mulai melandainya kondisi pandemi. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sebelumnya menjadi sector yang paling banyak menyumbang jumlah total seluruh PDRB di Kabupaten Majalengka, pada tahun 2021 dan 2022 ini posisinya tergeser oleh sektor Industri Pengolahan.

Terdapat 4 sektor yang dominan dalam menyumbang nilai PDRB yaitu sektor Industri Pengolahan (25,15%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,23%), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,72%), dan Konstruksi (11,72%).



**Tabel 2.11**  
**Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka**  
**(Juta Rupiah)**

No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4.080.044,6	6.629.837,7	4.119.332,4	7.044.841,4	4.116.819,1	7.205.171,9	4.152.808,92	7.239.252,07	4.388.830,50	8.020.416,60
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	398.156,7	432.557,6	382.994,6	434.037,9	380.757,07	434094,2	380.937,13	477.363,60	380.664,20	513.037,21
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.550.305,1	4.922.245,7	4.443.685,5	6.329.820,7	4.851.513,3	7.052.656,3	5.447.301,53	8.167.474,92	6.173.712,69	9.501.191,67
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	16.437,4	23.633,3	17.385,5	24.992,8	19.757,5	28.222,7	22.581,65	32.274,59	25.168,13	36.215,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	11.081,8	16.650,6	11.798,0	17.734,9	13.917,8	21.030,7	16.953,77	27.742,87	19.498,46	32.238,47
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.739.963,6	3.687.514,2	2.850.002,2	3.952.981,5	2.699.491,4	3.764.137,6	2.842.509,74	4.170.900,57	2.858.901,81	4.428.337,87
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.459.193,8	4.467.860,4	3.621.896,8	4.776.642,3	3.403.003,3	4.601.445,9	3.504.158,05	4.821.564,99	3.642.339,37	5.183.571,93
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	760.899,2	1.102.792,1	822.488,2	1.204.613,8	771.718,6	1.161.084,9	767.098,58	1.187.180,90	842.092,70	1.364.746,67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	664.636,6	871.002,9	704.748,5	949.373,2	653.263,3	925.088,1	644.936,81	943.267,22	707.643,05	1.080.190,50



No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	829.901,2	818.257,4	897.047,9	876.895,1	1.183.794,3	1.164.249,8	1.267.351,34	1.226.678,17	1.336.248,51	1.277.962,12
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	576.695,7	780.933,5	603.051,3	844.738,7	611.875,3	862.382,9	631.871,12	917.180,24	636.315,93	997.561,15
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	268.035,7	319.644,5	291.965,3	351.190,4	294.050,6	354.982,4	318.805,26	385.824,82	338.550,15	422.482,11
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	71.421,9	88.432,1	76.313,0	105.358,0	68.549,4	98.104,0	70.674,97	104.460,91	77.468,16	119.159,34
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	631.114,6	1.008.538,8	648.241,3	1.066.499,1	622.869,9	1.041.440,4	612.568,81	1.048.206,49	605.996,90	1.034.076,73
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.146.933,6	1.907.856,8	1.204.867,6	2.084.961,2	1.220.914,2	2.172.685,6	1.238.966,83	2.247.016,22	1.303.364,05	2.340.003,60
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	215.907,5	287.781,3	229.384,6	312.269,9	235.109,3	327.764,7	250.703,88	356.176,06	263.313,21	375.555,31
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	586.149,9	732.817,4	625.046,7	825.247,1	589.200,4	840.665,5	618.525,86	893.053,18	700.666,20	1.052.089,62
	<b>PDRB</b>	<b>19.935.540,9</b>	<b>28.098.356,4</b>	<b>21.358.916,5</b>	<b>31.202.197,9</b>	<b>21.736.604,9</b>	<b>32.055.207,9</b>	<b>22.788.754,26</b>	<b>34.245.617,82</b>	<b>24.300.774,06</b>	<b>37.778.836,04</b>

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama kurun waktu 2018-2020, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan, dan sektor Konstruksi menjadi empat sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Majalengka, namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan, dimana dominasi kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tergeser dengan meningkatnya



kontribusi sektor Industri Pengolahan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka**

No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	20,39	23,60	19,12	22,58	18,94	22,48	18,22	21,14	18,06	21,23
2.	Pertambangan dan Pengalihan/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,99	1,54	1,78	1,39	1,75	1,35	1,67	1,39	1,57	1,36
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	17,75	17,52	20,62	20,29	22,32	22,00	23,90	23,85	25,41	25,15
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	13,70	13,12	13,22	12,67	12,42	11,74	12,47	12,18	11,76	11,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	17,29	15,90	16,81	15,31	15,66	14,35	15,38	14,08	14,99	13,72
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3,80	3,92	3,82	3,86	3,55	3,62	3,37	3,47	3,47	3,61
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,32	3,10	3,27	3,04	3,01	2,89	2,83	2,75	2,91	2,86
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,15	2,91	4,16	2,81	5,45	3,63	5,56	3,58	5,50	3,38
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,88	2,78	2,80	2,71	2,81	2,69	2,77	2,68	2,62	2,64
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,34	1,14	1,35	1,13	1,35	1,11	1,40	1,13	1,39	1,12



No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb								
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,36	0,31	0,35	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,15	3,59	3,01	3,42	2,87	3,25	2,69	3,06	2,49	2,74
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,73	6,79	5,59	6,68	5,62	6,78	5,44	6,56	5,36	6,19
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,08	1,02	1,06	1,00	1,08	1,02	1,10	1,04	1,08	0,99
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,93	2,61	2,90	2,64	2,71	2,62	2,71	2,61	2,88	2,78
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>									

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

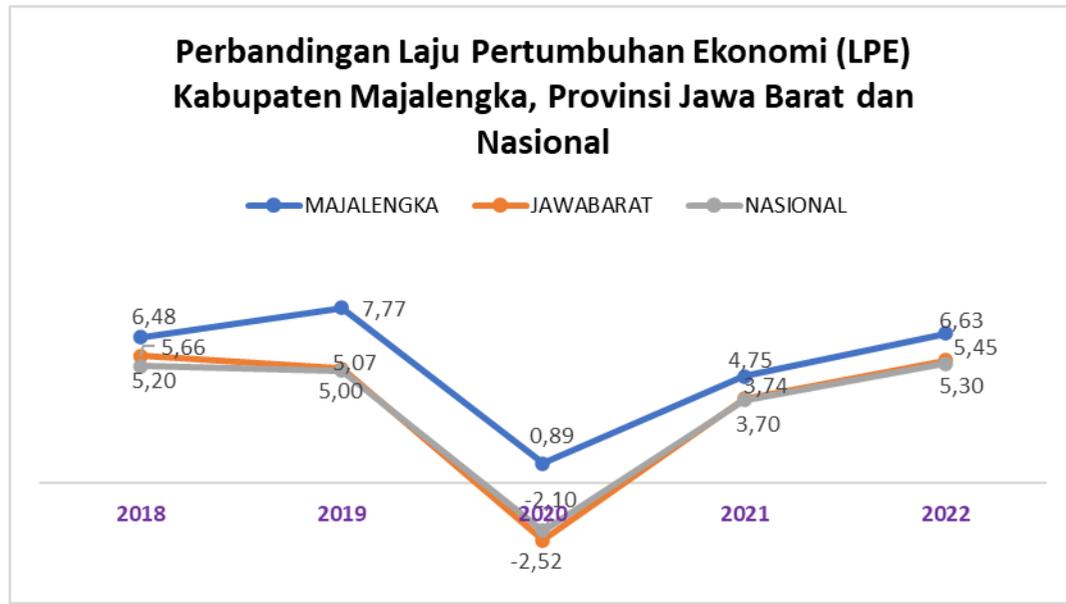
## b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 4,75%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2022 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE kedua adalah Kabupaten Karawang (6,31%) dan urutan ketiga adalah Kota Cimahi (5,92%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, yang mampu tumbuh sebesar 15,01%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (tumbuh 13,34%), lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 13,28%), serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 11,45%), sementara lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan lapangan

usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,78 persen, 9,72 persen dan 9,61 persen. Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut:

**Gambar 2.7**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### c. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selama ini nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang dihitung nilai inflasi

daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran Inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon.

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan survey Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Sehingga setelah pelaksanaan kedua survey tersebut, direncanakan pada tahun 2024 BPS Kabupaten Majalengka baru akan menghitung dan mengeluarkan nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024. Berikut data-data capaian inflasi daerah di wilayah Kota Cirebon:

**Tabel 2.13**

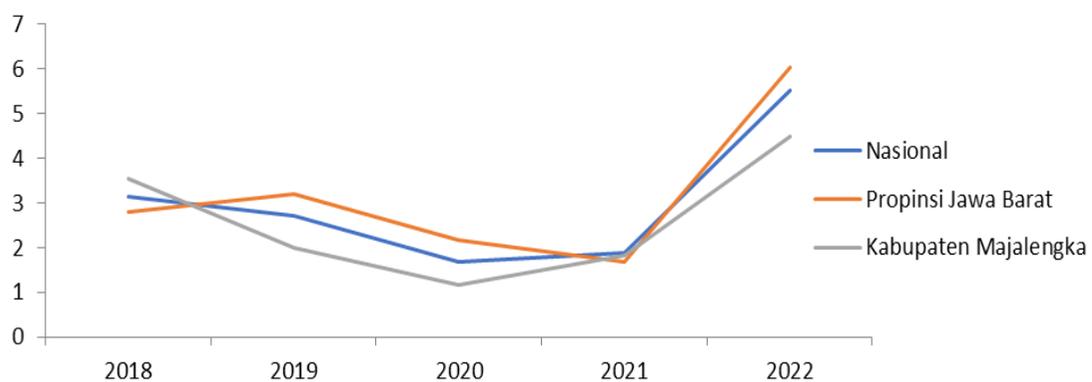
**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

No.	Wilayah Inflasi	Inflasi Tahunan (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51
2	Jawa Barat	2.8	3.21	2.18	1.69	6.04
3	Kota Cirebon	3.54	2	1.16	1.81	4.48

Sumber: BPS Kota Cirebon, Tahun 2018-2023.

**Gambar 2.8**

**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon memiliki nilai inflasi sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat sebesar  $3\pm 1$  persen. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan melebihi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk segera mengendalikan inflasi.

#### d. PDRB Per Kapita

Dengan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data selengkapnya mengenai PDRB per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14**  
**PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	PDRB Per Kapita ADH Konstan 2010(Rp)	PDRB Per Kapita ADH Berlaku(Rp)
1.	2018	16.682.130	23.428.964
2.	2019	17.883.519	25.812.255
3.	2020	16.650.329	24.725.655
4.	2021	17.278.000	25.964.008
5.	2022	18.197.000	28.289.000

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

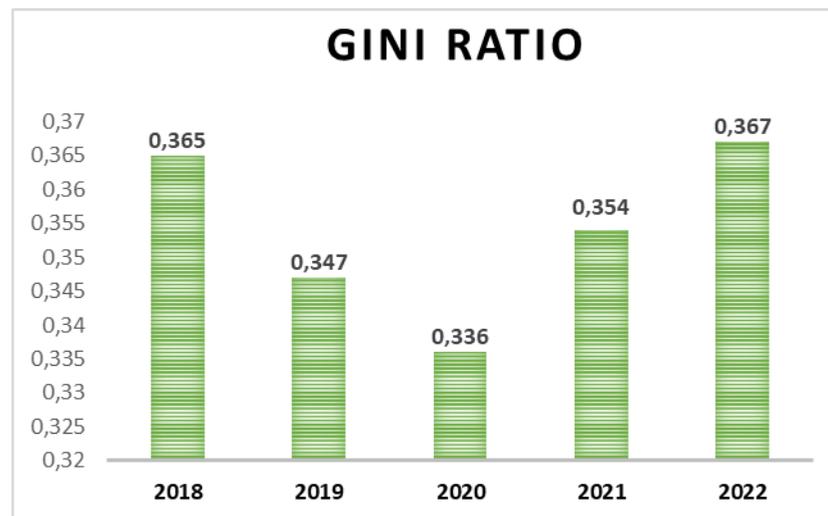
Dari tabel 2.14, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu tahun 2018-2019 selalu mengalami peningkatan, namun sempat menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 24.725.655 dikarenakan Pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2021 naik kembali menjadi Rp 25.964.008 dan pada tahun 2022 naik signifikan menjadi Rp 28.289.000.

#### e. Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat

pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.9 sebagai berikut.

**Gambar 2.9**  
**Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	0,365	0,347	0,336	0,354	0,367
Jawa Barat	0,407	0,402	0,403	0,412	0,417
Nasional	0,384	0,380	0,381	0,381	0,381

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio < 0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;



- $0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- $\text{Gini Ratio} > 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

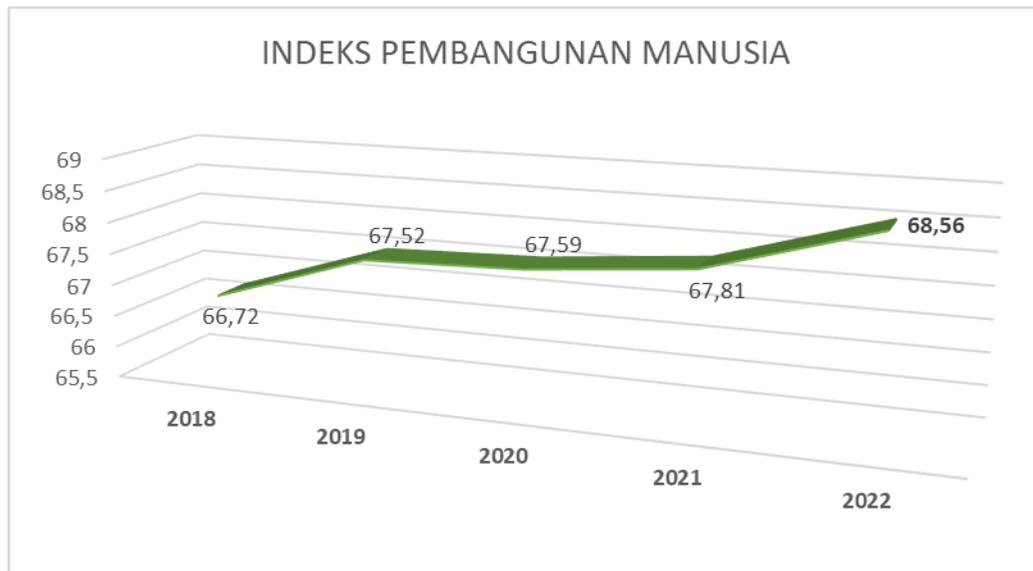
Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukkan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 masih tergolong sedang (0,367). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,417) dan Nasional (0,381) walaupun masih dalam kategori sedang.

#### **f. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” :  $IPM \geq 80$ .
2. Kelompok “tinggi” :  $70 \leq IPM < 80$ .
3. Kelompok “sedang” :  $60 \leq IPM < 70$ .
4. Kelompok “rendah” :  $IPM < 60$ .

**Gambar 2.10**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Indeks Pembangunan Manusia antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.16**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	66,72	67,52	67,59	67,81	68,56
Jawa Barat	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka terus meningkat setiap tahunnya, Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat walaupun hanya 1,106% dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat (73,12 poin) dan Nasional (72,91 poin) yang



sudah masuk Kategori tinggi, nilai capaian IPM Kabupaten Majalengka masih dalam kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Majalengka.

#### **g. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan**

Konsep definisi dari Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Sebagai contoh interpretasi, Pengeluaran per kapita Majalengka pada tahun 2022 sebesar Rp.9.950.000, artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Majalengka selama setahun adalah Rp. 9.950.000. Nilai ini masih jauh dibawah jika dibandingkan dengan nilai Pengeluaran perkapita Provinsi Jawa Barat maupun Nasional yang nilainya sudah mencapai lebih dari sepuluh juta rupiah.

Perbandingan nilai Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17**  
**Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	9.416	9.822	9.521	9,591	9.950
Jawa Barat	10.790	11.152	10.850	10.934	11.277
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

#### **h. Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 2.18**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	129.290	121.060	138.200	151.100	147.120
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama kurun waktu 2018-2022, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43 dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, namun pada tahun 2022 turun menjadi 11,94%. Angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (8,06%) dan Nasional (9,57%).

**Tabel 2.19**  
**Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Angka Kemiskinan (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94
Jawa Barat	7,25	6,82	7,88	8,40	8,06
Nasional	9,66	9,22	9,78	9,71	9,57

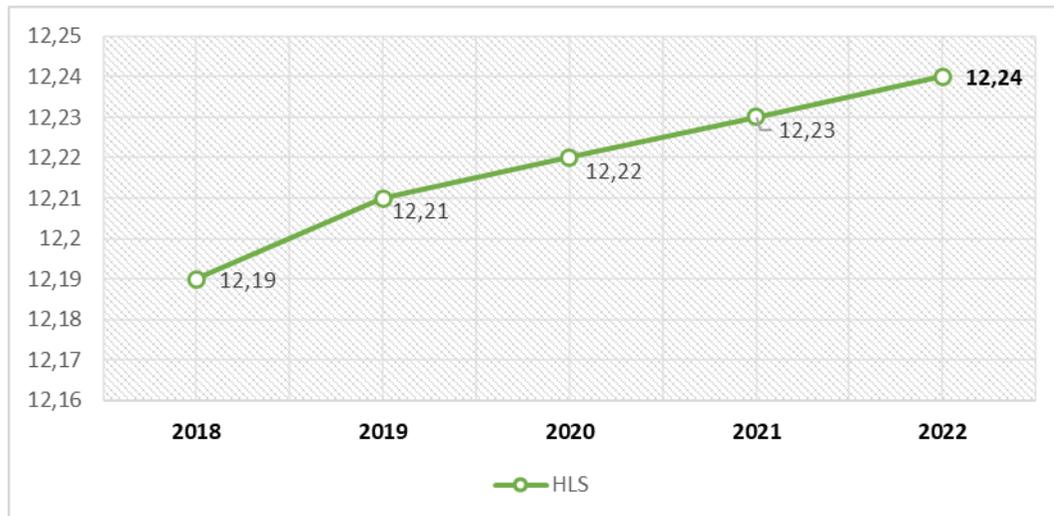
Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

#### a. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*), didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan EYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut.

**Gambar 2.11**  
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama periode tahun 2018-2022, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka selalu meningkat, yaitu 12,19 tahun pada tahun 2018, meningkat menjadi 12,24 tahun pada tahun 2022. Angka ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Majalengka memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,24 tahun, atau setara dengan SMA kelas 3. Angka ini meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan pada tahun 2021.

Perbandingan angka Angka Harapan Sekolah antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20**  
**Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

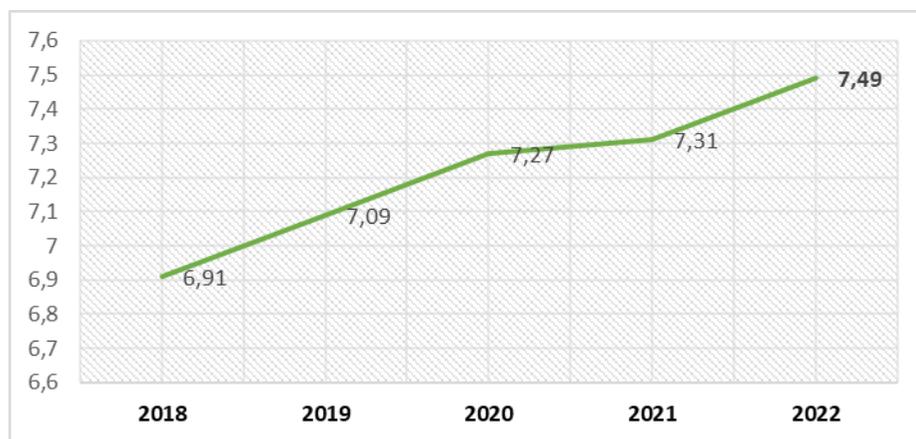
Wilayah	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	12,19	12,21	12,22	12,23	12,24
Jawa Barat	12,45	12,48	12,50	12,61	12,62
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Angka HLS Kabupaten Majalengka Kondisi tahun 2022 tidak terpaut jauh dengan angka HLS Jawa Barat (12,62 Tahun) serta terpaut sebesar 0,86 tahun dengan angka HLS Nasional (13,10 Tahun).

Rata-rata Lama Sekolah (*Means Years of Schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan MYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.12**  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perkembangan MYS atau Rata-rata Lama Sekolah tahun 2018-2022 menunjukkan grafik yang menaik yaitu dari 6,91 tahun pada tahun 2018 menjadi 7,49 tahun pada 2022. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Majalengka secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,49 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas 1.

Perbandingan angka Angka Rata Lama Sekolah antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**  
**Perbandingan Angka Rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Angka Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	6,91	7,09	7,27	7,31	7,49
Jawa Barat	8,15	8,37	8,55	8,61	8,78
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

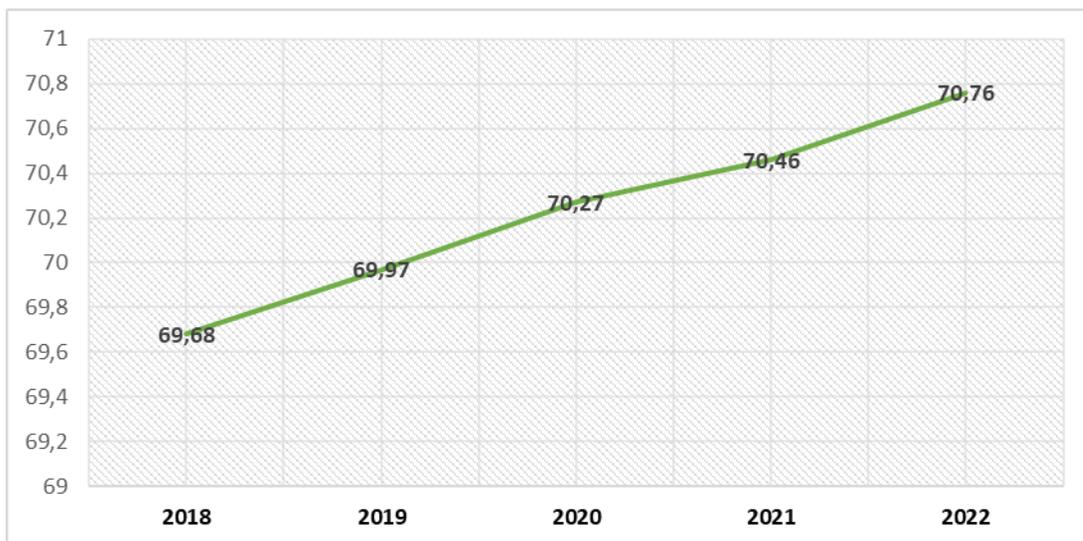
Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir angka Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka masih berada terpaut jauh dibawah RLS Jawa Barat (8,78 tahun) dan Nasional (8,69 Tahun).

## b. Kesehatan

Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.13**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pada rentang tahun 2018-2022 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 69,68 tahun pada tahun 2018 menjadi 70,76 tahun pada tahun 2022. Angka ini bisa diartikan bahwa bayi yang baru lahir di Majalengka memiliki peluang untuk hidup hingga 70,76 tahun. Sedangkan menurut WHO, kondisi ideal AHH adalah sebesar 85 tahun, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak

implementasinya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang kesehatan.

**Persentase balita gizi buruk** adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

1. rendah = di bawah 10%
2. sedang = 10-19%
3. tinggi = 20-29%
4. sangat tinggi = 30%

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun 2022 sebesar 0,19%, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 10% dapat dikatakan rendah. Perkembangan persentase gizi buruk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.22**  
**Persentase Balita Gizi Buruk**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
1.	2018	0,04
2.	2019	0,25
3.	2020	0,15
4.	2021	0,13
5.	2022	0,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### c. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Majalengka pada kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.23**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)
1.	2018	95,05
2.	2019	95,63
3.	2020	94,16
4.	2021	94,29
5.	2022	95,84

Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2023.

Dari data diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja selama periode 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka yang bekerja mencapai 95,84% dari jumlah seluruh angkatan kerja.

#### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Indikator perkembangan seni budaya selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Seni dan Budaya**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah grup kesenian	494	610	405	683	683
2.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-

Sumber: Disparbud Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.



### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**

##### **a. Pendidikan**

Pendidikan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara dan didalamnya mengandung satu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan, mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

1. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
2. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat1 adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel berikut ini.

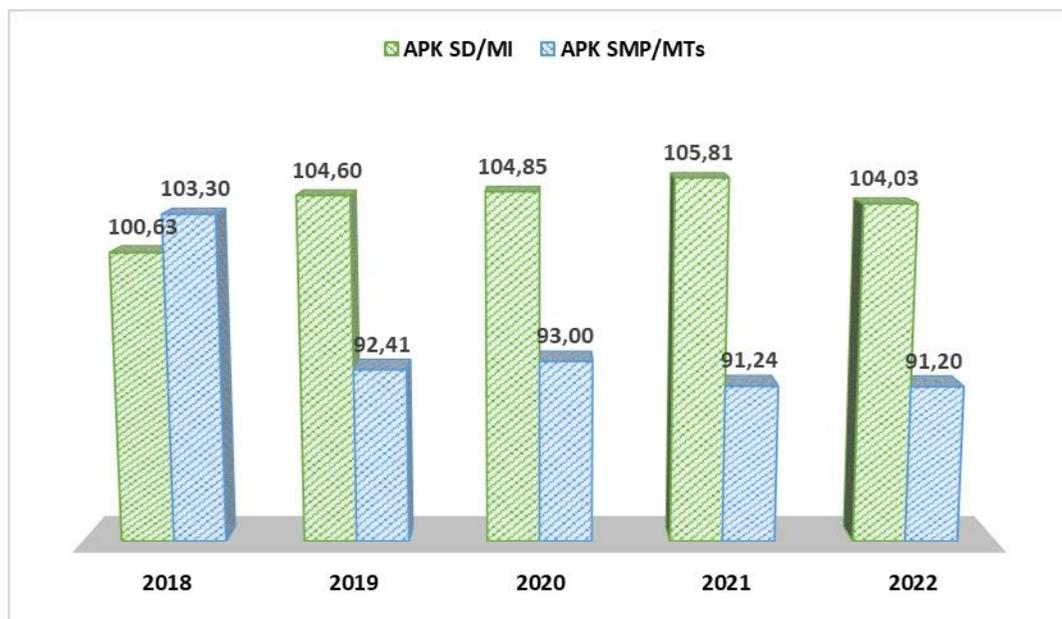
**Tabel 2.25**  
**Penyelenggaraan PAUD**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Siswa (Jiwa)	22.732	35.996	40.843	25.681	40.064
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun (Jiwa)	60.099	59.245	62.153	42.470	42.332
3.	APK	37,82	60,76	65,71	95,05	94,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikut-sertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Angka APK SD/MI Kabupaten Majalengka tahun 2022 (104,03) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (105,81), dan APK SMP/MTs tahun 2022 (91,20) juga mengalami penurunan dibanding tahun 2021 (91,24). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

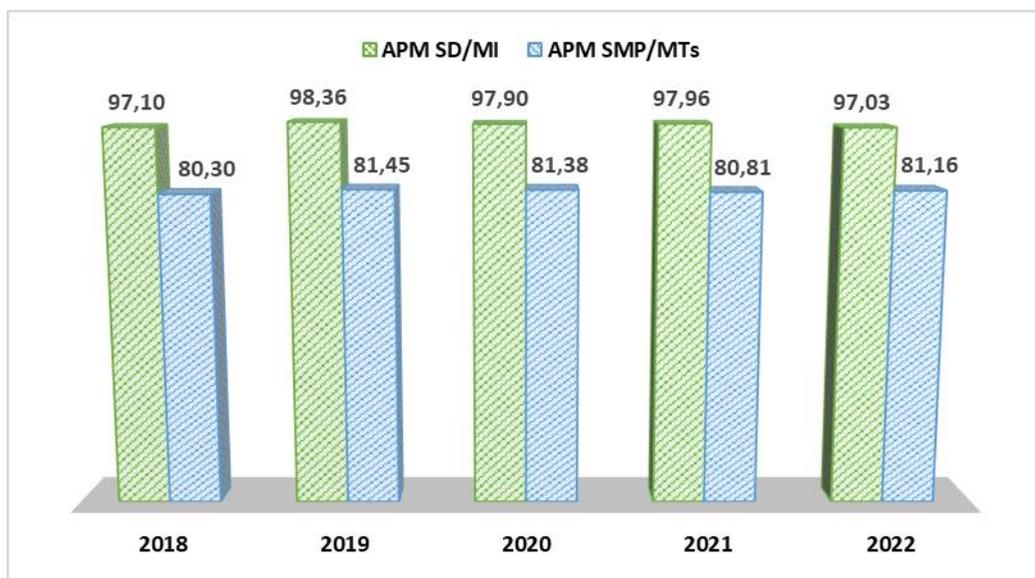
**Gambar 2.14**  
**Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Status APM SD/MI pada tahun 2022 (97,03) menurun dibanding tahun 2021 (97,96), dan APM SMP/MTs pada tahun 2022 (81,16) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (80,81). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

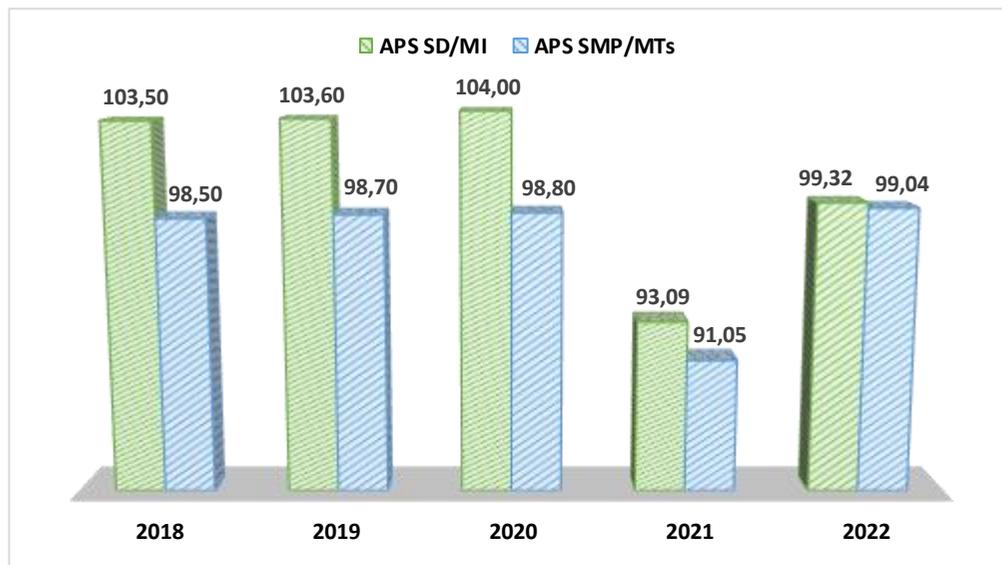
**Gambar 2.15**  
**Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah dan peningkatan akses masuk sekolah. Adapun perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.16**  
**Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah**, salah satu indikator mutu penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian Angka Kelulusan para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi indikator ini adalah 100% siswa lulus. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Majalengka, angka kelulusan pada siswa SD/MI dan SMP/MTs tahun 2022 telah mencapai angka 100%.

Indikator lain dalam mutu penyelenggaraan pendidikan yaitu Angka Melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs turun pada tahun 2022 yaitu sebesar 83,50% dibandingkan tahun 2021 sebesar 87,20%, sebaliknya Angka Melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2022 turun yaitu sebesar 84,90% dibandingkan tahun 2021 sebesar 91,10%. Dalam hal kualitas para pengajar, kualitas tenaga pengajar di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 ada penurunan yang diindikasikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV yaitu sebanyak 88,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,43%. Data Perkembangan Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.26**  
**Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	AL SD/MI	99,8	100	100	100	100
2.	AL SMP/MTS	96,8	100	100	100	100
3.	AM SD/MI KE SMP/MTS	99,4	100,00	99,10	87,20	84,97
4.	AM SMP/MTS KE SMA/MA/SMK	90,50	90,80	91,01	91,10	83,58
5.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV	90,00	91,49	99,32	99,43	88,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Ketersediaan Sekolah,** Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.27**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka**

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah gedung sekolah (Unit)	667	668	668	671	674
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (Jiwa)	119.512	121.267	128.534	130.561	131.507
3.	Rasio	1 : 179	1 : 181	1:192	1:194	1:195
<b>B</b>	<b>SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah gedung sekolah (Unit)	104	112	112	121	124
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (Jiwa)	59.980	60.454	63.460	63.866	56.208
3.	Rasio	1 : 576	1 : 539	1:566	1:527	1:453

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Rasio Guru Terhadap Murid,** adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah Guru (Jiwa)	6.148	6.120	6.039	5.886	5.766
2.	Jumlah Murid (Jiwa)	122.146	111.538	111.704	112.122	113.337
3.	Rasio	1 : 20	1 : 18	1 : 19	1:19	1:20
<b>B</b>	<b>SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah Guru (Jiwa)	2.296	2.301	2.315	2.346	2.247
2.	Jumlah Murid (Jiwa)	38.215	38.326	39.516	39.898	39.724
3.	Rasio	1:17	1 : 17	1 : 17	1:17	1:18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan melalui 3 jenis pelayanan seperti tabel berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Kabupaten Majalengka Urusan Pendidikan Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target SPM	Capaian SPM
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%	94,58 %
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%	95 ,03%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	103,19%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	94,64%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

## b. Kesehatan

**Angka Kematian Bayi**, adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

**Tabel 2.30**  
**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi (Permil)
1.	2018	4,01
2.	2019	3,76
3.	2020	3,62
4.	2021	2,29
5.	2022	4,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Angka Kematian Ibu**, Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.31**  
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Angka Kematian Ibu (Permil)
1.	2018	77,32
2.	2019	73,20
3.	2020	66,77
4.	2021	81,07
5.	2022	2,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

**Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)**, yaitu suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat

menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.

Karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Data rasio posyandu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**  
**Perkembangan Rasio Posyandu**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Jumlah Posyandu(Unit)	Jumlah Balita (Jiwa)	Rasio Posyandu Per 1000 Balita (Permil)
1.	2018	1.461	94.484	15,46
2.	2019	1.485	92.969	15,97
3.	2020	1.489	91.473	16,27
4.	2021	1.422	6.571	70,32
5.	2022	1.497	98.850	12,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Rasio dan Cakupan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu,** Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksud rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan



masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poliklinik
1.	Lemahsugih	-	2	5	1
2.	Bantarujeg	-	1	3	1
3.	Malausma	-	1	3	-
4.	Cikijing	-	1	2	4
5.	Cingambul	-	1	5	-
6.	Talaga	-	1	3	4
7.	Banjaran	-	1	3	1
8.	Argapura	-	1	3	1
9.	Maja	-	1	5	-
10.	Majalengka	1	2	2	17
11.	Cigasong	-	1	2	5
12.	Sukahaji	-	2	1	1
13.	Rajagaluh	-	1	4	-
14.	Sindangwangi	-	1	3	-
15.	Sindang	-	1	0	-
16.	Leuwimunding	-	1	2	1
17.	Palasah	-	1	2	1
18.	Jatiwangi	-	2	3	8
19.	Dawuan	1	1	1	1
20.	Kasokandel	-	1	1	2
21.	Panyingkiran	-	1	1	1
22.	Kadipaten	-	1	2	4
23.	Kertajati	-	2	8	4
24.	Jatitujuh	-	2	2	4
25.	Ligung	-	1	5	2
26.	Sumberjaya	-	1	3	4
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>32</b>	<b>74</b>	<b>67</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator kinerja aspek pelayanan umum diantaranya berupa rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per satuan penduduk. Data tersebut dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.34**  
**Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**

No.	Aspek Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14
2.	Cakupan puskesmas (%)	123,08	123,08	123,08	123,08	79,41
3.	Cakupan puskesmas pembantu (%)	18,66	21,28	21,28	21,28	8,96
4.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,31	0,38	0,38	0,38	0,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

**Rasio Dokter,** Sementara itu, untuk jumlah tenaga dokter di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 rasionya sebesar 21,61 terhadap 100.000 penduduk. Pemenuhan tenaga medik untuk dokter umum dan dokter gigi di pelayanan primer sangat berpengaruh pula terhadap pemenuhan SDM kesehatan yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang diterima oleh setiap puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis di beberapa spesialisasi.

**Tabel 2.35**  
**Rasio Dokter terhadap 1.000 Penduduk**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Aspek Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio dokter terhadap 1.000 penduduk	0,16	0,21	0,16	0,28	21,61
2.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,39	0,42	0,30	0,28	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

**Komplikasi Kebidanan yang ditangani**, perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.36**  
**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)
1.	2018	118,32
2.	2019	120,24
3.	2020	181,72
4.	2021	103,04
5.	2022	113,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Data menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani selalu mengalami peningkatan dengan kondisi terakhir pada tahun 2022 sebesar 113,27%.

**Pertolongan Persalinan**, guna meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat dengan indeks kesehatan diantaranya perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaiannya sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.37**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)
1.	2018	101,19
2.	2019	103,14
3.	2020	105,22
4.	2021	106,8
5.	2022	100,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Sebagaimana terlihat pada data diatas bahwa pada tahun 2022 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Majalengka terealisasi sebesar 100,69%.

**Stunting** adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan, Penyebab stunting menurut Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Majalengka berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan.sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.38**  
**Data Prevalensi Stunting**  
**Kabupaten Majalengka 2018 – 2022**

No.	Tahun	Prevalensi Stunting (%)
1.	2018	36,62
2.	2019	28,53
3.	2020	n/a
4.	2021	23,00
5.	2022	24,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Cakupan penemuan penyakit TBC BTA dan HIV/AIDS di Kabupaten Majalengka**, Pemangku kepentingan tingkat Nasional telah menetapkan strategi dan rencana aksi untuk mencapai Indonesia bebas AID, Tuberkolusis dan Malaria pada tahun 2030. Perkembangan penanganan penyakit menular tersebut di Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan data sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.39**  
**Cakupan Penemuan Penyakit TBC dan AIDS**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (%)	40,92	73,5	58,60	52,10	93,50
2.	Orang dengan AIDS	62	93	86	112	157

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan melalui 12 jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini.



**Tabel 2.40**  
**Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Kabupaten Majalengka Urusan Kesehatan**  
**Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM	% Capaian SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	19.088	19.101	100,07%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	18.221	18.347	100,69%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	17.353	18.445	106,29%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	83.852	98.850	117,89%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	47.276	46.433	98,22%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	770.951	561.743	72,86%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	278.153	212.644	76,45%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	170.803	130.637	76,48%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	13.600	13.748	101,09%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.458	1.493	102,40%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM	% Capaian SPM
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	16.387	16.387	100%
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	25.280	19.658	77,76 %

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022, Tahun 2023.

### c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan.

Kondisi Jalan, berdasarkan data terbaru panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka tahun 2022 adalah 654,40 Km, data selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.41**  
**Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) (%)	87,99	53,82	63,17	75,79	71,23
	- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) (Km)	629,69	494,45	580,35	696,28	654,40
	- Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	918,72	918,73	918,73	918,73	918,73
2.	Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km)	918,72	918,73	918,73	918,73	918,73



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan Permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km)	918,72	918,73	918,73	918,73	918,73

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Kondisi Jaringan Irigasi, kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung, Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42**  
**Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Irigasi Kabupaten kondisi baik (%)	76,30	76,30	76,77	77,32	75,51

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Penataan Ruang**, untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber-IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.43**  
**Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,67	83,67	90	90	54,02
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	6,26	6,52	6,70	6,81	6,89

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum melalui 2 jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.44**  
**Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Kabupaten Majalengka Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	80,89%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	69,65%

Sumber: LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

#### d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Kondisi Perumahan**, kondisi rumah tinggal dan rumah tangga di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.45 di bawah. Pada Tahun 2022 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 324.240 Kepala Keluarga dengan persentase sebesar 69,76%. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 376.106 Kepala Keluarga.

**Tabel 2.45**  
**Kondisi Perumahan Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (%)	65,14	68,47	68,49	69,62	69,76
2.	Rumah tangga bersanitasi (KK)	298.452	313.730	314.205	323.565	324.240
3.	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	339.851	367.774	368.626	374.699	376.106
4.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	74,17	80,27	80,45	80,62	80,92
5.	Cakupan pelayanan air bersih yang bersumber dari mata air(KK)	831	430	378	425	1.900

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Rumah Layak Huni**, Tahun 2022 jumlah rumah layak huni sebanyak 373.386 unit dengan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk sebesar 96,24%. Lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.46**  
**Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Layak Huni (unit)	364.991	345.972	347.196	349.784	373.386
2.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,98	94,63	94,93	95,63	96,24
3.	Rasio permukiman layak huni (%)	99,39	99,60	99,05	99,05	99,85
4.	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,070	0,050	0,050	0,050	0,147

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat melalui 5 (lima) jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.47**  
**Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	47	47
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	47	47
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	47	47

Sumber: LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2022.



### e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.48**  
**Indikator Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,20	2,10	2,19	2,12	1,93
2.	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	26,82	26,22	26,22	25,91	19,61
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	6,10	6,10	3,86	7,97	7,97
4.	Penegakan PERDA	96,92%	95,04%	95,59%	95,02%	91,5%
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.430	3.430	3.430	3.430	2.620
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	54,62	31,78	51,19	55,88	45,45

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas melalui 2 (dua) jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.49**  
**Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Kabupaten Majalengka Urusan Trantibumlinmas Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### f. Sosial

Pada Tahun 2022, Kabupaten Majalengka memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 111 unit. Secara lengkap data penanganan masalah sosial di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.50**  
**Data Penanganan Masalah Sosial**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	135	111	36	107	111
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	135,11	91,67	83,70	121,90	38,07

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam



rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial melalui 5 (lima) jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 2.51**  
**Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Kabupaten Majalengka Urusan Sosial Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	5.026 orang	1.267 orang
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	200.883 orang	84.338 orang
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	35.022 orang	6.129 orang
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	18 orang	7 orang
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	8.368 orang	8.368 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### a. Tenaga Kerja

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya

persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 66,21%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar 4,16% menurun sebesar 1,55% dari tahun 2021 sebesar 5,71%.

Data situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka secara lengkap bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.52**  
**Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*)	%	65,76	67,97	69,66	67,63	66,21
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka *)	%	4,95	4,37	5,84	5,71	4,16
3.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja per tahun	Kasus	9	2	10	2	15
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	39,06	70,90	49,41	20,59	16,89
5.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Balai Latihan Kerja	Unit	2	2	2	16	15
7.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Buah	126	63	55	55	30
8.	Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri	Orang	124	2.909	655	415	2.129
9.	Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	12	18	20	20	17
10.	Jumlah Pekerja Warga Negara Asing	Orang	112	112	157	161	185

Sumber: Dinas K2UKM dan BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.53**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kabupaten Majalengka	4,95	4,37	5,48	5,71	4,16
Jawa Barat	8,17	7,99	7,69	9,82	8,31
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Secara umum perkembangan TPT pada lima tahun terakhir di Kabupaten Majalengka cukup bagus, ini ditandai dengan angka TPT yang selalu berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

#### **b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2021 sebesar 53,54%, angka ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat.

Rasio KDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan



Anak dan Keluarga Berencana pada Tahun 2021 dari 471.201 rumah tangga terdapat 3 kasus kekerasan rumah tangga.

Selain KDRT, hal lain yang diperhatikan adalah penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis, kesadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM, Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Pada tahun 2021 terdapat 20 laporan/pengaduan tindakan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka dan laporan/pengaduan tersebut telah ditangani sebanyak 100%.

### **c. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Capaian ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.54**  
**Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka**

No.	Data	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan</b>							
1.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	- Ketersediaan Energi	Kkal/ Kapita/Hari	2.651,43	2.627,22	2.540,04	2.735,80	2.650,98
	- Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	90,06	83,83	74,85	85,95	82,69
	- Skor PPH Ketersediaan	%	87,00	86,90	93,80	94,00	88,60
<b>B. Distribusi dan Akses Pangan</b>							
1.	ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	100	100	100	100
2.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100	100	100	100
<b>C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>							
1.	Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	100	100	100	100	100
2.	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	20	20	74	53,6	43
3.	Ketersediaan Pangan (LPM)	Unit	128	130	141	145	172

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

#### **d. Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan.

Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan yang mendapat sanksi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Terkait pengolahan sampah mengantisipasi berkembangnya Kawasan Rebana maka akan direncanakan akan dilakukan rehabilitasi TPA Heuleut di Kecamatan Kadipaten yang pembiayaannya direncanakan dari Pemerintah sumber dana Pinjaman Luar Negeri. Kabupaten Majalengka telah mempersiapkan lahan yang sudah bersertifikat, Rencana Induk dan Kajian UKL/UPL. Capaian pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.55**  
**Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka**

No.	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase penanganan sampah (%)	32,89	33,46	35,15	34,3	34,3
2.	Persentase cakupan area pelayanan Persampahan (%)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
3.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	50	50	50	50	47,14
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (poin)	71,94	84,49	87,65	87,31	88,71
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,96	50,97	50,97	50,97	50,97
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,63	61,82	67,87	62,76	64,81
7.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Titik)	352	352	352	352	352
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL-UKL/SPPL	34,67	24,21	27,50	89,47	95,50
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	80,49	80,49	82,21	83,31	95,74

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dalam kependudukan dan pencacatan sipil seiring dengan waktu mengalami kemajuan baik dalam hal manajemen dan pelaksanaan secara teknis. Dalam urusan kependudukan dan cacatan sipil sudah sangat memasyarakat dengan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor tersebut sifatnya unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang. Kemudian dokumen kependudukan lainnya berupa Akte Lahir dan Kartu Keluarga yang kedudukannya sama pentingnya dengan KTP, jadi seluruh warga masyarakat sudah seharusnya mengindahkan dokumen-dokumen tersebut.

**Tabel 2.56**  
**Capaian Pembangunan**  
**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	70,6	100
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	90	98,70	98,00	99,1	99,86
3.	Ratio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	71,50	73,40	98,00	99,13	73,97
4.	Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	62,90	78,64	95,80	97,00	99,20
6.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)	3	74,74	100	100	100
7.	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukkan bahwa Posyandu aktif di Kabupaten Majalengka adalah 1.500 posyandu, angka tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga salah satu kebutuhan masyarakat mendapat pelayanan dari pemerintah dapat ditangani dengan baik. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kapasitas motor penggerak (para kader) pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat. Pola hubungan antara aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara hakiki.

Indikator mengenai pencapaian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Posyandu dan Kelompok PKK**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Posyandu Aktif (unit)	1.461	1.485	1.489	1.491	1.500
	Jumlah Seluruh Posyandu (unit)	1.461	1.485	1.489	1.491	1.500
	Persentase Posyandu aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah PKK Aktif (kelompok)	330	330	330	330	370
	Jumlah Seluruh PKK (kelompok)	330	330	330	330	370
	Persentase PKK aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	109	52	164	188	55

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.58**  
**Perkembangan Desa Mandiri**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Status Desa	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Desa Mandiri	2	2	23	63	96
2.	Desa Maju	30	58	126	180	202
3.	Desa Berkembang	246	254	181	87	32
4.	Desa Tertinggal	52	16	0	0	0
5.	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Majalengka sebesar 2,17 pada tahun 2022, angka itu sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak kelahiran bayi.

Rasio Akseptor KB, program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan mempromosikan

pendayagunaan kaum muda. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau tiga orang, berarti program KB sudah berhasil. Rasio akseptor KB pada Tahun 2022 sebesar 80,02%.

**Tabel 2.59**  
**Indikator Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,14	1,13	2,32	2,32	2,17
2.	Rasio akseptor KB (%)	78,37	79,94	79,77	79,99	80,02

Sumber: Dinas P3AKB Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **h. Perhubungan**

Saat ini Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja, Talaga dan Bantarujeg. Dengan berdirinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati akan memerlukan pembangunan terminal terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di sekitarnya ke Bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR.

Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di kabupaten majalengka akan dibahas pada di bawah ini sebagai capaian pembangunan urusan perhubungan.

**Tabel 2.60**  
**Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio izin trayek	poin	1:19	1:19	1:7	1:4	1:17
2.	Jumlah uji kir angkutan orang dan barang	unit	14.615	14.772	13.141	11.709	9.516
3.	Jumlah uji kir angkutan orang	unit	3.021	2.293	1.708	1.382	1.237
4.	Pemasangan Rambu-rambu	persen	38,34	40,57	41,48	45,40	45,59



No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	juta orang	10,01	8,49	4,75	2,16	1,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan durasi waktu atau lamanya proses pengujian kendaraan tersebut, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki dan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, maka lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian dimaksud adalah 15 menit, dimulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan pengujian dan penyampaian hasil uji kendaraan.

**Tabel 2.61**  
**Jumlah Kendaraan Yang diuji**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan yang diuji (Unit)
1.	2018	14.615
2.	2019	14.772
3.	2020	13.141
4.	2021	11.713
5.	2022	10.753

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Berdasarkan data tahun 2022 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 1:6,66. Sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami kenaikan sebanyak 2.161.147 jiwa dari 1.445.400 jiwa pada tahun 2021 menjadi 3.606.547 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun pada tahun 2022 tercatat sebanyak 757.375 jiwa.

**Tabel 2.62**  
**Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator Perhubungan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 6,63	1 : 6,63	1:6.65	1:7.00	1:6,66
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	10.496.181	9.167.040	2.619.360	1.445.400	3.606.547
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (Jiwa)	2.599.446	2.291.760	654.840	307.800	757.375

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **i. Komunikasi dan Informatika**

Pada Tahun 2022, seluas 100% wilayah di Kabupaten Majalengka telah tercakup layanan telekomunikasi, selain itu Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website telah mencapai 100%.

Indikator selengkapnya atas capaian urusan komunikasi dan informasi secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.63**  
**Indikator Capaian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website (%)	100	100	100	100	100
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	20	23	59	17	23
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	59.3	65.28	74.75	98.54	94.46

Sumber: Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.



**Tabel 2.64**  
**Jumlah Tower Telekomunikasi**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Nama Provider	Jumlah (Unit)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Telkomsel	63	62	62	17	1
2.	TBG	55	66	78	83	93
3.	Protelindo	42	48	57	59	59
4.	XL	17	17	5	2	2
5.	Indosat	12	12	8	8	8
6.	SIP	3	5	3	3	11
7.	Mitratel (Telkom Akuisisi ke Mitratel)	5	30	48	93	112
8.	Java Indoku	-	-	-	-	-
9.	Reka Cipta	-	-	-	-	-
10.	WMI, dll	41	-	-	-	5
11.	STP	12	10	13	13	10
12.	Indosiar	1	1	1	1	1
13.	Centratama	-	2	9	9	9
14.	IBS	8	8	12	13	5
15.	Metro TV	-	1	1	1	2
16.	Lasmana Swasti Prashida	-	1	1	5	1
17.	Hutchison 3 Indonesia	-	-	2	2	5
<b>Total</b>		<b>259</b>	<b>263</b>	<b>300</b>	<b>309</b>	<b>324</b>

Sumber: Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Majalengka telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Majalengka Nomor 048/Kep.162-Kominfo/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka PPID berperan dalam:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
2. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi;
3. Meningkatkan Sinergitas dengan Sumber Informasi.

Pada Tahun 2020 telah terbentuk PPID Pembantu di semua Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam kendali Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai Ketua PPID Kabupaten.

#### **j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Jumlah koperasi pada tahun 2022 sebanyak 565 unit dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.65**  
**Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif**  
**Di Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	KUD	26	26	26	26	26
2.	Non KUD	453	460	469	536	539
3.	Jumlah Koperasi	479	486	495	562	565
4.	Jumlah Koperasi Aktif	164	118	185	250	253

Sumber: Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 565 unit koperasi ternyata yang masih aktif hanya 253 unit sehingga diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah terbentuk.

Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 tercatat berjumlah 74.432 unit.

**Tabel 2.66**  
**Jumlah UMKM**  
**Di Kabupaten Majalengka**

No.	Kategori	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	29.518	31.370	28.729	29.075	74.432

Sumber: Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **k. Penanaman Modal**

Selama periode 2018-2022, nilai investasi di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp. 1,289 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp 15,597 triliun pada tahun 2022. Peningkatan pesat nilai investasi ini disebabkan karena banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan baik perusahaan skala kecil, menengah maupun perusahaan besar yang berinvestasi di Majalengka. Perkembangan jumlah nilai investasi serta jumlah dan kategori perusahaan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.67**  
**Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Kategori Perusahaan	Tahun (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Mikro & Kecil	142.767,00	54.131,00	82.988.100	221.794,02	1.353.416,387
2.	Perusahaan Menengah	89.838,573	12.867.778	58.632.185	645.987,50	437.937,037
3.	Perusahaan Besar	1.056.017,82	2.026.479,36	2.254.559,76	4.223.801,46	13.805.755,956
Jumlah		<b>1.288.623,38</b>	<b>2.093.478,14</b>	<b>2.396.180,04</b>	<b>5.091.582,98</b>	<b>15.597.109,38</b>

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

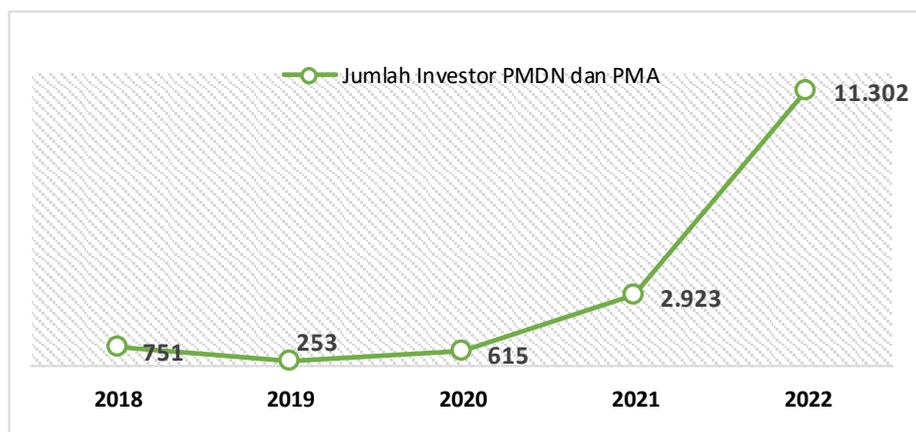
**Tabel 2.68**  
**Data Kategori Perusahaan**  
**Di Kabupaten Majalengka**

No.	Kategori Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Mikro dan Kecil	696	253	544	2.488	10.464
2.	Perusahaan Menengah	46	8	28	402	323
3.	Perusahaan Besar	9	18	42	33	515
Jumlah		<b>751</b>	<b>253</b>	<b>615</b>	<b>2.923</b>	<b>11.302</b>

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perkembangan jumlah investor PMDN dan PMA pada kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.17**  
**Perkembangan Jumlah Investor PMDN dan PMA**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

## 1. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga



perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.

Demikian halnya dengan olah raga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

**Tabel 2.69**  
**Jumlah Prasarana Olahraga**  
**di Kabupaten Majalengka**

No.	Jumlah Prasarana Olahraga	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lapangan Bola Voli	1.002	1.418	1.418	1.418	1.418
2.	Lapangan Bola Basket	92	92	92	92	92
3.	Lapangan Tenis	25	22	22	22	22
4.	Lapangan Futsal	65	65	65	65	65
5.	Stadion Sepak Bola	1	1	1	1	1
6.	Stadion Atletik	-	-	-	-	-
7.	Lapangan Bulu Tangkis	251	931	931	931	931
8.	Gedung Olahraga	34	26	26	26	26
9.	Kolam Renang	23	24	24	24	24
10.	Sasana Tinju/Beladiri	1	1	1	1	1
11.	Velodrome	-	-	-	-	-
12.	Arena Bowling	-	-	-	-	-
13.	Rumah Billiard	5	5	5	5	5
14.	Lapangan Olahraga Terbuka	305	305	305	305	305

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.70**  
**Perkembangan Indikator Olahraga dan Kepemudaan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	60	60	63	63
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	3	4	5
3.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	33	18	36
4.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	87	128	70	139



No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2019	2020	2021	2022
5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	97	125	97	70
6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	42	2	9	26
7.	Jumlah prestasi olahraga	Kali	42	2	9	84

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### m. Statistik

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik adalah ketersediaan buku “Kabupaten Dalam Angka” dan “PDRB Kabupaten” yang selama ini telah berhasil terpenuhi.

**Tabel 2.71**  
**Ketersediaan Dokumen Statistik**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku “PDRB Kabupaten”	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada (Belum Terintegrasi)				

Sumber: Diskominfo & BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### n. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selama 2018-2022, setiap tahunnya dilaksanakan Festival Seni dan Budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya sebagaimana pada di bawah ini.

**Tabel 2.72**  
**Kegiatan Bidang Kebudayaan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	3	2	15	12
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	125	125	125	125	240
3.	Jumlah Total Benda, Situs & Kawasan yang dimiliki daerah	3	3	3	105	105
4.	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	-	-	-	3	3
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Majalengka dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya adalah belum ditunjang dengan adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif.

#### **o. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

**Tabel 2.73**  
**Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perpustakaan (Unit)	1.497	1.497	1.171	1.753	1753
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	9.705	10.571	2.540	2.887	24.254
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Buku)	40.331	40.331	39.861	41.831	33.843
4.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat (Orang)	1	3	5	6	5
5.	Jumlah seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai (Orang)	4	4	5	6	5

Sumber: Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### p. Kearsipan

Kinerja pengelolaan arsip daerah dapat diukur dari capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.74**  
**Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka**

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pembinaan Tata Kearsipan ke OPD dan Kecamatan (%)	20,75	32,14	16,55	56,00	63,00
2.	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Kegiatan)	3	3	3	2	2
3.	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku (%)	20,75	32,14	24,07	25,06	26,79

Sumber: Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

##### a. Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Majalengka mengalami kemajuan seiring telah dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, dan untuk menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan rencananya akan terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012. Untuk itu dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariasi.

Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2018-2022, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu dengan meningkatnya kunjungan wisata. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Majalengka bertambah sangat signifikan dibandingkan lima tahun terakhir. Akan tetapi jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan Pandemi Covid 19, yang berimbas pada berkurangnya PAD sektor wisata di tahun yang sama, namun pada tahun 2022 mulai naik lagi dibandingkan tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.75**  
**Indikator Capaian Kepariwisata**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kunjungan wisata	529.574	701.335	375.000	472.906	818.543
2.	PAD Sektor Wisata (Juta Rupiah)	150,00	152,72	64,2	59,8	65,3
3.	Jumlah Hotel	15	17	18	24	27
4.	Jumlah Kamar	401	505	512	641	649
5.	Jumlah Rumah Makan/Restoran	151	135	-	156	156

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

## b. Pertanian

Luas Kabupaten Majalengka adalah 120.424 Ha, terdiri atas lahan sawah pada tahun 2022 sebesar 49.465 Ha dan lahan bukan sawah 70.959 Ha. Untuk luas bukan sawah didominasi oleh lahan tegal/kebun sebesar 23.958 Ha.

### 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas unggulan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Majalengka terdiri atas:

#### a) Padi

Luas tanam Padi pada tahun 2021 sebesar 103.102 hektar **naik** menjadi 118.480 hektar pada tahun 2022, luas panen padi pada tahun 2021 sebesar 104.849 hektar **naik** menjadi 116.040 hektar pada tahun 2022. Naiknya Luas panen padi berimbang kepada hasil produksi dimana pada tahun 2021 sebesar 681.664 ton **naik** menjadi 773.775 ton pada tahun 2022. Sentra padi tersebar di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih

#### b) Jagung

Luas tanam jagung pada tahun 2021 sebesar 15.907 hektar **naik** menjadi 15.967 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 sebesar 15.548,34 hektar **naik** menjadi 17.819 hektar pada tahun 2022. Naiknya luas panen jagung berimbang kepada hasil produksi dimana pada tahun 2021 sebesar 118.795 ton **naik** menjadi 138.074 ton pada tahun



2022. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, dan Malausma.

c) **Kedelai**

Luas tanam kedelai pada tahun 2021 sebesar 598 hektar **naik** menjadi 1.771 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 sebesar 417,23 hektar **naik** signifikan menjadi 2.552 hektar pada tahun 2022. Naiknya luas panen kedelai berimbang kepada hasil produksi dimana pada tahun 2021 sebesar 668 ton **naik** menjadi 4.440 ton pada tahun 2022. Sentra kedelai tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas pangan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.76**  
**Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	120.528	97.977	123.724	103.102	118.480
2.	Jagung	15.967	18.120	19.477	15.907	15.967
3.	Kedelai	1.771	3.036	1.492	598	1.771

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.77**  
**Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	117.858	111.724	110.199	104.849	116.040
2.	Jagung	17.819	18.911	19.533,52	15.548,34	17.819
3.	Kedelai	2.552	1.284	2.922,68	417,23	2.552

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.



**Tabel 2.78**  
**Produksi Komoditas Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	781.285	722.411	724.834	681.664	773.775
2.	Jagung	138.074	146.130	150.647	118.795	138.074
3.	Kedelai	4.440	2.152	4.977	668	4.440

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura,** Komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran terdiri atas:

a) **Bawang Merah**

Luas tanam pada tahun 2021 seluas 3.067 hektar **turun** menjadi 2.614 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 seluas 2.873 Hektar **turun** menjadi 2.658 hektar pada tahun 2022, produksi pada tahun 2021 sebesar 34.068,38 ton **naik** menjadi sebesar 34.504 ton pada tahun 2022. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh dan Majalengka.

b) **Cabai Besar**

Luas tanam pada tahun 2021 seluas 665,6 hektar **turun** menjadi 185 hektar pada tahun 2022, luas panen seluas 513 hektar pada tahun 2021 **turun** menjadi 234 hektar pada tahun 2022, sedangkan produksi pada tahun 2021 sebesar 9.848,22 ton **turun** menjadi sebesar 3.036 ton pada tahun 2022. Sentra cabai tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan Banjaran.

c) **Kentang**

Pada tahun 2021 luas tanam 317 hektar **turun** menjadi 266 hektar pada tahun 2022, dengan luas panen tahun 2021 sebesar 329 hektar **turun** menjadi 227 hektar pada tahun 2022, dengan produksi pada tahun 2021 sebesar 5.645,4 ton **turun** menjadi 4.079 ton pada tahun 2022. Sentra kentang di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman hortikultura tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.79**  
**Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	2.747	2.953	2.540	3.067	2.614
2.	Cabai Besar	739	579	587	665,6	185
3.	Kentang	258	261	380	317	266

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.80**  
**Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	2.676	2.943	2.742	2.873	2.658
2.	Cabai Besar	724	780	669	513	234
3.	Kentang	230	237	393	329	227

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.81**  
**Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	31.981	37.973	35.166,80	34.068,30	34.504
2.	Cabai Besar	13.053	12.467	7.282,60	9.848,22	3.036
3.	Kentang	3.601	4.193	7.255,90	5.645,40	4.079

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

## 2. Komoditas Unggulan Buah-buahan

Komoditas unggulan buah-buahan terdiri atas :

### a) **Mangga**

Luas tanam Mangga pada tahun 2021 seluas 11.098,20 hektar, **naik** pada tahun 2022 menjadi 11.131,6 hektar, luas panen pada tahun 2021 seluas 4.911,22 hektar, **turun** menjadi 4.166,97 hektar pada tahun 2022 dan produksi pada tahun 2021 sebesar 65.283,43 ton **turun** menjadi 44.754,69 ton pada tahun 2022. Sentra mangga berada di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati.



b) **Durian**

Luas tanam Durian pada tahun 2021 seluas 2.369,56 hektar **turun** pada tahun 2022 menjadi 2.203,84 hektar, luas panen pada tahun 2021 seluas 640,66 hektar **naik** menjadi 952,83 hektar pada tahun 2022, dan produksi pada tahun 2021 sebesar 5.940,7 ton **naik** menjadi 11.263,46 ton pada tahun 2022. Sentra durian di Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang.

c) **Jambu Biji**

Pada tahun 2021 luas tanam 651,05 hektar **naik** menjadi 655,53 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 seluas 251,00 hektar **turun** menjadi 245,37 hektar pada tahun 2022, dan produksi pada tahun 2021 sebesar 3.180,3 ton **naik** menjadi 3.618,46 ton pada tahun 2022.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman buah-buahan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.82**  
**Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-buahan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mangga	11.131,60	11.081,20	11.092,09	11.098,2	11.131,6
2.	Durian	2.203,84	2.267,55	2.294,74	2.369,56	2.203,84
3.	Jambu Biji	655,53	651,65	651,47	651,05	655,53

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.83**  
**Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mangga	4.166,97	307,31	4.673,11	4.911,22	4.166,97
2.	Durian	952,83	623,97	551,43	640,66	952,83
3.	Jambu Biji	245,37	287,18	240,73	251,00	245,37

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.84**  
**Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mangga	44.754,69	54.887,24	52.210,60	65.283,43	44.754,69
2.	Durian	11.263,47	7.369,29	8.889,90	5.940,70	11.263,46
3.	Jambu Biji	3.618,46	2.943,63	2.803,60	3.180,30	3.618,46

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Cakupan Bina Kelompok Petani**, Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu daya saing produk agribisnis. Dari kedua komponen tersebut sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian besar didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada informatika seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.85**  
**Cakupan Bina Kelompok Petani**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Petani (kelompok)
1.	2018	2.297
2.	2019	2.286
3.	2020	2.200
4.	2021	2.852
5.	2022	2.363

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### c. Perdagangan

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri. Fasilitas perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda



sebanyak 5 unit yang kondisi fisiknya semakin membaik, dan pasar desa tercatat 39 unit pada tahun 2022.

**Tabel 2.86**  
**Jumlah dan Jenis Pasar di Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pasar Pemda	4	4	4	5	5
2.	Pasar Sindangkasih Cigasong					
	- Kios	430	430	430	430	580
	- Ruko / Toko	35	35	35	35	37
	- Los / Auning	31/130	31/130	31/130	31/130	31/130
	- Emprakan	140	140	140	140	106
3.	Pasar Prapatan					
	- Kios	158	158	158	158	468
	- Ruko / Toko	-	-	-	-	243
	- Los / Auning	310	310	310	310	786
	- Emprakan	292	292	292	292	285
4.	Pasar Talaga					
	- Kios	210	210	210	210	234
	- Ruko / Toko	28	28	28	28	28
	- Los / Auning	200	200	200	200	342
	- Emprakan	174	175	175	175	166
5.	Pasar Kadipaten					
	- Kios	171	171	171	171	206
	- Ruko / Toko	50	50	50	50	53
	- Los / Auning	701	701	701	701	1.080
	- Emprakan	164	164	164	164	89
6.	Jumlah Pasar Desa	39	39	39	38	39
7.	Jumlah Pasar Modern	N/A	110	110	165	188

Sumber: Dinas Perdagin Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### d. Perindustrian

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan dan mencapai 25,15% dari seluruh sektor PDRB pada tahun 2022. Ini menandakan berbagai jenis industri di Majalengka mulai tumbuh dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya jenis-jenis industri yang ada di Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2.87**  
**Jenis Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2018-2022**

NO.	JENIS INDUSTRI	JUMLAH IKM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Makanan	672	724	769	804	882
2	Industri Minuman	3	5	5	7	8
3	Industri Pengolahan Tembakau	17	16	16	16	15
4	Industri Tekstil	43	40	40	59	62
5	Industri Pakaian Jadi	185	193	193	204	208
6	Industri Kulit, Barang Kulit dan Alas Kaki	8	8	8	7	7
7	Industri Kayu, Barang Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture)	135	135	135	151	151
8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2	2	2	2	2
9	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	-	-	-	2
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Penggilingan Minyak Bumi	-	-	-	-	0
11	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	6	6	6	5	5
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	1	1	1	1
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2	4	4	6	6
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	523	521	521	514	527
15	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	0
16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	59	60	60	67	67
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	-	-	0
18	Industri Peralatan Listrik	-	-	-	-	0
19	Industri Pesin dan Perlengkapan ytdl	71	-	-	1	1
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan semi Trailer	20	-	-	-	1
21	Industri alat Angkutan Lainnya	672	-	-	-	0
22	Industri Furniture	3	71	71	85	87
23	Industri Pengolahan Lainnya	17	17	17	23	30
24	Industri dan pemasangan Mesin dan Peralatan	43	-	-	-	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.747</b>	<b>1.803</b>	<b>1.848</b>	<b>1.952</b>	<b>2.062</b>

Sumber: Dinas Perdagin Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### e. Perikanan

Komoditas unggulan perikanan tahun 2022, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2021 sebesar 1.303,34 ton **turun** menjadi 1.261,60 ton pada tahun 2022. Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan Rajagaluh. Produksi ikan nila pada tahun 2021 sebesar 4.094,04 ton **naik** menjadi 4.052,00 ton pada tahun 2022 dengan sentra produksi ikan nila berada di Kecamatan



Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding. Produksi ikan gurame pada tahun 2021 sebesar 918,85 ton **naik** menjadi 925,80 ton pada tahun 2022, dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah. Produksi ikan lele pada tahun 2021 sebesar 1.529,30 ton **naik** menjadi 1.718,80 ton pada tahun 2022, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.

**Tabel 2.88**  
**Produksi Ikan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ikan Mas	1.242,79	1.314,83	1.338,39	1.303,34	1.261,60
2.	Ikan Nila	3.868,15	3.898,98	3.939,94	4.049,04	4.052,00
3.	Ikan Nilem	203,20	217,91	238,47	234,92	265,58
4.	Ikan Tambak	81,49	91,49	106,94	108,09	115,30
5.	Ikan Mujaer	17,58	17,58	17,58	24,61	-
6.	Ikan Lele	1.427,38	1.458,38	1.486,00	1.529,30	1.718,80
7.	Ikan Sepat Siem	114,32	94,32	108,55	109,61	113,20
8.	Ikan Bawal	31,49	33,49	47,53	49,06	51,20
9.	Ikan Tawes	129,25	125,25	143,59	146,65	157,10
10.	Udang Galah	45,28	47,13	-	-	-
11.	Belut	21,67	31,67	56,39	57,75	-
12.	Patin	n/a	n/a	n/a	n/a	58,80
13.	Ikan Gurame	853,44	873,44	893,65	918,85	925,80
14.	Ikan Gabus	34,76	34,76	38,48	46,31	47,50
15.	Ikan Beunteur	57,61	57,61	58,70	74,54	97,90
16.	Ikan Lalawak	48,65	48,65	49,04	54,93	61,50
17.	Ikan Paray	47,11	47,35	48,56	58,76	80,20
18.	Ikan Seren	22,92	22,92	23,54	29,22	-
19.	Ikan Tagih	59,59	59,59	60,79	48,90	63,50
20.	Ikan Deleg	25,52	25,52	26,09	31,31	-
21.	Ikan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.



**Tabel 2.89**  
**Indikator Capaian Urusan Perikanan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	25,10	25,46	25,46	26,2	21,69
2.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah daerah	45	-	83	0	0
3.	Jumlah seluruh kelompok nelayan	822	822	826	660	660
4.	Produksi perikanan (ton)	8.332,27	8.500,94	8.682,23	8.875,19	9.069

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Ikan merupakan sumber protein hewani dan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi diantaranya mengandung mineral, vitamin dan lemak tak jenuh. Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun di Majalengka mengalami tren kenaikan walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami sedikit penurunan.

#### **f. Peternakan**

Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Pada tahun 2022 populasi ayam ras pedaging sebanyak 18.747.742 ekor dengan produksi daging sebesar 24.578,40 ton **meningkat** dari tahun 2021 sebesar 23.985,73 ton, populasi domba pada tahun 2022 sebanyak 1.713.410 ekor dengan produksi daging mencapai 2.584,83 ton **meningkat** dari tahun 2021 yang mencapai 1.865,68 ton dan populasi sapi potong pada tahun 2022 sebanyak 9.212 ekor dengan produksi daging mencapai 2.393,55 ton **meningkat** dari tahun 2021 yang mencapai 2.373,23 ton. Sentra produksi ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Banjaran, Sindangwangi. Sentra produksi domba tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Dawuan, Kertajati. Sentra produksi sapi potong tersebar di Kecamatan Kertajati, Lemahsugih, Majalengka.

**Tabel 2.90**  
**Populasi Peternakan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Jenis	Tahun (Ekor)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ayam Ras Pedaging	17.398.920	17.406.000	17.842.680	18.295.752	18.747.742
2.	Domba	1.138.261	1.291.098	1.425.428	1.609.282	1.713.410
3.	Sapi Potong	14.519	14.834	15.073	15.477	9.212

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.91**  
**Produksi Peternakan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Jenis	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ayam Ras Pedaging	24.358,49	22.819,27	23.391,75	23.985,73	24.578,40
2.	Domba	1.535,08	1.584,29	1.745,09	1.865,68	2.584,83
3.	Sapi Potong	2.161,40	2.227,69	2.272,63	2.373,23	2.393,55

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **g. Perkebunan**

Komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah Teh, Tembakau, Kopi, Cengkeh, dan tebu, sebagai berikut :

##### **a) Teh**

Luas tanam komoditas teh pada tahun 2021 adalah sebesar 1.800 hektar, **menurun** menjadi 661,2 hektar pada tahun 2022. Sedangkan produksi teh pada tahun 2022 sebesar 585,94 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Rajagaluh.

##### **b) Tembakau**

Luas tanam komoditas tembakau pada tahun 2021 sebesar 1.954,02 hektar **menurun** menjadi 1.231,47 hektar pada tahun 2022 dengan produksi sebesar 7.914,15 ton, dengan sentra di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih dan Majalengka.

##### **c) Kopi**

Luas tanam komoditas kopi pada tahun 2021 sebesar 186,39 hektar **meningkat** menjadi 1.115,64 hektar pada tahun 2022 dengan produksi sebesar 1.207,12 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura.

d) **Cengkeh**

Luas tanam komoditas cengkeh pada tahun 2021 sebesar 1.982,10 hektar **meningkat** menjadi 2.086,97 hektar pada tahun 2022, dengan produksi olahan pada tahun 2022 berupa bunga basah sebesar 2.513,86 ton dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja.

e) **Tebu**

Luas tanam komoditas tebu pada tahun 2022 sebesar 3.285,81 hektar, dengan produksi berupa tebu sebesar 173.190 ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung, Leuwimunding dan Jatitujuh.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.92**  
**Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teh	672,31	672,31	661,2	1.800	661,2
2.	Tembakau	847,15	847,20	1.461,3	1.954,02	1.231,47
3.	Kopi	1.031,94	1.071,79	1.080,6	186,39	1.115,64
4.	Cengkeh	2.086,97	2.086,97	2.087,0	1.982,10	2.086,97
5.	Tebu	391,80	391,80	3.012,9	549,19	3.285,81

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.93**  
**Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teh	1.306,3	420	458,2	479,82	585,94
2.	Tembakau					
	- Daun	4.195,95	4.512,19	8.535,9	8.576,9	7.914,15
	- Rajangan	839,19	902,40	813,7	858,13	-
3.	Kopi	932,98	1.151,63	1.317,9	249,62	1.207,12
4.	Cengkeh					
	- Bunga basah	2.349,30	2.996,94	3.048,2	565,72	2.513,86
	- Minyak cengkeh	-	-	-	-	-
5.	Tebu	2.088,46	2.892,30	25.115,8	537,71	173.190,00

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.



#### **2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan**

##### **a. Perencanaan Pembangunan**

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2008.

Sedangkan untuk dokumen perencanaan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2022.

Selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022.

##### **b. Keuangan**

Selain adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang berubah, urusan penunjang keuangan pun mengalami perubahan, diantaranya terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebabkan



penyesuaian dalam penyusunan APBD. Capaian pembangunan urusan penunjang keuangan dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.94**  
**Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Keuangan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	5,32	3,16	3,59	2,40	2,49
3.	Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (%)	32,64	26,37	29,07	31,95	30,47
4.	Persentase belanja kesehatan terhadap APBD (%)	15,15	13,72	18,15	20,83	29,92
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	45,15	44,66	45,97	41,88	40,00
6.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	54,85	55,34	54,03	58,12	60,00
7.	Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa terhadap APBD (%)	0,52	0,52	0,37	0,45	0,53

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diantaranya dilihat dari jumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 34,44% sedangkan untuk jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 6.571 orang.



**Tabel 2.95**  
**Indikator Pembangunan Urusan penunjang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	69,00	69,00	70,77	52,05	34,44
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,14	1,27	0,79	1,57	7,04
3.	Jumlah Total ASN (orang)	11.621	10.844	10.172	9.616	11.773
4.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	29	33	32	33	34
5.	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	187	193	183	195	191
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (orang)	7.512	7.561	7.273	6.903	6.571

Sumber: BKPSDM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### d. Pengawasan

Capaian pembangunan urusan penunjang Pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat diantaranya dilihat dari persentase temuan yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Majalengka, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebesar 55,56 persen.

**Tabel 2.96**  
**Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase tindak lanjut temuan (%)	78	60	60,33	83,05	55,56
2.	Jumlah temuan BPK	19	22	16	22	10
3.	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP (level)	1,87	1,87	2	2	2
4.	Laporan Hasil Penilaian Kapasitas APIP (level)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5.	Pemantauan Pelaporan Pemberantasan Korupsi (%)	54	67	71,26	82,36	92,35

Sumber: Inspektorat Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### e. Sekretariat DPRD

Capaian pembangunan urusan penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.97**  
**Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat DPRD yang terlaksana Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100
2.	Fasilitasi kunjungan kerja yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Perda yang disahkan	Perda	6	14	7	13	8
4.	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan	16	19	10	17	9

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

#### f. Sekretariat Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2022 Kabupaten Majalengka meraih Predikat SAKIP B dengan nilai 67,1. Dengan hasil ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan predikat SAKIP sebagai salah satu indikator pemerintahan yang transparan, baik dan efisien serta akuntabel.

Indikator capaian pembangunan urusan penunjang pada Sekretariat Daerah dapat dilihat juga pada jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha yang terbagi dalam kategori yaitu peraturan daerah terkait perizinan, peraturan daerah terkait lalu lintas barang dan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Untuk mempercepat proses perizinan dalam rangka mendukung iklim usaha yang baik, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah mengeluarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018



Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Tabel 2.98**  
**Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	51,79	53,88	56,84	58,46
		Predikat	N/A	CC	CC	CC	CC
2.	Nilai SAKIP	Poin	60,83	67,00	67,18	67,08	67,1
		Predikat	B	B	B	B	B
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	B	B
4.	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	NIHIL	NIHIL	Tinggi	Tinggi



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
5.	Pemenuhan SPM sesuai Ketentuan	Persen	N/A	26,17	43,67	62,23	87,00
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	N/A	N/A	19,00	54,52	64,30
7	Level Maturitas UKPBJ	level	N/A	N/A	3/9	6/9	8/9

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

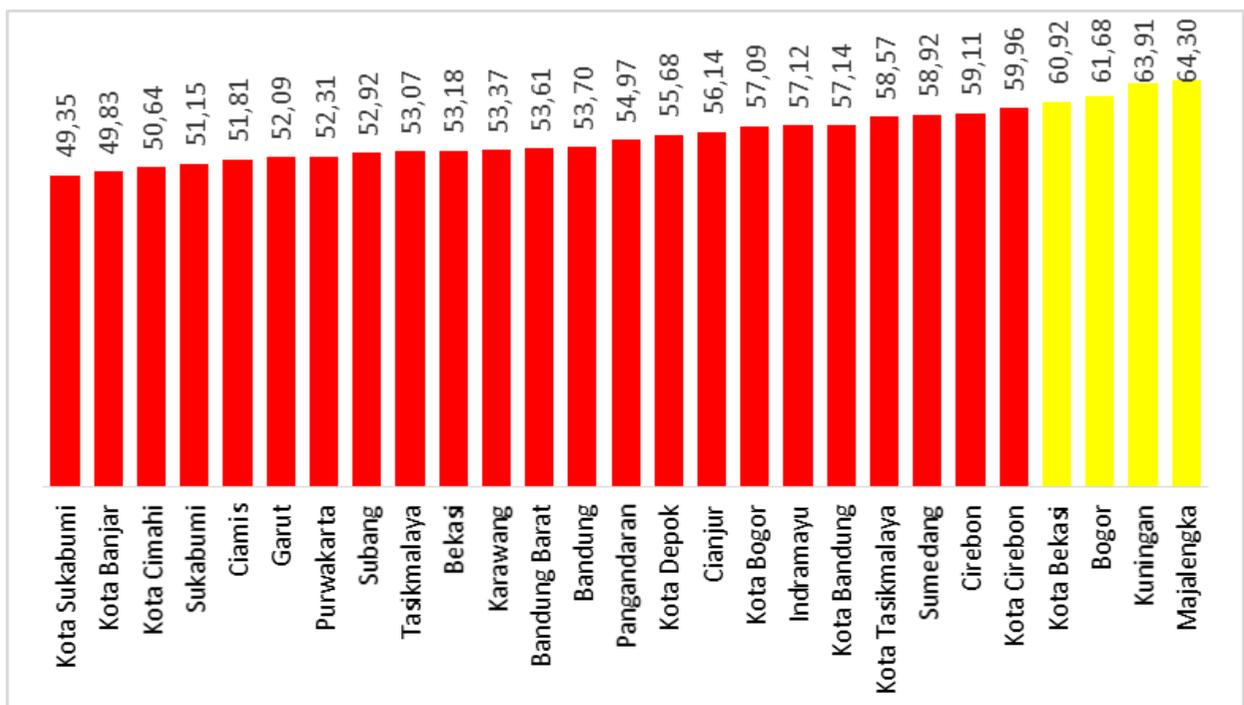
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Suatu daerah untuk bisa ikut dalam pembangunan secara global harus mampu berdaya saing yang berbasis inovasi sebagai upaya pembangunan yang efektif dan efisien serta produktivitas yang tinggi yang menjadi kunci persaingan daerah sebagai wujud kesejahteraan. Dengan pengukuran daya saing (*competitiveness*) sebagai salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, maka suatu daerah yang memiliki daya saing tinggi akan berdampak pada masyarakat yang berkesejahteraan tinggi pula. Di kancah persaingan global yang semakin ketat, dan belum meratanya pembangunan daerah maka pemerintah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pembangunan dituntut untuk selalu berinovasi dalam pembangunan khususnya Kabupaten Majalengka harus dapat bersaing dengan daerah-daerah lain disekitarnya (CIAYUMAJAKUNING) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Daya saing wilayah di CIAYUMAJAKUNING dengan memperhatikan perekonomian daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Melalui penghitungan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan 12 indikator meliputi Pendapatan Daerah APBD, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Pengeluaran Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka,

Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama sekolah, Harapan Lama Sekolah, Cakupan air bersih layak, cakupan sanitasi layak, Kondisi jalan mantap di Provinsi Jawa Barat terdistribusi kurang merata bahkan lebih cenderung dengan nilai rendah, bahkan di Jawa Barat tidak memiliki daerah dengan Indeks kategori tinggi, sementara kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat berada pada kategori rendah dan sedang. Dan untuk wilayah Ciayumajakuning sendiri rata-rata masuk dalam kategori sedang hanya Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalegka sedangkan 2 kabupaten dan Kota Cirebon masuk kedalam kotegori IPD rendah. Walaupun Kabupaten Majalengka sendiri untuk Indeks Pembangunan Daerah masuk kedalam kategori sedang, namun memiliki rata-rata tertinggi di Kawasan Ciayumajakuning bahkan di Jawa Barat mengalahkan kabupaten/kota lainnya yang memiliki sumber daya lebih dibandingkan Kabupaten Majalengka

**Gambar 2.18**  
**Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2021**



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, 2022.

Upaya peningkatan pembangunan Kabupaten Majalengka masih perlu dilakukan peningkatan melalui berbagai aspek pembangunan seperti upaya peningkatan pendapatan daerah APBD, penurunan rasio gini, peningkatan Pengeluaran per Kapita,



pengendalian jumlah penduduk, peningkatan RLS dan HLS, peningkatan Cakupan Sanitasi Layak, Cakupan Air Bersih Layak.

Sektor basis/spesialisasi mengacu kepada sektor ekonomi disuatu wilayah, dimana suatu wilayah dikatakan memiliki spesialisasi jika wilayah tersebut mengembangkan suatu sektor ekonomi sehingga pertumbuhan maupun andil sektor tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah lainnya, spesialisasi juga tercipta akibat potensi sumber daya alam yang besar maupun peranan permintaan pasar yang besar terhadap output-output lokal.

Sektor basis kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan.
2. Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri.

Hasil Perhitungan Sektor Basis Kabupaten/Kota di Wilayah Ciayumajakuning 2018 – 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.99**  
**Perhitungan Sektor Basis**  
**Kabupaten/Kota di Wilayah Ciayumajakuning 2018 – 2021**

Lapangan Usaha/Industry		Kabupaten				Kota Cirebon
		Indramayu	Cirebon	Kuningan	Majalengka	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,09	1,90	2,95	2,67	0,04
B	Pertambangan dan Penggalian	7,04	0,77	0,82	1,07	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,04	0,48	0,06	0,50	0,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,46	0,25	0,24	1,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,08	1,09	1,11	0,74	3,25
F	Konstruksi	0,66	1,42	1,06	1,55	1,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,70	1,00	1,06	1,08	2,08
H	Transportasi dan Pergudangan	0,56	1,65	2,90	0,78	2,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63	1,29	0,69	1,17	1,85
J	Informasi dan Komunikasi	0,22	0,75	1,22	0,95	1,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	1,53	2,04	1,12	4,27
L	Real Estate	0,42	1,92	2,49	1,02	0,78
M,N	Jasa Perusahaan	0,61	2,17	1,09	0,79	1,99



Lapangan Usaha/Industry		Kabupaten				Kota Cirebon
		Indramayu	Cirebon	Kuningan	Majalengka	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,06	1,41	1,75	1,58	1,73
P	Jasa Pendidikan	0,75	2,02	3,67	1,91	1,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	2,86	2,16	1,32	3,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,21	1,86	1,73	1,29	1,12

Sumber: Data Sektoral Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Kabupaten Majalengka merupakan wilayah yang mempunyai sektor basis sejumlah 11 sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.

Beberapa kelemahan dan potensi yang merupakan indikator-indikator daya saing Kabupaten Majalengka yang perlu didahulukan untuk diperbaiki karena merupakan indikator-indikator yang secara inheren dapat diperbaiki melalui kebijakan pembangunan.

1. Kebijakan Infrastruktur Aspek kualitas hidup dan perkembangan infrastruktur Kabupaten Majalengka memiliki kondisi Jalan yang cukup Baik untuk di wilayah Ciayumajakuning dan Selain infrastruktur secara umum, secara khusus dengan tingkat IPM Kabupaten Majalengka masih rendah maka bisa jadi kualitas infrastruktur pada bidang pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk masa kedepannya.
2. Kebijakan Pendidikan Berdasarkan hasil pengolahan data secara sederhana, indikator pendidikan terutama tingkat partisipasi sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar di Kabupaten Majalengka masih rendah dan dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Perlu upaya serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
3. Kebijakan Kesehatan Berdasarkan pengolahan data, angka harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Angka harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup

sampai umur tertentu. Dengan rendahnya AHH di Kabupaten Majalengka maka perlu bebere kebijakan dengan suatu upaya dari seluruh pemangku kebijakan yang diantaranya :

- Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir 50 melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll);
  - Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Immunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular.
  - Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
  - Memperbaiki status gisi keluarga;
  - Survey Indek Keluarga Sehat;
  - Perbaikan Kesehatan
4. Kebijakan Ketenagakerjaan Dengan mencatat jumlah pekerja di Kabupaten Majalengka relatif rendah namun hal ini tetap harus diwaspadai dengan masuknya tenaga kerja dari luar sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang baik. Peningkatan kuantitas tenaga kerja erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor sekunder dan tersier, sehingga meningkatkan partisipasi pekerja dari dalam dan luar kabupaten Majalengka, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja bergantung pada kualitas pelatihan dan pendidikan vokasi yang diselenggarakan di Kabupaten Majalengka.

**Tabel 2.100**  
**Tingkat Kesempatan Kerja**  
**di Kabupaten Majalengka**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
TKK	95,05	95,63	94,16	94,29	95,84

Sumber: Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **2.1.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perkonomian akan



berjalan dengan baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.

#### **a. Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (39,5 km), Jalan Provinsi (125,83 km), dan Jalan Kabupaten (918,726 km) dengan kondisi jalan kabupaten dibagi menjadi empat kategori yaitu jalan kondisi baik (654 km), kondisi sedang (158 km), kondisi rusak ringan (88 km) dan jalan dengan kondisi rusak berat (19 km).

#### **b. Perhubungan**

Saat ini di Kabupaten Majalengka telah dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara untuk mengakses wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya menuju wilayah seluruh nasional dan internasional. Dalam menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan pada tahun 2022 ini sudah terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

Beberapa capaian indikator pembangunan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.62.

#### **c. Irigasi**

Irigasi merupakan infrastruktur lain yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, karena akan menunjang ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mencapai 77,32%.

**d. Penataan Ruang Daerah**

Indikator penataan ruang di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.101**  
**Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator Penataan Ruang	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	83,67	83,67	90,00	90,00	54,02
2.	Luas wilayah produktif	%	60	60,5	60	23,30	67,72
3.	Luas wilayah industri	%	1,4	1,45	1,37	0,72	1,09
4.	Penyediaan kawasan industri	Ha	70	108	-	-	394,68
5.	Luas wilayah banjir	Ha	300	300	600	-	72,809
6.	Luas wilayah kekeringan	Ha	-	-	-	-	120,424
7.	Luas wilayah perkotaan	%	41	42	41	6,33	31,64

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**e. Fasilitas Keuangan**

Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu Bank BJB, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BTPN, Bank OCBC NISP dan BPR. Perkembangan jumlah lembaga perbankan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.102**  
**Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka**

No.	Nama Bank	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	BJB	Unit	11	11	11	11	11
2.	BRI	Unit	36	37	39	40	40
3.	BNI	Unit	3	3	3	3	3
4.	MANDIRI	Unit	6	6	6	6	6
5.	PANIN	Unit	4	4	4	4	4
6.	DANAMON	Unit	5	5	5	5	5
7.	BCA	Unit	1	1	1	1	1
8.	OCBC NISP	Unit	2	2	2	2	2
9.	BTPN	Unit	5	5	5	5	5
10.	SAUDARA	Unit	1	1	1	1	1
11.	BPR	Unit	17	17	18	18	18
12.	BTN	Unit	8	8	8	8	8



No.	Nama Bank	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
13.	BRI Syariah	Unit	1	1	1	1	-
14.	BTPN Syariah	Unit	1	1	1	1	-
15.	Bank Syariah Indonesia	Unit	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		Unit	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>105</b>

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

#### f. Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Majalengka pada Tahun 2022 tercatat 160 restoran yang tersebar di berbagai kecamatan dengan lokasi terbanyak berada di Kecamatan Majalengka sebanyak 65 restoran dan kadipaten sebanyak 19 restoran.

#### g. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Majalengka pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 27 buah hotel/penginapan dengan total kamar sebanyak 694 kamar.

#### h. Air bersih

Penggunaan air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga

pengguna air bersih pada tahun 2022 sebesar 376.106 rumah tangga. Data selengkapnya mengenai jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.103**  
**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
1.	2018	339.851
2.	2019	367.774
3.	2020	368.626
4.	2021	374.699
5.	2022	376.106

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### 2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas, kemudahan perijinan, perkembangan pembangunan.

##### a. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demo

Indikator Jumlah Kriminalitas ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

**Tabel 2.104**  
**Jumlah Kriminalitas Yang Tertangani**

NO.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Jumlah Kasus</b>					
	- Kasus Narkoba	33	41	38	2	2
	- Kasus Pembunuhan	1	1	0	0	1
	- Kasus Seksual	16	15	16	25	5
	- Kasus Penganiayaan	10	12	10	21	4
	- Kasus Pencurian	111	119	81	39	66
	- Kasus Penipuan	50	44	34	13	7
	- Kasus Pemalsuan Uang	2	0	1	0	0



NO.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
<b>2.</b>	<b>Jumlah Kasus Tertangani</b>					
	- Kasus Narkoba	33	41	38	2	2
	- Kasus Pembunuhan	1	1	0	0	1
	- Kasus Seksual	16	15	16	25	5
	- Kasus Penganiayaan	10	12	10	21	4
	- Kasus Pencurian	111	119	81	39	66
	- Kasus Penipuan	50	44	34	13	7
	- Kasus Pemalsuan Uang	2	0	1	0	0

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

**Tabel 2.105**  
**Jumlah Demonstrasi**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Tahun	Jumlah Demonstrasi
1.	2018	5
2.	2019	8
3.	2020	11
4.	2021	9
5.	2022	9

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### **b. Lama Proses Perizinan**

Dalam rangka meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, murah dan terjangkau. Rata-rata proses perijinan di Kabupaten Majalengka hanya membutuhkan waktu 1- 3 hari.

#### **c. Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah**

Jumlah pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022, yaitu pajak sebanyak 9 jenis dan retribusi sebanyak 20 jenis.



**Tabel 2.106**  
**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2018-2022**

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil Pajak Daerah	144.491.759.894,00	123.654.331.397,00	119.119.943.663,00	143.392.442.998,00	156.740.101.171,00
2.	Hasil Retribusi Daerah	18.506.497.178,00	18.875.051.518,00	17.631.278.296,00	15.513.665.009,00	19.931.473.893,00
	a. Retribusi Jasa Umum	9.536.768.300,00	9.830.312.500,00	8.668.903.504,00	8.236.383.802,00	8.317.693.000,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	5.258.338.528,00	4.433.297.458,00	3.881.511.163,00	3.554.396.058,00	4.803.448.558,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	3.711.390.350,00	4.611.441.560,00	5.080.863.629,00	3.722.885.149,00	6.810.332.335,00
	d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	1.770.465.558,00
	e. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	28.175.000,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.229.014.024,00	7.825.254.542,00	6.551.818.643,00	5.944.980.467,00	7.409.795.269,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	279.746.858.792,60	289.488.627.137,55	347.530.431.591,06	301.937.407.131,11	338.375.049.253,61
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	449.974.129.888,60	439.843.264.594,55	490.833.472.193,06	466.788.495.605,11	522.456.419.586,61

Sumber: Bapenda Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### d. Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Berbagai regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kemudahan usaha di daerah sehingga kegiatan investasi di daerah tersebut bisa menjadi lancar.

**Tabel 2.107**  
**Tabel Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha**  
**Di Kabupaten Majalengka**

NO	TAHUN	PERDA/PERBUP/KEPBUP
1	2018	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung
2	2018	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
3	2018	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka
4	2020	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
5	2020	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 503/Kep.70-DPMPTSP/2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
6	2021	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 649/Kep.137-DPMPTSP/2021 Tentang Standar Harga Dasar Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka
7	2021	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.195-BKAD/2021 Tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka Sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka
8	2022	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
9	2022	Keputusan Bupati Majalengka Nomor PU.03.00.00.00/Kep.170-DPUTR/2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

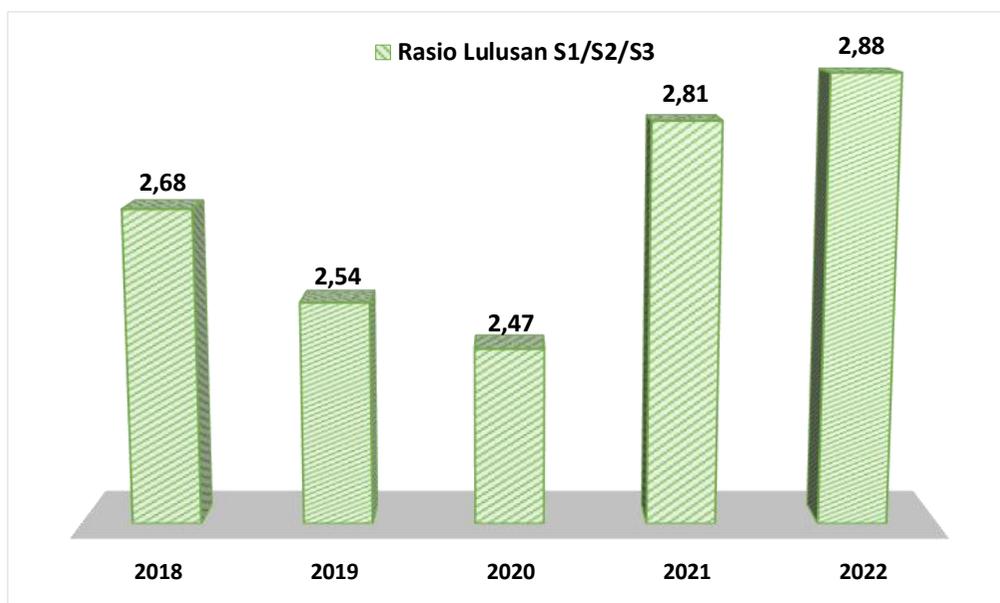
### 2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

#### a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Selama periode 2018-2022, hanya sebagian kecil yang berpendidikan Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka terus meningkat. Tercatat pada tahun 2022 persentase lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Majalengka sebesar 2,88% dari total jumlah penduduk dan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

**Gambar 2.19**  
**Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### b. Rasio Ketergantungan

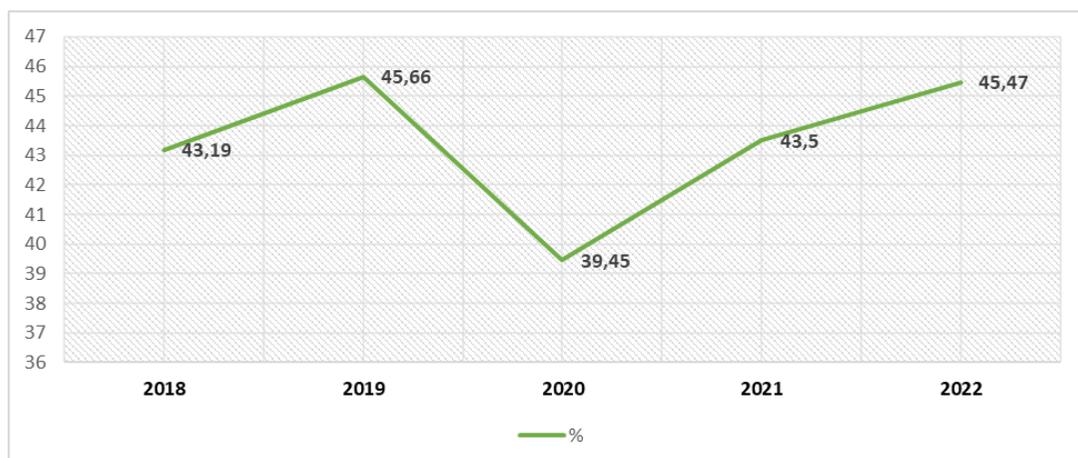
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda

berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan dapat dilihat pada Gambar 2.19 sebagai berikut:

**Gambar 2.20**  
**Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan**  
**Kabupaten Majalengka**



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.



Pada tahun 2022, angka ketergantungan di Kabupaten Majalengka sebesar 45,47%, ini berarti bahwa di Majalengka dari 100 orang penduduk yang produktif menanggung beban 45 orang penduduk non-produktif.

## **2.2. Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka**

### **2.2.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19**

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novelcoronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan WorldHealth Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19).

Berdasarkan grafik tren penambahan kasus Covid 19 di Kabupaten Majalengka pada bulan Mei terdapat penambahan kasus sebanyak 13 kasus, dengan range penambahan kasus antara 0 sampai 4 kasus perhari sehingga rata rata penambahan kasus pada bulan Mei 2022 sebesar 1 kasus per hari, sedangkan mulai awal bulan Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 Juni kasus mulai

menurun, hanya ada penambahan 1 kasus pada tanggal 12 juni 2022. Cakupan vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Majalengka, hingga Kamis, 22 Juni 2022, telah mencapai 93 %. Angka ini setara dengan 972.648 orang peserta vaksin. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 hingga telah tercapai 76% atau setara 798.826 orang peserta vaksin. Vaksinasi dosis ketiga/*booster* telah mencapai 21% atau sebanyak 214.884 orang peserta vaksin. Berdasarkan kondisi fasilitas kesehatan saat ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Majalengka sehingga angka penularan dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersedia, tentunya akan memperlambat penanganan kasus akibat pandemi COVID-19.

### **2.2.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2022**

Kondisi ekonomi pada masa pandemi tercermin dari komponen pembentuk PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta ekspor dan impor. Konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi pemerintah teralihkan dari konsumsi untuk pembangunan menjadi konsumsi untuk penanggulangan pandemi COVID-19, investasi diperkirakan menurun. Konsumsi rumah tangga kondisi tahun 2021 menurun. Konsumsi Pemerintah yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis dan program kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dilakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Selain itu terjadi penurunan realisasi belanja pemerintah khususnya belanja modal. Investasi pada masa pandemi COVID-19 melambat karena seluruh dunia teralihkan perhatiannya pada penanganan pandemi COVID-19.

### **2.2.3 Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2022**

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap dunia pendidikan menyebabkan aktivitas belajar dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi sudah memberlakukan pembelajaran daring.

Sehingga tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan dari tatap muka langsung menjadi jarak jauh. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Dampak lain adalah kemiskinan meningkat yang salah satunya disebabkan juga oleh pengangguran, ketika tinggal di rumah bagi masyarakat yang pendapatannya harian maka otomatis tidak akan mendapat penghasilan permasalahan lainnya juga ini akan lebih berat bagi orang-orang yang memang kondisinya sudah miskin sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kesimpulannya akibat dari pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka adalah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, dan kualitas pendidikan terganggu.

#### **2.2.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022**

Dengan adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terganggu. Kebijakan penerapan PPKM mengakibatkan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan. Kondisi ini mempengaruhi terhadap keuangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kemudian dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan *refocusing* terhadap program dan anggaran. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengeluarkan anggaran untuk penanganan kesehatan dan *social safety net* (bantuan tunai dan bantuan nontunai) dari APBD Kabupaten Majalengka. Kondisi tersebut masih akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Apabila pandemi COVID-19 masih terus berlangsung maka anggaran akan terus mengalami *refocusing*. Selain itu, dari sisi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mengalami penurunan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana transfer dari pusat karena melalui



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang telah mengoreksi penurunan rencana penerimaan dana transfer ke pemerintah daerah.

### **2.3. Evaluasi RKPD Tahun 2022 Kabupaten Majalengka**

Suatu SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran.

Metode evaluasi kinerja dilakukan menggunakan aplikasi *E-Monev*, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi (*performance result*) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat *performance gap* yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator *output* dan *outcome*. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala nilai peringkat kerja sebagai berikut :

**Tabel 2.108**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASIKINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-E.1.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

#### **(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

## (2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

## (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2022 dan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Tema pembangunan nasional tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”, sehingga tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah :

***“Pemantapan pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial akibat Dampak Covid-19”***

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi Bupati Majalengka periode tahun 2018-2023 untuk mewujudkan masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA (RAHARJA) dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.109**  
**Realisasi Visi dan Misi Kabupaten Majalengka**

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KONDISI AKHIR		
			2022	2022			
<b>VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>							
<b>Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>							
1.1	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	5	5	5
1.1.1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	5	5	5



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KONDISI AKHIR		
			2022	2022			
<b>Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>							
2.1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	1	Indeks Gini	poin	0,337	0,367	0,328
		2	Angka Kemiskinan	persen	10,80	11,94	10,37
2.1.1	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	1	Indeks Gini	poin	0,337	0,367	0,330
2.1.2	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	persen	10,80	11,94	10,37
2.1.3	Penurunan Prevalensi Stunting	1	Angka Stunting	Persen	4	3,84	3,5
2.2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	1	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	10	8	10
2.2.1	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	1	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	10	8	10
<b>Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>							
3.1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58	-	61
3.1.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai SAKIP	nilai	BB	B	BB
3.1.2.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	1	Opini BPK RI	opini	WTP	WTP	WTP
3.1.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	B	B	B
3.1.4.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN	poin	60,5	57,14	61
		2	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	-	-	-
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b>							
4.1	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	68,33	68,56	68,85
4.1.1	Meningkatnya Mutu pendidikan	1	Indeks Pengetahuan	poin	58,8	58,97	59,44
4.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	poin	77,26	78,09	77,54
4.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	persen	69,75	69,76	70,12
4.1.4	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani	persen	-	-	-
			Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,0	blm di nilai	1,0
4.1.5	Meningkatnya kunjungan wisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	850.000	772.661	1.000.000
4.1.6	Meningkatnya Investasi sektor Industri	1	Jumlah industri baru	Unit	-	-	-
			Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5	blm di nilai	5
4.1.7	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	1	Jumlah desa tematik	desa	18	18	59
<b>Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>							
5.1	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	1	Indeks Desa Membangun	poin	0,698	blm di nilai	0,710



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KONDISI AKHIR		
			2022	2022			
5.1.1	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	41	55	221

Sumber : Laporan IKU Kab. Majalengka Tahun 2022 \*per Desember 2022.

### 2.3.1. Capaian Indikator Makro

Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Majalengka menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator Makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, dan Indeks Gini.

**Tabel 2.110**  
**Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2018-2023**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		PERUBAHAN RPJMD 2018-2023				KONDISI AKHIR
			2017	2018	2022		2023		
					TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	65,92	66,72	68,33	68,56	100,34	68,85	68,85
	Usia Harapan Hidup	tahun	69,39	69,68	70,40	70,76	100,51	70,60	70,60
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,18	12,19	12,97	12,24	94,37	13,17	13,17
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,90	6,91	7,27	7,49	103,03	7,39	7,39
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.833	9.416	9.410	9.950	105,74	9.475	9.475
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,02	4,95	5,13	4,16	81,09	4,88	4,88
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	12,60	10,79	10,80	11,94	110,56	10,37	10,37
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,81	6,23	4,50	6,63	147,33	5,17	5,17
5	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	14.789	15.740	18.989	28.289	148,98	19.877	19.877
6	Indeks Gini	poin	0,351	0,350	0,337	0,367	108,9	0,330	0,330

Sumber: Tim Penyusun Evaluasi RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka tahun 2018 sebesar 66,72 poin sampai dengan tahun 2022



sebesar 68,56 poin atau ada peningkatan sebesar 1,84 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan dalam hal keterjangkauan akses penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka tidak terdampak oleh pandemi yang ditunjukkan oleh capaian nilai IPM mulai tahun 2019 sebesar 67,52 poin tetap meningkat pada tahun 2021 menjadi 67,81 poin. Sedangkan kondisi akhir dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 di targetkan sebesar 68,85 poin dan optimis bisa dicapai diakhir tahun pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Majalengka tahun 2018 sebesar 4,95 persen sampai dengan tahun 2022 sebesar 4,16 persen atau ada penurunan sebesar 0,79 persen. Hal ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Majalengka berkurang dikarenakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ditargetkan sebesar 4,88 persen maka sudah melampaui target yang diharapkan.
- c. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Majalengka dari tahun 2018 sebesar 10,79 persen sampai dengan tahun 2022 sebesar 11,94 persen atau ada peningkatan sebesar 1,15 persen. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dampak dari pandemi Covid-19 akibat adanya resesi ekonomi. Namun sebaliknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka tahun 2022 sebanyak 147.120 jiwa atau 11,94 persen mengalami penurunan sebesar 0,39 persen jika di sandingkan tahun 2021 sebesar 12,33 persen.



Sedangkan kondisi akhir pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 sebesar 10,37 persen sehingga realisasi persentase penduduk miskin pada Tahun 2022 di Kabupaten Majalengka belum melampaui target.

- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Majalengka tahun 2018 sebesar 6,23 persen sampai dengan tahun 2021 sebesar 4,75 persen menunjukkan penurunan sebesar 1,48 persen yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka masih terhambat dikarenakan pandemi Covid-19. Namun capaian tersebut di atas dari angka yang ditargetkan pada dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023, dimana target tahun 2021 sebesar 3,10 persen. Sedangkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 di Kabupaten Majalengka sebesar 6,63 persen, hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Majalengka terus membaik. Kenaikan LPE Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh :
- Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan air, Pengelolaan sampah dan Daur ulang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,01 persen.
  - Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,69 persen.
  - Sumber laju pertumbuhan (*Source of Growth*) dari sisi lapangan usaha, dengan andil positif terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan, besarnya mencapai 3,19 persen, hal ini melampaui kontribusi dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tahun sebelumnya selalu mendominasi. Adapun dari sisi pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,14 persen.
- e. PDRB per kapita di Kabupaten Majalengka dari tahun 2018 sebesar Rp. 15.740.000 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 17.277.000 ada peningkatan sebesar Rp. 1.537.000. Hal ini mengindikasikan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Majalengka selalu meningkat. PDRB per kapita Kabupaten Majalengka pada

tahun 2021 belum mencapai target sebesar Rp. 18.262.000. Sedangkan capaian PDRB per kapita di Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebesar Rp. 28.289.006, hal ini menunjukkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan yang tinggi.

- f. Indeks Gini di Kabupaten Majalengka dari tahun 2018 sebesar 0,350 poin sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,354 poin atau ada peningkatan sebesar 0,004 poin yang berdampak pada ketimpangan yang semakin besar antar daerah di Kabupaten Majalengka karena ada pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran yang tersedia. Namun capaian tersebut di atas dari angka yang ditargetkan pada dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023, dimana target tahun 2021 sebesar 3,39 poin. Sedangkan capaian indeks gini di Kabupaten Majalengka tahun 2022 sebesar 0,367 dengan hasil ini masih belum mencapai dari yang ditargetkan sebesar 0,337.

### 2.3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas.

**Tabel 2.111**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2022		
			TARGET	CAPAIAN	(%)
1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	5,00	5,00	100,00



NO.	INDIKATOR	SATUAN	PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2022		
			TARGET	CAPAIAN	(%)
2	Indeks Gini	poin	0,337	0,367	91,83
3	Angka Kemiskinan	Persen	10,80	11,94	89,44
4	Angka <i>Stunting</i>	Persen	4,00	3,84	104,00
5	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	10,00	8,00	120,00
6	Nlai SAKIP	Nilai	BB	B	95,71
7	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	100,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B	100,00
9	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	60,5	57,14	94,45
10	Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	-	-	-
11	Indeks Pengetahuan	Poin	58,80	58,97	100,29
12	Indeks Kesehatan	Poin	77,26	78,09	101,07
13	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	69,75	69,76	100,01
14	Nilai Tukar Petani	Persen	-	-	-
	Peningkatan Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,0	N/A	N/A
15	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	850.000	772.161	83,26
16	Jumlah industri baru	Unit	-	-	-
	Laju pertumbuhan sektor industri	Persen	5,0	N/A	N/A
17	Jumlah desa tematik	Desa	18	18	100,00
18	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	41	55	134,15

Sumber: Tim Penyusun Evaluasi RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 per Desember 2022.

Capaian IKU Perangkat daerah sebagaimana telah dibahas diatas sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Indikator kinerja program juga menjadi Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (*outcome*). Dibawah ini disampaikan capaian indikator kinerja program/IKK tingkat *outcome* berdasarkan laporan masing-masing Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

### **2.3.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Majalengka terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk

Kabupaten Majalengka, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka Indikator Kinerja Daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan .
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan .
4. Terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah.

**Tabel 2.112**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>PENDIDIKAN</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DISDIK
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISDIK
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISDIK
4	APM PAUD	Persen	99,4	92,48	93,04	DISDIK
5	APM SD/MI	Persen	97,3	90,02	92,52	DISDIK
6	APM SMP/MTs	Persen	98,35	90,12	91,63	DISDIK
7	APK Non Formal	Persen	86,4	81,05	93,81	DISDIK
8	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Persen	16,18	15,2	93,94	DISDIK
<b>KESEHATAN</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DINKES
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DINKES
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DINKES
4	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk	Persen	0,001	0,0006	60,00	DINKES
5	Persentase RS Rujukan yang terakreditasi	Persen	1	0,8	80,00	DINKES
6	Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	Persen	90	90	100,00	DINKES
7	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	90	90	100,00	DINKES
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100,00	DINKES
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai	Persen	100	100	100,00	DINKES



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
	standar					
10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	90	90,00	DINKES
11	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	50	50	100,00	DINKES
12	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	60	60	100,00	DINKES
13	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	25	25	100,00	DINKES
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60	60	100,00	DINKES
15	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	50	50	100,00	DINKES
16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	50	50	100,00	DINKES
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	90	60,89	67,66	DINKES
18	Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas	Persen	85	85	100,00	DINKES
19	Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	Persen	42	42	100,00	DINKES
20	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	Persen	85	81,19	95,52	DINKES
21	Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	Keluarga	192.402	90.092	46,82	DINKES
22	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Pegawai	85	65	76,47	DINKES
23	Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Persen	0,7	0,7	100,00	DINKES
24	Terlaksanannya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal	Persen	0,1	0,1	100,00	DINKES
25	Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100Persen	persen	100	100	100,00	DINKES
<b>RSUD MAJALENGKA</b>						
1	Persentasi ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	persen	80	79	98,75	RSUD MAJALENGKA
2	Hasil penilaian Akreditasi		Pari purna	Pari purna	100,00	RSUD MAJALENGKA



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
3	Presentasi nilai Indek Kepuasan Masyarakat	persen	85	81	95,29	RSUD MAJALENGKA
4	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	90	81	90,00	RSUD MAJALENGKA
<b>RSUD CIDERES</b>						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,5	82,02	105,83	RSUD CIDERES
2	Standar Pelayanan Minimal	persen	82	82	100,00	RSUD CIDERES
3	Akreditasi Rumas Sakit	Nilai	Pariपुरna	Pari pura	100,00	RSUD CIDERES
4	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	82,2	82,12	99,90	RSUD CIDERES
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DPUTR
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DPUTR
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DPUTR
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	75,1	75,51	100,55	DPUTR
5	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	80,41	80,98	100,71	DPKPP
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	68,58	69,65	101,56	DPKPP
7	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik /tidak tersumbat ( Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh drainase di Kewenangan kab/Kota)	Persen	30,1	30,11	100,03	DPKPP
8	Persentase infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen	82,24	80,36	97,71	DPKPP
9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	17,93	27,84	155,27	DPKPP
10	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani	Unit	15	4	26,67	DPUTR
11	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang ditangani	Unit	4	8	200,00	DPUTR
12	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	66,15	72,87	110,16	DPUTR
13	Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi	Orang	100	117	117,00	DPUTR
14	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan	Dokumen	1	0	-	DPUTR
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat	Nilai	BB	BB	100,00	DPKPP



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
	Daerah					
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DPKPP
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DPKPP
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	unit rumah	25	53	212,00	DPKPP
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampakrelokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit rumah	25	0	-	DPKPP
6	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	persen	80	85	106,25	DPKPP
7	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	69,19	175	252,93	DPKPP
8	Persentase kawasanpermukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	27,84	27,84	100,00	DPKPP
9	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3	2	66,67	DPKPP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						
1	jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum	Lokasi	5	2	40,00	DPKPP
<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	SATPOL PP DAMKAR
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	SATPOL PP DAMKAR
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	75	75,00	SATPOL PP DAMKAR
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	97,92	97,92	SATPOL PP DAMKAR
5	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	80,95	80,95	SATPOL PP DAMKAR
6	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	BPBD
7	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	BPBD
8	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	43	43,00	BPBD
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	866	1.323.854	152.870	BPBD
10	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	Jiwa	866	1.323.854	152.870	BPBD
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	2.000	3.328	166,40	BPBD
12	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100,00	SATPOL PP DAMKAR



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	22	15	68,18	SATPOL PP DAMKAR
<b>SOSIAL</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DINSOS
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DINSOS
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100	100,00	DINSOS
4	Persentase KUBE yang Mandiri	persen	20	20	100,00	DINSOS
5	Persentase (Persen) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	6	6	100,00	DINSOS
6	Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"	Orang	1.000	1.660	166,00	DINSOS
7	Persentase Orang miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Pesentase	100	100	100,00	DINSOS
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100,00	DINSOS
9	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100,00	DINSOS
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>						
<b>TENAGA KERJA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DK2UKM
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DK2UKM
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DK2UKM
4	Capaian kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	5	3	60,00	DK2UKM
5	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	40	135	337,50	DK2UKM
6	Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri	Orang	120	135	112,50	DK2UKM
7	Tingkat Tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	20	20	100,00	DK2UKM
8	Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	75	75	100,00	DK2UKM
<b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DP3AKB
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DP3AKB
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DP3AKB
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,1	0,22	220,00	DP3AKB



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
5	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	20	23,08	115,40	DP3AKB
6	Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan	persen	1,45	1,45	100,00	DP3AKB
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,00015	0,00015	100,00	DP3AKB
8	Persentase Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri	Persen	0,7	0,1	14,29	DP3AKB
9	Capaian Data Gender dan Anak	Persen	40	40	100,00	DP3AKB
10	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nilai (Minimal)	600	413,65	68,94	DP3AKB
11	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,0041	0,0041	100,00	DP3AKB
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1	TFR (Total Fertility Rate)	Point	2,26	2,26	100,00	DP3AKB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	79,97	79,97	100,00	DP3AKB
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	31,11	4,82	15,49	DP3AKB
<b>PANGAN</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DKP3
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DKP3
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DKP3
4	Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	Persen	100	100	100,00	DKP3
5	Peningkatan skor PPH	Persen	0,5	0,6	120,00	DKP3
6	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	100	100,00	DKP3
7	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	Desa	4	4	100,00	DKP3
8	Capaian Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100,00	DKP3
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DLH
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DLH
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DLH
4	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	100	100	100,00	DLH
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	59,36	64,81	109,18	DLH
6	Indeks Tutupan Lahan	Poin	50,99	50,97	99,96	DLH
7	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	100	31,67	31,67	DLH
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	100	100	100,00	DLH



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
	oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
9	Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	100	100	100,00	DLH
10	jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan	Buah	9	2	22,22	DLH
11	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	DLH
12	Persentase penanganan sampah yang tertangani	Persen	99	67,61	68,29	DLH
13	Persentase Pengembangan dan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	Persen	45,91	5,04	10,98	DLH
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DISDUKCAPIL
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISDUKCAPIL
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISDUKCAPIL
4	Persentase Kepemilikan KTP	Persen	90	100	111,11	DISDUKCAPIL
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	20	65	325,00	DISDUKCAPIL
6	Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga	Persen	85	90	105,88	DISDUKCAPIL
7	Persentasi Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian	Persen	95	99	104,21	DISDUKCAPIL
8	Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Persen	100	100	100,00	DISDUKCAPIL
9	Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100,00	DISDUKCAPIL
10	Persentase OPD yang telah memanfaatkan datakependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	24,07	25	103,86	DISDUKCAPIL
11	Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	Persen	100	100	100,00	DISDUKCAPIL
<b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	72,50	DPMD
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	81,21	DPMD
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DPMD
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7,88	52,38	664,72	DPMD
5	Jumlah Pelaksana Mou yang dilaksanakan dengan pihak ke tiga	MoU	8	8	100,00	DPMD
6	Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	Persen	100	100	100,00	DPMD



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
7	Persentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persen	100	100	100,00	DPMD
<b>PERHUBUNGAN</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DISHUB
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISHUB
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISHUB
4	Persentase Capaian Desa Yang Terlayani Angkutan Umum	persen	75	75	100,00	DISHUB
5	Persentase Pemasangan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	persen	50	45,59	91,18	DISHUB
6	Persentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	persen	90	78	86,67	DISHUB
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DISKOMINFO
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISKOMINFO
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISKOMINFO
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	80	80	100,00	DISKOMINFO
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	80	80	100,00	DISKOMINFO
6	Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	Lokasi	6	3	50,00	DISKOMINFO
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100,00	DISKOMINFO
<b>PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						
1	Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik	Persen	75	75	100,00	DISKOMINFO
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
1	Tingkat koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	16,22	21	129,47	DK2UKM
2	Tingkat koperasi sehat	Persen	10	21	210,00	DK2UKM
3	Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Orang	125	70	56,00	DK2UKM
4	Tingkat Koperasi yang berkualitas	Persen	20	21	105,00	DK2UKM
5	Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin	Persen	3	3	100,00	DK2UKM
6	Tingkat Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	100	100	100,00	DK2UKM
<b>TRANSMIGRASI</b>						
1	Jumlah Kawasan	persen	1	-	-	DK2UKM



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
	Transmigrasi yang difasilitasi					
<b>PENANAMAN MODAL</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DPMTSP
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DPMTSP
3	Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	82,61	82,61	DPMTSP
4	Peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	100	100	100,00	DPMTSP
5	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Sarana/P rasarana	5	5	100,00	DPMTSP
6	Tingkat Perizinan Yang diterbitkan	Persen	100	98,42	98,42	DPMTSP
7	Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban	Persen	100	90	90,00	DPMTSP
8	Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten	Persen	100	100	100,00	DPMTSP
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DISPORA
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISPORA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISPORA
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	Persen	2	2	100,00	DISPORA
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	48	48	100,00	DISPORA
6	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	43	46	106,98	DISPORA
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	80	80	100,00	DISPORA
8	Peningkatan Infrastruktur keolahragaan	Persen	0,8	0,8	100,00	DISPORA
9	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	Persen	100	100	100,00	DISPORA
<b>STATISTIK</b>						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100,00	DISKOMINFO
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100,00	DISKOMINFO
<b>KEBUDAYAAN</b>						
1	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Event	35	20	57,14	DISPARBUD
2	jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi	Seni Tradisional	1	1	100,00	DISPARBUD
3	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola	Jumlah	1	1	100,00	DISPARBUD
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	5	5	100,00	DISPARBUD
5	jumlah Museum yang direvitalisasi	Museum	1	1	100,00	DISPARBUD



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
<b>PERPUSTAKAAN</b>						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	49	52	106,12	ARPUSDA
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	POIN	1,8	2,5	138,89	ARPUSDA
<b>KEARSIPAN</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	ARPUSDA
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	ARPUSDA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	ARPUSDA
4	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	persen	50	51	102,00	ARPUSDA
5	Rasio pengelola arsip	Persen	100	100	100,00	ARPUSDA
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	50	50	100,00	ARPUSDA
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	10	10,86	108,60	DKP3
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	Persen	10	10,65	106,50	DKP3
3	Jumlah omzet pemasaran produk perikanan	Persen	5	5,72	114,40	DKP3
4	Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah	30	50	166,67	DKP3
<b>PARIWISATA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	DISPARBUD
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISPARBUD
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISPARBUD
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	1,1	1,1	100,00	DISPARBUD
5	Persentase Desa Wisata Berkembang	persen	24	15,5	64,58	DISPARBUD
6	Jumlah usaha pariwisata yang distandarisasi	persen	30	30	100,00	DISPARBUD
7	Persentase Jumlah daya tarik yang dipromosikan	persen	10	10	100,00	DISPARBUD
8	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	persen	20	20	100,00	DISPARBUD
9	Jumlah Desa Tematik Kreatif	Desa	6	5	83,33	DISPARBUD
10	sertifikasi pelaku ekonomi kreatif	persen	5	5	100,00	DISPARBUD
<b>PERTANIAN</b>						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	80	80	100,00	DKP3
2	Persentase ketersediaan prasarana Pertanian	Persen	60	60	100,00	DKP3
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	30	30	100,00	DKP3
4	Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	Hektar	5.000	5000	100,00	DKP3
5	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Persen	100	100	100,00	DKP3
<b>PERDAGANGAN</b>						



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Persen	BB	BB	100,00	DISPERDAGIN
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	DISPERDAGIN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	DISPERDAGIN
4	Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	Unit	1	1	100,00	DISPERDAGIN
5	Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	Unit	3	1	33,33	DISPERDAGIN
6	Tingkat kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	100,00	DISPERDAGIN
7	Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat	Kali	96	96	1,00	DISPERDAGIN
8	Meningkatnya nilai ekspor	Persen	10	-28,93	-289,30	DISPERDAGIN
9	Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	20	46,2	231,00	DISPERDAGIN
10	Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	12	7	58,33	DISPERDAGIN
<b>PERINDUSTRIAN</b>						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	IKM	40	110	275,00	DISPERDAGIN
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	100,00	DISPERDAGIN
<b>URUSAN PENUNJANG</b>						
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	BAPPEDALITB ANG
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	BAPPEDALITB ANG
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	97	97,00	BAPPEDALITB ANG
4	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persen	98	95	96,94	BAPPEDALITB ANG
5	Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	Persen	98	95	96,94	BAPPEDALITB ANG
6	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD	Persen	98	95	96,94	BAPPEDALITB ANG
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan	persen	100	98	98,00	BAPPEDALITB ANG
2	Persentase Inovasi Daerah yang diimplmentasikan	persen	85	66	77,65	BAPPEDALITB ANG
<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat	Nilai	BB	BB	100,00	BKPSDM



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
	Daerah					
2	Capaian SKM Perangkat Daerah (B)	Nilai	B	BB	100,00	BKPSDM
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran ( C )	Persen	100	100	100,00	BKPSDM
4	Rasio pegawai Fungsional	Persen	70	74,21	106,01	BKPSDM
5	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	Persen	100	100	100,00	BKPSDM
6	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Persen)	Rasio	6,51	11,21	172,20	BKPSDM
7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	59	34	57,63	BKPSDM
8	Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	60	97	161,67	BKPSDM
<b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	BKAD
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	BKAD
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	BKAD
4	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Persen	100	100	100,00	BKAD
5	Aset yang diamankan secara fisik dan Legal	Persen	100	60	60,00	BKAD
6	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	BAPENDA
7	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	BAPENDA
8	Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	51,78	51,78	BAPENDA
9	Capaian realisasi Penerimaan PAD	persen	100	87,95	87,95	BAPENDA
<b>FUNGSI LAINNYA</b>						
<b>SETDA</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	SETDA
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	SETDA
3	Capaian IKM Kabupaten	Indek	100	100	100,00	SETDA
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	SETDA
5	Capaian Lakip Kabupaten	Nilai	BB	B	95,71	SETDA
6	Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif	Persen	40	40	100,00	SETDA
7	Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi	Persen	55	100	181,82	SETDA
8	Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi	Persen	77	100	129,87	SETDA
9	Persentase tokoh agama yang terfasilitasi	Persen	62	100	161,29	SETDA
10	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Tinggi	Tinggi	100,00	SETDA
11	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Regulasi dan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Persen	100	100	100,00	SETDA
12	Tingkat Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	Persen	100	100	100,00	SETDA



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
13	Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil dilaksanakan	Persen	100	100	100,00	SETDA
14	Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan	Persen	100	100	100,00	SETDA
15	Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD	Persen	5	3,5	70,00	SETDA
<b>INSPEKTORAT</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	INSPEKTORAT
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	INSPEKTORAT
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	INSPEKTORAT
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	90	90	100,00	INSPEKTORAT
5	Tingkat Maturitis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	66,67	INSPEKTORAT
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2	66,67	INSPEKTORAT
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	Setwan
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	Setwan
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	92	92,00	Setwan
4	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	persen	100	87,26	87,26	Setwan
5	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan	Persen	100	86	86,00	Setwan
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	KESBANGPOL
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	KESBANGPOL
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	KESBANGPOL
4	Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	5	5	100,00	KESBANGPOL
5	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	100,00	KESBANGPOL
6	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100,00	KESBANGPOL
7	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100,00	KESBANGPOL
8	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100,00	KESBANGPOL
<b>KECAMATAN</b>						



NO	INDIKATOR KINERJA (outcome)	SATUAN	2022			PERANGKAT DAERAH
			TARGET	CAPAIAN	%	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100,00	KECAMATAN
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100,00	KECAMATAN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100,00	KECAMATAN
4	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100,00	KECAMATAN
5	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100,00	KECAMATAN
6	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100,00	KECAMATAN
7	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100,00	KECAMATAN
8	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	100,00	KECAMATAN

Sumber : Hasil laporan IKD Perangkat Daerah, diolah.

Selama kurun waktu tahun 2021 - 2022, Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Majalengka, sebanyak 299 indikator kinerja (*outcome*) meliputi :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, RSUD Majalengka, RSUD Cideres, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
2. Urusan pemerintahan bidang pertanahan yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sosial;
3. Urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar yaitu Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintahan Bidang Persandian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi, Penanaman Modal, Kepemudaan Dan Olahraga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Urusan Pilihan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Urusan Penunjang yaitu Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,

- Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keuangan Dan Aset Daerah;
6. Fungsi lainnya yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Sekretariat DPRD;
  7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kecamatan.

## 2.4. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

### 2.4.1. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran Dalam RKPD dan APBD

Evaluasi dilakukan pada jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 dengan jumlah program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Berikut disajikan perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatannya.

**Tabel 2.113**  
**Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2022**

RKPD			APBD		
JML PROGRAM	JML KEGIATAN	JML SUB KEGIATAN	JML PROGRAM	JML KEGIATAN	JML SUB KEGIATAN
127	260	764	127	260	764

Sumber : Sistem Informasi Perangkat Daerah Kab. Majalengka Tahun 2022.

Jika dijabarkan, berikut adalah rekapitulasi jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD dan APBD tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.114**  
**Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Perubahan dan APBD Pada Setiap OPD Triwulan IV Tahun 2022**

NO	NAMA OPD	RKPD			APBD		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG
1	Dinas Pendidikan	2	11	71	2	11	71
2	Dinas Kesehatan	5	21	80	5	21	80
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	2	3	6	2	3	6
4	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	2	3	7	2	3	7
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	19	64	7	19	64
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	18	36	10	18	36
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	9	32	2	9	32
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3	16	67	3	16	67



NO	NAMA OPD	RKPD			APBD		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG
	dan Pemadam Kebakaran						
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	11	25	5	11	25
10	Dinas Sosial	6	16	58	6	16	58
11	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9	17	35	9	17	35
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10	25	63	10	25	63
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13	28	60	13	28	60
14	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	42	9	17	42
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	33	5	14	33
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	41	5	10	41
17	Dinas Perhubungan	2	18	58	2	18	58
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	45	5	13	45
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	10	29	6	10	29
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	15	33	4	15	33
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10	20	42	10	20	42
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	4	14	28	4	14	28
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	12	31	8	12	31
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	34	3	12	34
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	53	3	11	53
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4	17	64	4	17	64
27	Badan Pendapatan Daerah	2	8	36	2	8	36
28	Sekretariat Daerah	4	21	67	4	21	67
29	Sekretariat DPRD	2	15	44	2	15	44
30	Inspektorat	3	11	38	3	11	38
31	Kecamatan Argapura	6	14	39	6	14	39
32	Kecamatan Banjaran	6	14	39	6	14	39
33	Kecamatan Bantarujeg	6	14	36	6	14	36
34	Kecamatan Cigasong	6	15	44	6	15	44
35	Kecamatan Cikijing	6	14	42	6	14	42
36	Kecamatan Cingambul	6	14	38	6	14	38
37	Kecamatan Dawuan	6	14	39	6	14	39
38	Kecamatan Jatitujuh	6	13	36	6	13	36
39	Kecamatan Jatiwangi	5	13	28	5	13	28
40	Kecamatan Kadipaten	6	14	41	6	14	41
41	Kecamatan Kasokandel	6	14	39	6	14	39
42	Kecamatan Kertajati	6	14	42	6	14	42
43	Kecamatan Lemahsugih	6	14	42	6	14	42
44	Kecamatan Leuwimunding	6	15	41	6	15	41
45	Kecamatan Ligung	6	13	31	6	13	31
46	Kecamatan Maja	6	14	41	6	14	41
47	Kecamatan Majalengka	6	15	42	6	15	42
48	Kecamatan Malausma	6	14	37	6	14	37
49	Kecamatan Palasah	6	14	43	6	14	43
50	Kecamatan Panyingkiran	6	14	39	6	14	39



NO	NAMA OPD	RKPD			APBD		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG
51	Kecamatan Rajagaluh	6	14	39	6	14	39
52	Kecamatan Sindang	6	14	42	6	14	42
53	Kecamatan Sindangwangi	6	14	40	6	14	40
54	Kecamatan Sukahaji	6	14	41	6	14	41
55	Kecamatan Sumberjaya	6	14	42	6	14	42
56	Kecamatan Talaga	6	13	32	6	13	32

Sumber : SIPD Kab. Majalengka Tahun 2022.

Sebagaimana diperoleh Rekapitulasi Perbandingan Pagu Indikatif RKPD Terhadap APBD Tahun 2022, sebagai berikut :

**Tabel 2.115**  
**Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD Perubahan dan Alokasi**  
**APBD Perubahan Tahun 2022**

NO	NAMA OPD	RKPD		APBD		% APBD-P TERHADAP RKPD-P
		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	
1	Dinas Pendidikan	1.152.509.451.402	987.874.831.125	1.100.055.761.861	949.176.667.316	96
2	Dinas Kesehatan	655.121.628.043	595.019.697.311	629.150.331.814	205.627.552.174	35
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	189.600.225.200	187.495.029.989	181.136.575.100	188.656.551.653	101
4	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	184.647.837.100	163.428.147.827	175.411.030.700	166.528.619.296	102
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	594.627.237.610	468.967.446.591	490.250.947.322	346.577.071.884	74
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.521.355.323	35.469.862.937	31.742.414.956	36.112.510.891	102
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.414.917.815	6.155.922.988	6.071.538.281	6.596.666.723	107
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.445.955.725	15.392.712.163	15.621.419.400	16.268.959.908	106
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.444.838.159	6.212.497.758	6.020.632.300	6.841.899.389	110
10	Dinas Sosial	11.656.380.082	9.314.736.024	9.671.910.670	10.393.942.163	112
11	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.443.081.085	20.918.092.415	6.919.075.900	22.731.800.642	109
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	24.096.723.321	21.472.322.143	25.077.849.200	21.702.276.468	101
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	60.642.231.011	37.851.416.924	46.151.957.485	40.396.571.864	107
14	Dinas Lingkungan Hidup	18.125.760.679	19.003.928.989	18.956.816.400	19.934.933.363	105



NO	NAMA OPD	RKPD		APBD		% APBD-P TERHADAP RKPD-P
		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.031.247.991	8.071.703.113	12.383.278.846	8.317.919.354	103
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.536.791.693	22.913.988.636	23.202.315.236	25.873.523.013	113
17	Dinas Perhubungan	28.941.407.650	21.045.420.862	23.541.157.690	22.482.875.102	107
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.574.263.673	6.338.780.949	12.758.562.670	6.714.195.809	106
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.617.685.414	6.133.623.019	6.063.574.651	6.357.315.143	104
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	84.392.823.823	10.806.872.662	85.149.598.748	11.061.952.686	102
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.277.169.693	22.852.282.023	30.146.580.235	8.242.865.316	36
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	8.901.485.921	5.388.332.265	6.894.789.900	5.799.281.737	108
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.479.044.634	9.320.900.495	24.706.728.600	10.343.745.124	111
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.304.690.061	109.567.767.803	127.321.498.325	46.465.295.521	42
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	569.873.567.398	563.441.763.454	581.898.767.584	578.449.533.563	103
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.306.341.749	11.890.786.516	11.494.589.900	12.272.233.883	103
27	Badan Pendapatan Daerah	16.852.158.512	18.541.821.549	18.628.438.150	20.528.572.810	111
28	Sekretariat Daerah	85.890.453.752	64.629.420.021	60.945.309.974	71.225.727.474	110
29	Sekretariat DPRD	58.172.707.622	60.557.441.260	60.662.150.350	62.904.756.642	104
30	Inspektorat	12.554.728.472	11.527.889.822	11.732.584.169	12.346.841.323	107
31	Kecamatan Argapura	2.840.567.658	2.600.834.626	2.598.618.019	2.732.131.190	105
32	Kecamatan Banjaran	2.759.224.086	2.486.283.517	2.576.389.352	2.583.067.125	104
33	Kecamatan Bantarujeg	2.599.131.465	2.189.208.817	2.383.330.049	2.328.270.185	106
34	Kecamatan Cigasong	8.006.087.618	7.868.277.468	7.894.851.401	8.223.677.025	105
35	Kecamatan Cikijing	2.957.391.738	2.385.479.005	2.698.185.548	2.545.527.415	107
36	Kecamatan Cingambul	2.857.357.494	2.377.782.100	2.608.810.540	2.616.036.917	110
37	Kecamatan Dawuan	2.792.317.448	2.444.094.765	2.548.493.800	2.558.111.880	105
38	Kecamatan Jatitujuh	3.164.725.952	2.884.835.726	2.897.734.038	3.074.764.988	107
39	Kecamatan Jatiwangi	3.284.340.462	3.035.810.004	3.023.009.010	3.209.148.201	106
40	Kecamatan Kadipaten	2.626.776.138	2.462.570.644	2.431.060.450	2.555.863.684	104



NO	NAMA OPD	RKPD		APBD		% APBD-P TERHADAP RKPD-P
		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	
41	Kecamatan Kasokandel	2.648.325.761	2.411.150.796	2.382.036.211	2.510.614.157	104
42	Kecamatan Kertajati	3.443.800.773	2.948.001.470	3.019.856.280	3.142.594.031	107
43	Kecamatan Lemahsugih	2.482.404.965	2.254.896.421	2.293.593.050	2.333.878.501	104
44	Kecamatan Leuwimunding	2.645.561.444	2.327.253.770	2.445.711.404	2.486.704.048	107
45	Kecamatan Ligung	3.329.307.632	3.141.683.733	3.069.809.900	3.348.325.851	107
46	Kecamatan Maja	2.771.954.664	2.600.812.511	2.557.180.015	2.765.888.802	106
47	Kecamatan Majalengka	20.063.164.657	20.190.396.383	19.957.516.300	20.972.548.669	104
48	Kecamatan Malausma	2.538.696.394	2.532.220.041	2.384.893.000	2.628.463.728	104
49	Kecamatan Palasah	2.794.349.314	2.450.014.535	2.589.922.861	2.606.267.169	106
50	Kecamatan Panyingkiran	2.305.750.019	2.262.457.890	2.189.461.791	2.419.892.330	107
51	Kecamatan Rajagaluh	3.029.108.828	2.835.195.142	2.770.202.300	3.019.399.574	106
52	Kecamatan Sindang	2.495.158.783	2.609.428.727	2.416.945.663	2.715.585.081	104
53	Kecamatan Sindangwangi	2.514.629.810	2.418.353.159	2.328.051.000	2.587.117.649	107
54	Kecamatan Sukahaji	2.519.206.265	2.463.428.207	2.326.163.900	2.621.685.317	106
55	Kecamatan Sumberjaya	2.681.815.787	2.216.429.049	2.433.094.012	2.345.973.434	106
56	Kecamatan Talaga	2.966.726.729	2.731.208.974	2.656.313.584	2.861.445.405	105
	<b>TOTAL</b>	<b>4.106.122.072.497</b>	<b>3.616.733.547.113</b>	<b>3.929.249.419.895</b>	<b>3.040.725.640.590</b>	<b>84</b>

Sumber : \*SIPD Kemendagri dan Laporan Renja OPD Tahun 2022.  
\*Tabel laporan dari OPD.

Dari tabel 2.115 di atas diketahui bahwa untuk total jumlah pagu indikatif yang direncanakan di RKPD Perubahan sejumlah Rp. 3.616.733.547.113 direalisasikan dalam APBD Parsial 4 sejumlah Rp. 3.040.725.640.590 atau 84%. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Skala Nilai Peringkat Kinerja : untuk Pagu Indikatif Program dan Kegiatan termasuk interval  $81\% \leq 90\%$  dengan kriteria **Tinggi**.

#### **2.4.2. Pencapaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan Dalam RKPD**

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022, diperoleh Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan SKPD dalam RKPD Tahun 2022, sebagai berikut :



**Tabel 2.116**  
**Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2022**

NO	NAMA	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN IV		
			KEUANGAN	FISIK (%)	KEU (%)
1	2		7	8	9
	<b>OPD</b>				
1	Dinas Pendidikan	949.176.667.316	912.526.985.916	100	96
2	Dinas Kesehatan	205.627.552.174	181.435.583.005	100	88
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	188.656.551.653	183.727.917.990	100	97
4	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	166.528.619.296	158.768.056.273	100	95
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	346.577.071.884	341.769.659.972	96	99
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	36.112.510.891	32.479.838.647	100	90
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.596.666.723	6.285.203.801	100	95
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.268.959.908	15.698.376.090	100	96
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.841.899.389	6.680.287.607	96	98
10	Dinas Sosial	10.393.942.163	10.353.297.488	88	100
11	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	22.731.800.642	22.337.490.564	100	98
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	21.702.276.468	21.082.375.492	98	97
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	40.396.571.864	38.980.709.253	101	96
14	Dinas Lingkungan Hidup	19.934.933.363	19.380.740.750	99	97
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.317.919.354	8.144.790.244	100	98
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.873.523.013	23.569.951.020	100	91
17	Dinas Perhubungan	22.482.875.102	21.546.585.214	97	96



NO	NAMA	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN IV		
			KEUANGAN	FISIK (%)	KEU (%)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.714.195.809	6.504.865.553	100	97
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.357.315.143	6.152.647.473	100	97
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	11.061.952.686	10.730.966.236	100	97
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.242.865.316	8.053.152.605	99	98
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.799.281.737	5.556.112.576	100	96
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.343.745.124	9.843.155.398	97	95
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.465.295.521	45.449.568.236	94	98
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	578.449.533.563	563.516.651.113	94	97
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.272.233.883	11.910.767.401	100	97
27	Badan Pendapatan Daerah	20.528.572.810	19.599.384.450	100	95
28	Sekretariat Daerah	71.225.727.474	65.509.123.586	94	92
29	Sekretariat DPRD	62.904.756.642	57.568.656.415	92	92
30	Inspektorat	12.346.841.323	11.681.673.275	102	95
	<b>KECAMATAN</b>				
31	Kecamatan Argapura	2.732.131.190	2.690.264.945	100	98
32	Kecamatan Banjaran	2.583.067.125	2.575.220.851	100	100
33	Kecamatan Bantarujeg	2.328.270.185	2.312.682.847	97	99
34	Kecamatan Cigasong	8.223.677.025	7.961.760.810	98	97
35	Kecamatan Cikijing	2.545.527.415	2.405.256.349	100	94
36	Kecamatan Cingambul	2.616.036.917	2.610.984.238	99	100
37	Kecamatan Dawuan	2.558.111.880	2.512.151.030	100	98
38	Kecamatan Jatitujuh	3.074.764.988	2.851.204.265	95	93
39	Kecamatan Jatiwangi	3.209.148.201	3.104.550.049	100	97
40	Kecamatan Kadipaten	2.555.863.684	2.525.377.021	98	99
41	Kecamatan Kasokandel	2.510.614.157	2.415.632.423	100	96



NO	NAMA	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN IV		
			KEUANGAN	FISIK (%)	KEU (%)
42	Kecamatan Kertajati	3.142.594.031	2.949.712.093	100	94
43	Kecamatan Lemahsugih	2.333.878.501	2.260.049.118	100	97
44	Kecamatan Leuwimunding	2.486.704.048	2.437.916.850	92	98
45	Kecamatan Ligung	3.348.325.851	3.113.151.055	99	93
46	Kecamatan Maja	2.765.888.802	2.652.605.184	100	96
47	Kecamatan Majalengka	20.972.548.669	20.322.842.006	100	97
48	Kecamatan Malausma	2.628.463.728	2.569.181.195	100	98
49	Kecamatan Palasah	2.606.267.169	2.447.983.696	99	94
50	Kecamatan Panyingkiran	2.419.892.330	2.234.714.641	93	92
51	Kecamatan Rajagaluh	3.019.399.574	2.809.594.669	100	93
52	Kecamatan Sindang	2.715.585.081	2.631.927.380	99	97
53	Kecamatan Sindangwangi	2.587.117.649	2.537.972.028	100	98
54	Kecamatan Sukahaji	2.621.685.317	2.426.446.820	100	93
55	Kecamatan Sumberjaya	2.345.973.434	2.276.512.036	97	97
56	Kecamatan Talaga	2.861.445.405	2.757.958.797	100	96
<b>TOTAL</b>		<b>3.040.725.640.590</b>	<b>2.917.238.226.039</b>	<b>98</b>	<b>96</b>

Sumber : Laporan Renja OPD Triwulan IV Tahun 2022.

Dari tabel 2.116 di atas diketahui bahwa tingkat capaian rata-rata realisasi fisik mencapai 98% sedangkan untuk realisasi keuangan yang terserap dari seluruh Perangkat Daerah sebesar 96% atau sejumlah Rp. 2.917.238.226.039 dari alokasi anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 3.040.725.640.590. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Skala Nilai Peringkat Kinerja : untuk Kinerja termasuk interval  $91\% \leq 100\%$  dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Gradasi cukup menunjukkan capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

## 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang mana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara umum, analisis permasalahan pembangunan daerah berkaitan dengan pengembangan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan sumber daya manusia dan masalah sosial, dan tata kelola pemerintahan.

### 2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang harus menjadi perhatian di tahun berikutnya.

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

**Tabel 2.117**  
**Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka**

No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
1.	<b>Pendidikan</b>			
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	7,49 tahun	1. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 2. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. 3. Pendidikan gratis belum maksimal	1.Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah 2.Perubahan pola pikir dalam masyarakat tentang pentingnya pendidikan
1. 2	Angka Partisipasi Kasar			
1.2.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	104,03 %		Peningkatan partisipasi masyarakat



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
				terhadap akses dan layanan sekolah pada jenjang SD/MI
1.2.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	91,20 %	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs
1.3	Angka Partisipasi Murni			
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,03 %	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SD/MI yang tidak sesuai usia sekolah (7-12 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SD/MI
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81,16 %	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15) tahun	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs
1.4	Pendidikan dasar :			
1.4.1	Angka partisipasi Sekolah SD/MI	99,32 %		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	Angka partisipasi Sekolah SMP/MTs	99,04 %	Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
1.4.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	(SD) 1:195, (SMP) 1:453	Penyebaran sekolah yang belum merata	Pemerataan ketersediaan sekolah terutama dilingkungan pemukiman penduduk
1.4.3	Rasio guru/murid	(SD) 1:20, (SMP) 1:18	Distribusi guru proporsional belum maksimal	Penempatan guru sesuai kebutuhan dan bidang studi
1.5	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):			
1.5.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65,71 %	Masih kurangnya lembaga PAUD	Peningkatan lembaga PAUD
1.6	Angka Kelulusan:			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %		1. Peningkatan kualifikasi tenaga



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
				pendidik/ guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku-buku sesuai kebutuhan
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100 %		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku-buku sesuai kebutuhan
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	100 %		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	84,97 %	Adanya penduduk/ warga usia sekolah khususnya di usia 12-15 yang lebih memilih sekolah di Kabupaten Majalengka	Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	83,58 %	1. Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan Pendidikan 2. Masih kurangnya infrastruktur penunjang pendidikan	1. Mendorong mempercepat program pendidikan wajib 12 tahun 2. Peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88.40 %	1. Masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1. Meningkatkan kualifikasi guru minimal S1/D-IV
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
2.1	Angka Kematian Bayi	4,54	<ol style="list-style-type: none"><li>Masih adanya angka kematian bayi.</li><li>Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil</li><li>Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibu dan anak.</li><li>Memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap ibu hamil dan menyusui.</li></ol>
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	70,46 tahun	Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui PHBS
2.3	Persentase balita gizi buruk	0,13 %	rendahnya pemahaman orang tua terhadap gizi seimbang	<ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan pemahaman orang tua terhadap gizi seimbang</li><li>Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk</li></ol>
2.4	Rasio posyandu per 1000 balita	12,89 permil	Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu	Meningkatkan pemerataan posyandu
2.5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,14 permil	Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.	<ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan;</li><li>Koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas.</li></ol>
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,41	Kurangnya jumlah RS sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan belum maksimal	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
2.7	Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk	0,22 permil	1. Kurangnya jumlah dokter 2. Tidak meratanya sebaran dokter	1. Penambahan jumlah dokter 2. Perlu dibuat regulasi/ aturan agar penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
2.8	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,03 permil	1. Kurangnya tenaga medis 2. Tidak meratanya sebaran tenaga medis	1. Penambahan jumlah tenaga medis 2. Perlu dibuat regulasi/aturan agar penempatan tenaga medis disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	113,27 %	1. Kemampuan Bidan untuk mengidendiagnosis komplikasi masih rendah 2. Puskesmas belum mampu melakukan penatalaksanaan pelayanan standar	1. Peningkatan kapasitas bidan 2. Penguatan puskesmas
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,69 %	Adanya penduduk di luar Majalengka yang memilih melahirkan di Kabupaten Majalengka	1. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 2. Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	82,2 %	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat 2. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi	1. Mengkaji dan menganalisis data hingga merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas, identifikasi masalah dan mencari solusi



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	2. Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat Memperkuat kemitraan dengan lintas sektorterkait, Lembaga pendidikan, Organisasi
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	Masih adanya persepsi masyarakat yang keliru terhadap gizi buruk	1. Penanganan Medis secaraintensif 2. Penanganan Gizi Buruk ditingkat Rumah Tangga (PascaRawat) 3. Perlu regulasi tentang Ketenangaan 4. Penyediaan Buffer Stock Bahan Antisi pasi KLB Gizi Buruk
2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	93,50 %	1. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan Program Pengobatan Jangka Pendek 2. Pemahaman masyarakat tentang TB belum optimal	1. Melakukan intervensi ke Rumah Sakit untuk melakukan Program Pengobatan Jangka Pendek 2. Mengefektifkan AKMS (Advokasi, Komuni kasi, Mobili sasi Sosial) Program TB
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%		1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 2. Peningkatan PHBS



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
2.15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin	57,56 %	Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat)	Peningkatan ketersediaan obat dirumah sakit/ balai kesehatan masyarakat membuat jejaring antara rumah sakit dengan penyedia layanan daerah
2.16	Cakupan kunjungan bayi	127,53 %		1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana 2. Kesadaran masyarakat yang makin meningkat
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
3.1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	71,23 %	Rendahnya kualitas jalan	Meningkatkan kualitas jalan
3.2	Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	75,51 %	Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.	Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumberdaya air
3.3	Panjang jalan Kab. dalam kondisi baik (> 40 Km /Jam	654,40 Km	1. Rendahnya kinerja jaringan jalan 2. Terbatasnya jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya	1. Peningkatan kinerja jaringan jalan 2. Penambahan jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
3.4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	6,89	Belum terawasinya dengan baik pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat	Pendataan dan penertiban bangunan yang ber IMB yang harus sesuai dengan RTRW
3.5	Ketaatan terhadap RTRW	54,02 %	1. Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang 2. Belum tersedianya instrumen pengendalian keruangan yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang	1. Tertibnya pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman</b>			
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	376.106 KK	Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
4.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	69,76 %	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum optimalnya	1.Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak 2.Peningkatan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			PHBS oleh masyarakat.	pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.
4.3	Persentase Penduduk berakses air minum	80,92 %	1. Belum terpetakan nya wilayah yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum 2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum 3. Masih banyaknya pengguna air bersih khususnya masyarakat pedesaan yang belum terjangkau PDAM	1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum 2. Penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum 3. Perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
4.4	Rasio rumah layak huni	96,24 %	Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni	1. Peningkatan aksesibilitas melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan 2. Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
				standarisasi perijinan dalam membangun rumah
4.5	Rasio permukiman layak huni	99,85 %	Masih terdapat luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
4.6	Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,147 %	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya cakupan pelayanan sarana dan prasarana</li><li>2. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh</li><li>3. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas dan cakupan sarana dan prasarana.</li><li>2. Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh;</li><li>3. Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.</li></ol>
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
5.1	Angka kriminalitas yang tertangani		Kurangnya sosialisasi hukum Kurangnya aparat penegak hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan sosialisasi hukum</li><li>2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat</li></ol>



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,93	Belum berimbangnya polisi pamong praja dengan jumlah penduduk	Penempatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan
5.3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	19,61	Belum berimbangnya polisi pamong praja dengan jumlah penduduk	Penempatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan
5.4	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	7,97	Belum optimalnya peran masyarakat dalam memanfaatkan siskamling	Meningkatkan fasilitas dan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
5.5	Penegakan PERDA	91,5%		Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
5.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	26,9 %	1. Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas satpol PP 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol ptugas Satpol PP
5.7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100 %		Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
5.8	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	2.620 petugas	Belum berimbangnya jumlah Linmas dengan jumlah penduduk	Penempatan linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
5.9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	14,67 %	Luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan	Pembentukan UPTD/Posko tambahan pada wilayah-wilayah kecamatan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
5.10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	45,45	Jarak tempuh yang jauh ke wilayah kebakaran	Pembentukan UPTD/Posko tambahan pada wilayah-wilayah kecamatan
<b>6</b>	<b>Sosial</b>			
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	111	Terbatasnya anggaran	Optimalisasi anggaran
6.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	38,70 %	1. Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS 2. Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan sosial	1. Optimalisasi ketersediaan data PMKS yang akurat 2. Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,21 %	1. Masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja 2. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja	Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
7.2	Jumlah sengketa pengusaha, pekerja pertahun	15 kasus	Belum adanya regulasi daerah tentang ketenagakerjaan	Penetapan regulasi daerah tentang ketenagakerjaan dan implementasinya
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	16,89 %	1. Terbatasnya lapangan kerja 2. Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia	1. Pembukaan lapangan kerja baru 2. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,16 %	1. Tidak seimbang antara angkatan kerja dengan peluang kerja yang ada 2. Masih terbatasnya	1. Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			informasi pasar kerja 3. Efek pandemi covid 19	tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru 2. Mengintensifkan penyebarluasan lapangan kerja dan pengembangan system informasi pasar kerja melalui online sistem
7.5	Rasio ketergantungan	43,50 %	Naiknya presentase penduduk yang belum dan tidak produktif	Meningkatkan program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi/KB
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,54 %	Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya terutama di bidang politik, jabatan-jabatan public dan dibidang ekonomi	Mengefektifkan jaringan kelmbagaan dalam pengarusutamaan gender dan anak dalam berbagai produk perundang-undangan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar lain penguatan kerja PUG, Fungsionalisasi Focal Point PUG
8.2	Rasio KDRT	0,043	Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pembentukan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan peran serta kemitraan dan keterpaduan peran



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
				stakeholders dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8.3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan peran serta kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li><li>2. Meningkatkan peran dinas terkait melalui peningkatan kapasitas aparatur</li></ol>
<b>9</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
9.1	Presentase penanganan sampah	34,30	Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbunan sampah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari subernya dengan penerapan 3R (<i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>)</li><li>2. Meningkatkan optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan</li></ol>



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
9.2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	95,74	Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.	1. Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional; 2. Mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
9.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	47,14	1. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha/ kegiatan 2. Masih rendahnya tingkat ketaatan setiap usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah	1. Perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha / kegiatan 2. Pengoptimalan pemantauan dan pengawasan disetiap usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan limbah
9.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (poin)	88,71	1. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha/ kegiatan 2. Masih rendahnya tingkat ketaatan setiap usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah	1. Perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha / kegiatan 2. Pengoptimalan pemantauan dan pengawasan disetiap usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan limbah
9.5	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	95,74	Belum maksimalnya keberadaan sarana persampahan berupa TPS terutama di wilayah perdesaan dibandingkan pertambahan jumlah	Penambahan jumlah sarana persampahan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			penduduk	
<b>10</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	73,97	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
10.2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,86 %	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	99,20 %	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100 %		Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.5	Cakupan Penerbitan Kutipan Kartu Keluarga	100 %		Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Masih manualnya pengoperasian system informasi administrasi kependudukan (SIAK) sehingga penyajian database dalam bentuk bac up data dari SIAK	Peningkatan kapasitas apatur dalam penyusunan database kependudukan yang akurat



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Masih adanya penduduk yang belum memperbaharui dokumen kependudukannya terutama penduduk usia lanjut	1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kepedudukan 2. Identifikasi aparat desa/kelurahan terkait dokumen kepedudukan warganya
<b>11</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,17	1. Masih rendahnya kesadaran ber KB 2. Masih kurangnya partisipasi tokoh agama dalam penyuluhan KB	Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita dan remaja
11.2	Rasio akseptor KB	80,02	Kurangnya PUS muda yang ber KB	1. Melakukan pendataan PUS dengan peserta KB aktif dan memastikan PUS baru terlayani 2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita remaja
<b>12</b>	<b>Perhubungan</b>			
12.1	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	1:6,66	Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru	Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan
12.2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.510.000 jiwa	Belum tersedianya data base tentang tarikan dan bangkitan	Penyusunan masterplan atau survey kinerja lalu lintas, pergerakan bangkitan dan tarikan perjalanan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
12.3	Rasio ijin trayek	1:17	Masih ada kendaraan umum yang tidak memiliki ijin trayek	Meningkatkan kesadaran masyarakat (dalam hal ini sopir) memiliki ijin trayek
12.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	92,66 %	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian tepat waktu</li><li>2. Kurang memadainya operasional prosedur perawatan alat uji, Pengujian kendaraan bermotor mekanis</li><li>3. Kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor</li></ol>	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pengujian KIR angkutan umum
12.5	Jumlah Terminal Bis	7	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan terminal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal serta Peningkatan akseibilitas pelayanan transportasi khusus pada kawasan pedesaan</li><li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat</li></ol>
12.6	Pemasangan Rambu- rambu	45,59 %	Masih banyaknya jalan-jalan yang strategis dan rawan kecelakaan yang membutuhkan	Meningkatnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			rambu-rambu	
12.7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3.606.547 orang	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan pelabuan laut dan terminal	Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi ke daerah Tersedianya sarana dan prasarana yang layak sehingga banyak masyarakat lebih memilih angkutan umum
12.8	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	757.375 orang	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan terminal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal</li><li>2. Peningkatan aksesibilitas</li><li>3. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak sehingga banyak masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum</li></ol>
<b>13</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
13.1	Persentase koperasi aktif	44,78	Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi</li><li>2. upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah terbentuk</li></ol>
13.2	Usaha Mikro dan Kecil	74.432	Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang	Adanya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha dan penyusunan potensi



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			dan potensi usaha	serta peluang usaha yang lengkap
<b>14</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
14.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	11.302	Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi investasi	Adanya regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi dan penyusunan potensi serta peluang investasi yang lengkap
14.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	15.597.109,38 juta	Masih kurangnya regulasi dan infrastruktur	Meningkatkan promosi investasi dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>			
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 kali	1. Masih kurangnya fasilitas pemerintah 2. Rendahnya partisipasi masyarakat	Adanya agenda yang tersistematis
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	240 unit	Masih banyak warisan budaya yang belum terdaftar	Inventarisasi warisan budaya
<b>16</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
16.1	Jumlah gedung olahraga	26	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
16.2	Jumlah organisasi pemuda	63	Belum terpolanya pemberdayaan pemuda	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemberdayaan pemuda dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda	Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktivitas dan prestasi
16.4	Lapangan olahraga	305	Rendahnya kualitas lapangan olahraga	Ketersediaan lahan dan melibatkan pihak swasta peningkatan pemeliharaan dan kualitas lapangan olahraga
<b>17</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>			
17.1	Pertumbuhan PDRB	6,63	Pertumbuhan ekonomi masih didominasi sector pertanian terutama sub sektor tanaman pangan dan perikanan	1. Peningkatan dan kemampuan daya beli masyarakat 2. Terbukanya kesempatan kerja 3. Peningkatan kegiatan ekonomi
17.2	PDRB Per kapita ADHB	Rp. 37.778 ribu	1. Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing masing sektor 2. Kurangnya lapangan pekerjaan 3. Ada kebocoran wilayah (kecenderungan belanja diluar Kabupaten)	1. Membuka lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan nilai Tambah 3. Mengembangkan sektor industri pengolahan
17.3	Persentase penduduk miskin	11,94 %	1. Rendahnya tingkat penghasilan 2. Kurangnya lapangan kerja baru dan akses lapangan	1. Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			pekerjaan	2. Percepatan penciptaan lapangan usaha
17.4	PDRB Harga Berlaku (juta rupiah)	Rp. 34.245.617,82	1. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. 2. Faktor konsumsi daerah yang tinggi dibanding faktor investasi menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang. 3. Kurangnya industri pengolahan	1. Membuka lapangan kerja baru 2. Meningkatkan nilai tambah 3. Mengembangkan sektor industri pengolahan
17.5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	99		Semakin baiknya tata kelola pemerintahan desa
17.6	Jenis dan jumlah bank dan cabang	105	Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap kecamatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa bank
17.7	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 Perda	Belum efektifnya pelaksanaan Perda yang mendukung iklim usaha	Efektifitas pelaksanaan Perda yang mendukung iklim usaha
<b>18</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
18.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7,58	Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa	Pembinaan terhadap LPM agar meningkatkan kelompok binaan
18.2	PKK aktif	100%		Meningkatkan pembinaan/ supervisi terhadap Kader PKK



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
18.3	Posyandu aktif	100%		Meningkatkan kapasitas SDM kader dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai
18.4	Status Desa		1. Program/kegiatan masih belum tepat sasaran dan belum ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan desa 2. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya	1. Memperkuat upaya memfasilitasi dukungan kemajuan Desa menuju Desa Mandiri 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal desa
<b>19</b>	<b>Statistik</b>			
19.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		
19.2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada		
<b>20</b>	<b>Kearsipan</b>			
20.1	Pengelolaan arsip secara baku	26,79 %	Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas
20.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	1. Masih terbatasnya SDM 2. Belum memiliki SDM yang profesional dalam bidang arsip	Pelaksanaan diklat kearsipan
<b>21</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
21.1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website	100%	Keberadaan web site milik pemerintah daerah dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah belum aktual	1. Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah teraktual 2. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas web site pemerintah daerah
21.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	23%	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi
<b>22</b>	<b>Perpustakaan</b>			
22.1	Jumlah perpustakaan	1.753	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan	sarana dan prasarana yang memadai
22.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	24.254 orang	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Menumbuhkan minat baca masyarakat
22.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33.843 buku	Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang	Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
<b>23</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>23.1</b>	<b>Pertanian</b>			
23.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	773.775 ton	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan</li><li>2. Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan</li><li>3. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penggunaan benih bermutu</li><li>2. Penerapan teknologi pertanian</li><li>3. Penggunaan sarana produksi yang seimbang</li><li>4. Peningkatan infrastruktur pertanian</li></ol>
23.1.2	Cakupan bina kelompok petani	2.363 kelompok	Masih terbatasnya akses dalam melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok	Peningkatan Sumber Daya Petani / Kelompok Penyediaan modal usaha pertanian
<b>23.2</b>	<b>Pariwisata</b>			
23.2.1	Kunjungan wisata	818.543 wisatawan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata</li><li>2. Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata</li><li>3.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Promosi media cetak</li><li>2. Dukungan swasta bidang pariwisata</li></ol>
23.2.2	Produksi perikanan	9.069 ton	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan	Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kawasan produksi perikanan dan peternakan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
23.2.3	Konsumsi ikan	21,69 kg	Belum seimbangnya antara produksi dengan kebutuhan daging ikan	Peningkatan produksi perikanan
<b>23.3</b>	<b>Perdagangan</b>			
23.3.1	Jumlah Pasar Pemda	5 pasar	Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar pemerintah daerah kondisinya kurang memadai	Peningkatan kualitas pasar pemda
23.3.2	Jumlah Pasar Desa	39 pasar	Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar desa kondisinya kurang memadai	Peningkatan kualitas pasar desa
<b>23.4</b>	<b>Perindustrian</b>			
23.4.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	23,85 %	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya industry dan keterbatasan volume produksi sektor industri	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Industry Peningkatan volume produksi
23.4.2	Pertumbuhan IKM per tahun	5,63 %	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan wawasan pelaku IKM dalam hal produksi, peralatan, manajemen, akses permodalan dan pemasaran.</li><li>2. Keterbatasan daya kreasi dan inovasi</li><li>3. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku IKM</li><li>2. Perluasan pasar produk hasil produksi IKM</li><li>3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li></ol>



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
<b>23.5</b>	<b>Perencanaan</b>			
23.5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
23.5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
23.5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
<b>23.6</b>	<b>Pengawasan</b>			
23.6.1	Persentase pelanggaran pegawai		Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN	1. Pengawasan oleh Inspektorat 2. Sosialisasi aturan terkait Disiplin Pegawai
<b>23.7</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
23.7.1	Peningkatan jamaah yang beribadah di tempat ibadah	100 %	terjadi pandemi covid sehingga menyebabkan pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah yang bersifat massal	Penerapan prokes ketat dalam beribadah
<b>23.8</b>	<b>Kepegawaian</b>			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2022	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
23.8.1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	34,44 %	Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Pelatihan bagi Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
23.8.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,04%	Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pelatihan bagi Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
<b>23.9</b>	<b>Keuangan</b>			
23.9.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan	penanaman yang kuat mengenai komitmen organisasi mulai dari kepala daerah hingga pegawai teknis peningkatan kinerja SDM yang tersedia dengan melakukan berbagai macam pendidikan dan pelatihan pemanfaatan sistem informasi yang memadai untuk menunjang tugas keuangan pemda

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2018-2023, maka isu strategis



yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

### **1. Masih Rendahnya Pembangunan Manusia**

Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Memasuki tahun 2021, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,33 persen dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 11,94 persen.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Majalengka terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang mencapai 1,3 juta jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Majalengka mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19.

## **2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami penurunan drastis meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,75%.

Hal yang sama terjadi pada realisasi investasi, terjadi penurunan nilai investasi yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara serta wilayah di Indonesia yang berdampak pada dinamika ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan menimbulkan keraguan pasar dalam berinvestasi. Namun di tahun 2021 hingga 2022 nilai realisasi investasi kembali berangsur mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas



pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten, kedepannya diyakini akan ditunjang juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai start point pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten ditandai dengan predikat Kabupaten sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan pentahelix yakni akademisi (Academician), bisnis (Business), komunitas (Community), pemerintah (Government), dan media atau disingkat ABCGM.

Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya lips service. Diharapkan pula baik pada proses dan outcome dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara direct dan indirect akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai

polar baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten di masa yang akan datang.

Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya.

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi yang menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Majalengka sehingga dapat menekan kesenjangan antar wilayah merupakan perwujudan dari konektivitas antar wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan yang berasal dari APBD Kabupaten Majalengka maupun dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Konektivitas yang rendah menyebabkan daya saing Kabupaten Majalengka menjadi rendah pula karena konsentrasi pengembangan hanya terjadi pada wilayah tertentu saja. Hasil pertanian maupun perdagangan kurang optimal karena ada hambatan dalam distribusi keseluruhan wilayah Kabupaten Majalengka. Hambatan lain yang disebabkan kurang optimalnya konektivitas antar wilayah adalah pertumbuhan investasi yang kurang merata.

### **3. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat

perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antarlain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka, kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perizinan dan profesionalisme aparturnya belum berjalan efektif dan optimal namun Kabupaten Majalengka secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Majalengka tahun 2022 dengan **kategori “CC”**, capaian ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyelesaikan permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

## **2.6 Inovasi**

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Majalengka diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Majalengka. Untuk mencapai IKU tersebut, dirumuskan program-program strategis dan inovatif dalam kerangka pencapaian Majalengka Raharja. Inovasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah diharapkan berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat Majalengka, serta mendorong peningkatan IKU sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Majalengka.



**Tabel 2.118**  
**Daftar Inovasi yang dilaksanakan oleh**  
**Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka**

No.	OPD Yang Terkait	Judul Inovasi	Urusan Pemerintahan
1.	DPMTSP	Implementasi Pelayanan Perizinan New Normal	Penanaman Modal
		Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Perizinan dan Investasi (SIMPETA)	Penanaman Modal
		SIDAKU RAHARJA	Penanaman Modal
2.	Bappedalitbang	Penyusunan Dokumen Renja Kecamatan Melalui Aplikasi e-RENJA	Perencanaan
		Ekosistem Online Teknologi Informasi Kreatif (EKSOTIK)	Perencanaan
3.	Dinkes	Puskesmas Nganjang ka Imah	Kesehatan
		MEKAR MEMBARA (Masyarakat Bugar Menuju Majalengka Bagja Raharja)	Kesehatan
4.	Bakesbangpol	SI PERI MADU (Sistem Penerbitan Rekomendasi, Penelitian dan Riset Masyarakat Terpadu)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
		SIPERMAS (Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
5.	DKUKM	Karirhub	Tenaga Kerja
6.	Dinas Lingkungan Hidup	SIPANDU ONLINE	Lingkungan Hidup
		SILIH ASUH (SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP – ADUAN MASYARAKAT DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP)	Lingkungan Hidup
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	Sistem Informasi Prasarana Sarana utilitas Perumahan SIPSUPER	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8.	BKPSDM	Sistem Informasi Rancangan Gawe Hade (SIRANCAGE)	Kepegawaian
		Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kepegawaian Elektronik (SIMPEL)	Kepegawaian
		Sistem Administrasi Manajemen ASN Majalengka Raharja (SAMMARA)	Kepegawaian
9.	Disparbud	PENINGKATAN KAPASITAS BAHASA ASING (PAS BISING)	Pariwisata
		"Pangbeberah Manah Hiburan Di Imah" (Pemajuan Kebudayaan Melalui Pagelaran Virtual Sebagai Upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan dengan Tatanan Baru).	Pariwisata
		Festival Kota Angin	Pariwisata
		PICNIC VIRTUAL	Pariwisata
		Don't Panic Go Picnic	Pariwisata



10.	Bapenda	Konsumen yang Cerdik Memilih Septik	Pariwisata
		Mari bijak memanfaatkan fasilitas penginapan dalam era new normal	Pariwisata
		DITABOX - JURTAX ( DIPASANG TAPPING BOX - PAJAK KEJUJURAN )	Keuangan
		SIPP (SISTEM INFORMASI PATRIOT PAJAK)	Keuangan
		Gebyar Pamer (Gerakan Bayar pajak Mendekati Rakyat)	Keuangan
		PARA SATTRIA ZONITA PAMOR	Keuangan
		PERJAKA (Pelayanan Responsif Pajak Raharja)	Keuangan
		GEBYAR JAMU (Gerakan Edukasi Bayar Pajak Melalui Lagu)	Keuangan
		GEBYAR PD AJA (Gerakan Bayar Pajak Dimana Aja)	Keuangan
		TULUS BAPER (Tujuh Juni Lunas Bayar PBB P2 Berhadiah)	Keuangan
		KAPE ASIK (KANTOR PELAYANAN ASIK)	Keuangan
		LAMAN ASIK (LAYANAN MANDIRI AKUNTABEL SOPAN INFORMATIF KREATIF)	Keuangan
		GEBYAR CANTIK (Gerakan Bayar Cepat Tagihan Listrik)	Keuangan
		NGOPI ENAK ( Ngobrolin Pajak Intensif dengan Komunitas Pajak )	Keuangan
11.	Dinas Perhubungan	Aplikasi SI K1LAT Mobile (Aplikasi Layanan Online dan Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor )	Perhubungan
12.	Dispora	SIMAK INFORAGA (Media Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Kabupaten Majalengka)	Kepemudaan Dan Olahraga
13.	Disdukcapil	PADU JEMPOL (Pelayanan Terpadu Jemput Bola)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
		LADU KETAN (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kecamatan)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
		SILANCAR (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat Dari Rumah)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
		SAKOCEPAT (Sistem Antrian KTP Elektronik Cepat Dapat)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
		ASIK AKU PUNYA KTP-EL (Aku Senang Ada Kunjungan untuk Pelayanan KTP Elektronik)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan



14.	Disdik	BADAR M365 (Belajar Daring Microsoft 365)	Pendidikan
		MARI KEPO (Majalengka Lestari dengan Kolaborasi, Edukasi, Produksi dan Optimalisasi)	Pendidikan
		GELORA MAJALENGKA (Gerakan Literasi Orang Majalengka)	Pendidikan
15.	Disperdagin	SATRIA TERA (Julukan untuk KOMUNITAS PENCINTA TERA)	Perdagangan
		GETAR LAGUKU (Gerakan Mantap Sadar Tera Lewat Lagu Kreasiku)	Perdagangan
		LENTERA (LAYANAN ELEKTRONIK NOTIFIKASI TERA)	Perdagangan
		PERI MERAK (Pelayanan Tera Asik Mendekati Rakyat)	Perdagangan
		T.GOAL (TERA GO MILENIAL)	Perdagangan
		TERA AMBYAR (TERA GAMPANG BAYAR)	Perdagangan
		OOTW "Obrolan, kOordinasi dan fasiliTasi Wirausaha"	Perdagangan
		Rumah Kemas Reborn	Perdagangan
16.	BPBD	Sistem Informasi Majalengka Tangguh Bencana SIMANGGA	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
17.	RSUD Majalengka	Digital Claim RSUD Majalengka	Kesehatan
18.	RSUD Cideres	Paguyuban Thalassemia Sehat BestIE (Senang Hati Bersama Thalassemia, Informatif dan Edukatif)	Kesehatan
19.	Kecamatan Argapura	KADER MARAWIS ( KADER Membangun ARgapura Wisata Sehat )	Pariwisata
		Layanan NATANGGA (Ngariksa datang ka warga)	Sosial
20.	Kecamatan Leuwimunding	BECAKU GINDING ( BEBAS BACA BUKU GERAKAN INOVASI LEUWIMUNDING )	Pendidikan
		PEPELING LEUWIMUNDING (PETUGAS PELAYANAN KELILING LEUWIMUNDING)	Sosial
21.	Kecamatan Cingambul	LAPDU ONLINE (Laporan Kependudukan Online) Kecamatan Cingambul	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
22.	Kecamatan Kasokandel	INOVASI LABU KABELI (LAPORAN BULANAN KEPENDUDUKAN BERBASIS LINK INTERNET) PADA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM KECAMATAN KASOKANDEL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
23.	Kecamatan Sindangwangi	LAPOR WANGI (Layanan Pengaduan Aspirasi Masyarakat Sindangwangi)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
24.	Kecamatan Sukahaji	KaPe Sale Ekrafku	Perdagangan
		Ekonomi Kreatif Sukahaji "EKRAFSU"	Perdagangan
25.	Kecamatan Maja	SEMENDA (SEPULUH MENIT TANDA TANGAN) DI KECAMATAN MAJA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan



26.	Kecamatan Panyingkiran	SIPELAMAR (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat) Kecamatan Panyingkiran	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
		APLIKASI ARSIP SURAT KECAMATAN PANYINGKIRAN (SIASMARA)	Kearsipan
27.	Kecamatan Malausma	SILAPAT MADU (Sistem Laporan Cepat Malausma Terpadu)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		SIBAPA MATUT (Sistem Bayar Pajak Malausma Tanpa Uang Tunai)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28.	Kecamatan Palasah	BANG JAMIUN (Tabungan pajak bumi dan bangunan ) Kecamatan Palasah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Palasah Ramah BuSui	Kesehatan
29.	Kecamatan Sindang	SIKABAYAN ( Sistem Keamanan Disabilitas dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan )	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
30.	Kecamatan Lemasugih	STAN PINAS PBB (STANDAN PISANG LUNAS PBB) KECAMATAN LEMAHSUGIH	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31.	Kecamatan Ligung	Penguatan Layanan Informasi di Kecamatan Ligung (PENA SIMAUNG)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
32.	Kecamatan Jatitujuh	SISTEM INPORMASI LAHIR, MATI, PINDAH, DATANG BERBASIS ANDROID DAN BERMUTU ( SILAMPID BERSATU )	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penelitian dan Pengembangan
33.	Kecamatan Banjaran	SIAPDOL (Sistem Absensi Perangkat Desa Online) Kecamatan Banjaran	Kepegawaian
34.	Kecamatan Kadipaten	PENCERAMAH ( Pelayanan Cepat Ramah dan Mudah )	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		SISMAKA (Sistem Informasi dan Saran Masyarakat Kadipaten)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
35.	Kecamatan Majalengka	SIANTAR PBB ( SISTEM INFORMASI CAPAIAN TARGET ) PBB	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36.	Kecamatan Cigasong	Lapak Bagja	Perdagangan

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak *an sich* yang artinya bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh aspek yang menjadi pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek-aspek pendorong tersebut contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya, infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan.

Pada bab ini memuat substansi yang memiliki keterkaitan yang jelas dengan bab-bab berikutnya dalam mengimplementasikan

program dan kegiatan serta pencapaian berbagai indikator kinerja capaian tahun 2024 yang harus terpenuhi.

### **3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Awal Tahun 2023 dan Prediksi Tahun 2024**

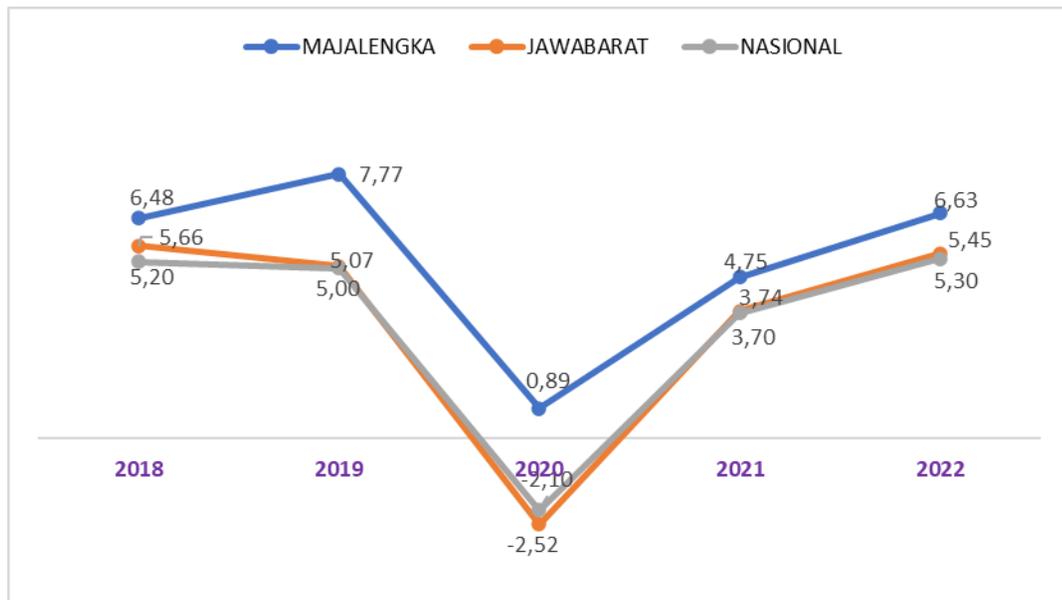
Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022, awal tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

##### **3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 4,75%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2022 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE kedua adalah Kabupaten Karawang (6,31%) dan urutan ketiga adalah Kota Cimahi (5,92%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, yang mampu tumbuh sebesar 15,01%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (tumbuh 13,34%), lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 13,28%), serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 11,45%), sementara lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,78 persen, 9,72 persen dan 9,61 persen.

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### 3.1.1.2 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

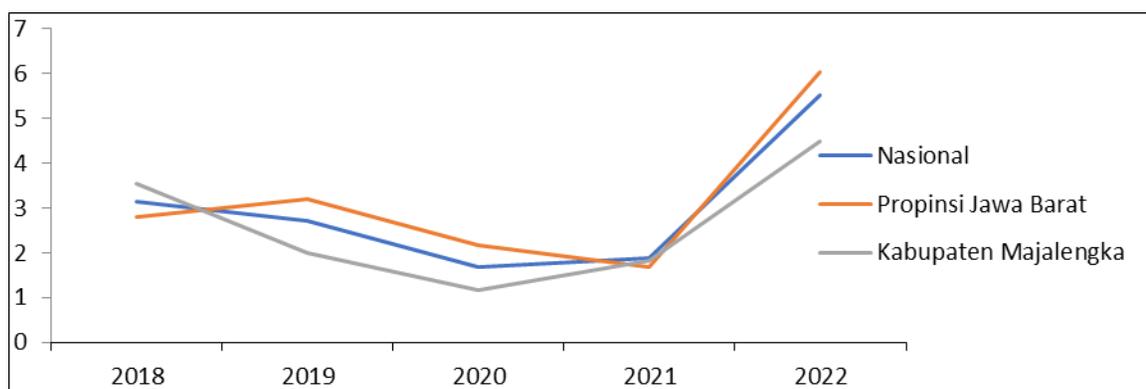
Selama ini nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran Inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon.

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan survey Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Sehingga setelah pelaksanaan kedua survey tersebut, direncanakan pada tahun 2024 BPS Kabupaten Majalengka baru akan menghitung dan mengeluarkan nilai Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024.

**Tabel 3.1****Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

No.	Wilayah Inflasi	Inflasi Tahunan (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51
2	Jawa Barat	2.8	3.21	2.18	1.69	6.04
3	Kota Cirebon	3.54	2	1.16	1.81	4.48

Sumber: BPS Kota Cirebon, Tahun 2023.

**Gambar 3.2****Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Berdasarkan data yang dirilis KPw BI Cirebon, pada awal tahun 2023, daerah Ciayumajakuning yang didalamnya termasuk Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm), atau inflasi tahun kalender sebesar 2,23% (ytd) sehingga inflasi secara tahunan tercatat sebesar 4,57% (yoy).

Adapun penyebab inflasi di wilayah tersebut disebabkan oleh peningkatan harga pakan yang menyebabkan kenaikan pada harga

telur dan daging ayam ras. Selanjutnya, penyebab peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh kondisi pasokan.

Beberapa bahan pokok yang mengalami inflasi tertinggi pada awal tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Telur Ayam Ras (0,10)
2. Daging Ayam Ras (0,06)
3. Bawang Merah (0,03)
4. Ban Luar Motor (0,01)
5. Cabai Merah (0,01)

### 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 66,21%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang

semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar 4,16% menurun sebesar 1,55% dari tahun 2021 sebesar 5,71%.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kabupaten Majalengka	4,95	4,37	5,48	5,71	4,16
Jawa Barat	8,17	7,99	7,69	9,82	8,31
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

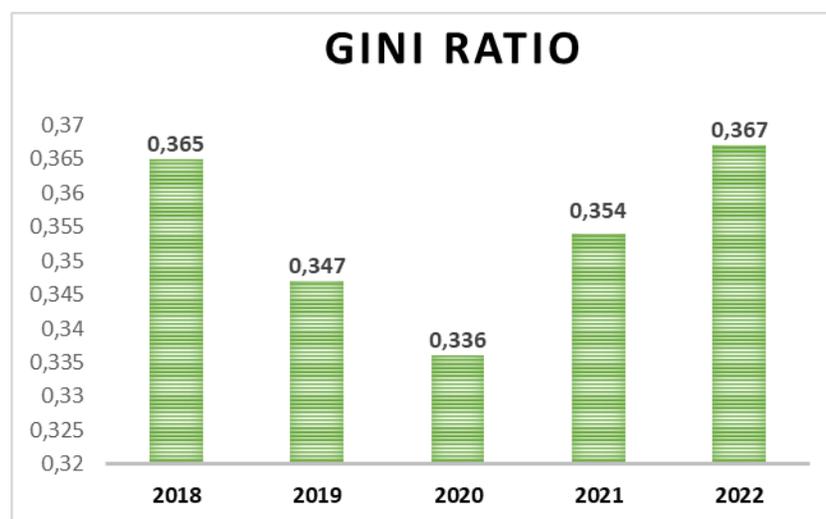
#### **3.1.1.4 Gini Ratio**

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio  $< 0,3$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq$  Gini Ratio  $\leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio  $> 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 masih tergolong sedang (0,367). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,417) dan Nasional (0,381) walaupun masih dalam kategori sedang.

**Gambar 3.3**  
**Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	0,365	0,347	0,336	0,354	0,367
Jawa Barat	0,407	0,402	0,403	0,412	0,417

Wilayah	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	0,384	0,380	0,381	0,381	0,381

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

### 3.1.1.5 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selama kurun waktu 2018-2022, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43 dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, namun pada tahun 2022 turun menjadi 11,94%. Angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (8,06%) dan Nasional (9,57%).

**Tabel 3.4**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	129.290	121.060	138.200	151.100	147.120
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama kurun waktu 2018-2022, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43 dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, namun pada tahun 2022 turun menjadi 11,94%. Angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (8,06%) dan Nasional (9,57%).

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Angka Kemiskinan (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94
Jawa Barat	7,25	6,82	7,88	8,40	8,06
Nasional	9,66	9,22	9,78	9,71	9,57

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023

### 3.1.1.6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024

Seiring dengan tercapainya herd immunity pada masyarakat, perekonomian Majalengka pada tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2024, perekonomian Majalengka diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan,

dimana perekonomian Majalengka tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan pembangunan Jalan TOL Cisumdawu dan kembali beroperasinya Bandara Internasional Kertajati telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian.

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka**

NO	INDIKATOR	REALISASI 2022	PROYEKSI TAHUN 2024
1.	Nilai PDRB-ADHB (Milliar rupiah)	37.778,84	38.555,60
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,56	68,9
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,63	6,72
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,16	4,44
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,94	10,56
6.	Indek Gini (Poin)	0,367	0,329
7.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	28.289	29.350

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

#### A. Tantangan Ekonomi Global

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2023, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%. Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk 2023 sebetulnya mengalami revisi ke atas sebesar 0,4% dibanding proyeksi pada Januari 2023 yang sebesar 1,7%. Kendati begitu, untuk 2024 proyeksi mengalami revisi ke bawah sebesar minus 0,3% karena tekanan dari panjangnya pengaruh suku bunga acuan yang tinggi.

Guncangan sektor perbankan juga berkontribusi terhadap kondisi keuangan yang lebih ketat, akan berlanjut hingga 2024. Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih

dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin eskalatif. Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, eskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi. Beberapa rekomendasi kebijakan dari IMF untuk negara-negara dalam menavigasi perekonomian global yang semakin menantang antara lain: (1) Kebijakan pengetatan moneter dapat berlanjut dengan tetap menjaga stabilitas keuangan; (2) Dukungan fiskal terus diprioritaskan untuk melindungi kelompok paling rentan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (3) Pentingnya penguatan kebijakan struktural dan kerja sama multilateral demi mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien. Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan global 2024 menjadi 2,4% dari perkiraan pada Januari sebesar 2,7%. Sebagai dampak berkelanjutan dari kebijakan moneter yang lebih ketat, terutama dalam mengurangi investasi bisnis dan residensial.

## **B. Tantang Ekonomi Nasional**

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% pada 2023 lebih rendah dari realisasi pada 2022 sebesar 5,3%. Dalam laporan itu, Bank Dunia juga memprediksi ekonomi Indonesia di 2024 tumbuh stagnan di 4,9%, kemudian di 2025 tumbuh 5%.

## **C. Tantang dan Prospek Ekonomi Kabupaten Majalengka**

Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi

COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 meliputi:

1. Penormalan perekonomian;
  2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka;
  3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
  4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah
- Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
  - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
  - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi setelah pembangunan Tol Cisumdawu selesai dan beroperasionalnya kembali Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati
2. Tantangan pada sektor industri:
  - a. Mendorong perwujudan industri dan kawasan industri
  - b. Kemitraan industri besar dan IKM
3. Tantangan pada sektor UMKM:
  - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM
  - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Majalengka melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas
  - c. Memanfaatkan ruang publik yang telah dibangun yang telah dilengkapi dengan tempat usaha
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
  - a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun
  - b. Promosi destinasi pariwisata baru
  - c. Pengembangan Desa wisata
  - d. Percepatan Sertifikasi CHSE
5. Tantangan pada sektor perdagangan:



- a. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok
  - b. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
6. Tantangan pada sektor pangan:
- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau
  - b. Perlindungan harga di tingkat produsen
  - c. Ketahanan pangan menghadapi dampak badai La Nina
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka
  - b. Penempatan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka

Prospek perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan peningkatan persentase vaksinasi dosis kedua maupun dosis *booster*.

Secara umum kinerja perdagangan pada tahun 2024 membaik. Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2024 diharapkan telah dapat dilaksanakan. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (ecommerce).

Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar. Secara umum, perekonomian pada tahun 2024 akan lebih baik daripada tahun 2023, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 akan sama atau lebih besar dari 6 persen. Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah teribusikan secara merata di seluruh Majalengka, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi COVID19 meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus pandemi COVID-19 akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2024,

perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Majalengka tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Perekonomian**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR	REALISASI 2022	PROYEKSI TAHUN 2024
1.	Nilai PDRB-ADHK (triliun rupiah)	24,227	27,584
2.	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	6,63	6,72
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,16	4,44
4.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,94	10,56
5.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	28,289	29,350

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024. Proyeksi PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	SEKTOR	REALISASI	PROYEKSI	
		2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,68	0,83	0,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0,07)	(2,08)	(2,02)
3.	Industri Pengolahan/Manufacturing (Residual)	13,34	8,79	18,47
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,45	(4,67)	3,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,01	21,54	(1,18)
6.	Konstruksi	0,58	7,39	3,71

NO.	SEKTOR	REALISASI	PROYEKSI	
		2022	2023	2024
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,94	8,31	2,22
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,78	3,46	8,88
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,72	4,18	4,78
10.	Informasi dan Komunikasi	5,44	5,86	7,80
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	5,20	7,31
12.	Real Estat	6,19	19,20	4,63
13.	Jasa Perusahaan	9,61	11,38	6,15
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,07)	14,54	0,90
15.	Jasa Pendidikan	5,20	12,62	7,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	2,45	7,15
17.	Jasa lainnya	13,28	11,54	8,70
<b>PDRB</b>		<b>6,63</b>	<b>6,69</b>	<b>6,72</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Indikator Pembangunan**

NO.	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,56	68,90
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,63	6,72
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,16	4,44
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,94	10,56
5.	Indek Gini (Poin)	0,357	0,329
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	1,57

NO.	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2024
	(LPP) (%)		
7.	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	28,289	29,350

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

#### 3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan

#### 3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun

2024 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
  - b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
  - c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
  - d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
  - e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
  - f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
  - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
  - i. Peningkatan perhutanan sosial;
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
  - a. Perbaiki tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
  - b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
  - c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
  - a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
  - b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
  - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
  - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;

- e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
  - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
  - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
  - c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
  - d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
  - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
  - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja;
  - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
  - h. pembentukan wirausaha baru;
  - i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
  - b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
  - c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata

### **3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka**

Dalam struktur PDRB secara *time series* di atas, memperlihatkan bagaimana dari segi laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha sektor yang stabil berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Karena dampak Covid-19 beberapa sektor mengalami penurunan yang signifikan akibat terbatasnya pertemuan secara luring dan terbatasnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyumbang pertama adalah sektor informasi dan komunikasi untuk

tahun 2020 sebesar 31,97% dikarenakan banyak yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) serta kegiatan pendidikan dari sekolah maupun kampus pun dilakukan secara daring. Penyumbang kedua pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 17,97% dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dikarenakan pembatasan kegiatan tatap muka dan kegiatan mobilitas.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan dibumbui juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*), bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPD, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Terkait hal tersebut maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan.

2. Sektor Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian melalui Pengembangan prasarana dan sarana dan Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan .

3. Sektor Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Aksesibilitas Pangan dan menjaga stabilitas harga

4. Sektor Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan.

5. Sektor Industri

Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan

6. Sektor Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.

7. Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan

- penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

### **3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Karena adanya dampak ekonomi dari Covid-19 menjadikan kemampuan fiskal Kabupaten Majalengka dari tahun 2019-2021 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2022 terdapat kenaikan namun karena adanya pandemi Covid-19 maka pada tahun 2023

terdapat penurunan. Peningkatan kemampuan fiskal memang sangat bervariasi sesuai pendapatan daerah yang sangat majemuk berasal dari berbagai sumber pendapatan. Kabupaten Majalengka sampai saat ini berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai kekuatan utama dalam mengarungi pelaksanaan pembangunan setiap periode atau setiap tahunnya, namun imbas dari pandemi Covid-19 kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD malah berkurang sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka harus mampu melakukan koordinasi secara intensif dan mencari sumber-sumber pendapatan yang bersifat transfer, baik dari transfer Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendanai pembangunan terutama yang sudah direncanakan dalam RPJMD.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan transfer yang menjadi peluang sebagai tambahan pendanaan untuk pembangunan, yaitu dari Dana Insentif Daerah (DID). Salah satu syarat memperoleh DID diantaranya adalah ditetapkannya Kabupaten Majalengka dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan terakhir untuk pengelola keuangan Tahun 2022 telah diperoleh WTP sehingga Kabupaten Majalengka berturut-turut berpredikat WTP sebanyak 10 kali.

Sumber pendapatan lain yang bisa diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah melalui Pinjaman Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pinjaman Daerah adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pada prinsipnya peraturan Pemerintah tersebut memfasilitasi setiap Pemerintah Daerah untuk mendorong keberdayagunaan unsur Pembiayaan yang terdapat pada struktur APBD.

Alternatif berikutnya sebagai sumber pendapatan adalah pemanfaatan atau pencairan Dana Cadangan investasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan dana cadangan untuk investasi berdasarkan Peraturan Daerah Majalengka Nomor 5 tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka.

Sebagaimana penjelasan awal, pendapatan daerah Kabupaten Majalengka seyogyanya harus mampu mengembangkan pola

pendanaan multi pihak sehingga berujung pada peningkatan PAD dan adanya efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Asumsi tadi merupakan hal baru dari asumsi-asumsi perhitungan pendapatan yang biasa secara regular dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun perhitungan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka yang bersifat regular tersebut yaitu asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: 1) Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional dan provinsi; 2) Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; 3) Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; 4) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan 5) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 diarahkan pada.

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/Lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pendapatan, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;

2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan pendapatan Tahun 2022-2023, dan proyeksi tahun 2024, dituangkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2025**

Uraian	Realisasi	Target	Proyeksi	
	2022	2023	2024	2025
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.005.190.749.122</b>	<b>3.026.333.611.064</b>	<b>3.404.966.896.764</b>	<b>3.524.140.738.151</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>522.458.294.586</b>	<b>582.764.657.817</b>	<b>587.051.287.248</b>	<b>607.598.082.302</b>
Pajak Daerah	156.740.101.171	192.515.320.500	184.800.274.949	191.268.284.572
Retribusi Daerah	19.931.473.893	18.049.318.726	16.302.289.543	16.872.869.677
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.409.795.269	9.303.000.000	9.353.516.206	9.680.889.273
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	338.376.924.253	362.897.018.591	376.595.206.550	389.776.038.779
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.470.049.386.684</b>	<b>2.442.968.762.247</b>	<b>2.817.915.609.516</b>	<b>2.916.542.655.849</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.165.144.743.248	2.094.864.335.874	2.119.645.475.501	2.193.833.067.144
Pendapatan Transfer Antar Daerah	304.904.643.436	348.104.426.373	698.270.134.015	722.709.588.706
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>12.683.067.852</b>	<b>600.191.000</b>	-	-
Pendapatan Hibah	12.683.067.852	600.191.000	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, saat ini Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan

kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, Kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2024 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarnya yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Yaitu Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya.

Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pilihan;
- d. unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. Unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. unsur kewilayahan; dan
- h. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
2. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
5. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas;
6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal

- 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
8. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  9. Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  10. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
  11. Pemenuhan anggaran untuk dukungan kelancaran proses dan pelaksanaan Pemilu
  12. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Pada proses penganggaran, penyesuaian belanja dan target kinerja dimungkinkan dan perlu dilakukan sepanjang seluruh upaya Pemerintah Daerah dalam realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.103.038.694.344. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.11**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025**

URAIAN	REALISASI		TARGET 2023 (APBD)	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025
	2021	2022			
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	1.195.391.829.485	1.199.383.502.524	1.304.503.765.396	1.336.070.347.391	1.382.832.809.550
Belanja Barang dan Jasa	710.160.988.874	776.033.932.607	811.824.616.790	828.951.895.324	857.965.211.660
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	45.940.749.429	47.392.283.830	53.452.723.709	98.043.571.400	65.652.553.000
Belanja Bantuan Sosial	6.287.800.000	13.688.600.000	9.462.000.000	1.280.000.000	9.162.000.000
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.957.781.367.788</b>	<b>2.036.498.318.961</b>	<b>2.179.243.105.895</b>	<b>2.315.612.574.210</b>	<b>2.315.612.574.210</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Tanah	3.160.673.641	4.308.386.920	6.086.097.759	25.472.586	8.185.651.997
Belanja Peralatan dan Mesin	100.872.539.495	75.534.381.670	124.061.471.747	312.681.834.851	323.625.699.071
Belanja Gedung dan Bangunan	207.768.693.910	80.357.568.073	80.145.453.826	108.145.941.634	111.931.049.591
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	258.339.704.166	249.929.058.518	162.572.798.065	255.140.124.060	264.070.028.402
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.583.483.613	9.834.378.83200	11.143.192.610	11.987.035.165	12.188.938.638
Belanja Aset Lainnya	-	-	383.610.006	150.000.000	383.610.006
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>590.725.094.825</b>	<b>419.963.774.013</b>	<b>384.392.624.013</b>	<b>720.384.977.705</b>	<b>720.384.977.705</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	29.168.231.234	9.374.622.131	11.820.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>29.168.231.234</b>	<b>9.374.622.131</b>	<b>11.820.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>



URAIAN	REALISASI		TARGET 2023 (APBD)	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025
	2021	2022			
<b>BELANJA TRANSFER</b>					
Belanja bagi hasil	14.101.448.000	15.827.425.000	21.750.543.409	20.550.174.972	21.750.543.409
Belanja bantuan keuangan	514.123.393.432	508.128.850.229	442.526.055.140	436.940.490.381	452.233.407.544
Jumlah belanja transfer	<b>528.224.8841.432</b>	<b>523.956.275.229</b>	<b>464.276.598.549</b>	<b>457.490.665.353</b>	<b>473.983.950.953</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3.105.899.535.279</b>	<b>2.989.792.990.334</b>	<b>3.039.732.328.457</b>	<b>3.434.966.896.764</b>	<b>3.534.981.502.868</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 meliputi:

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
2. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman mana kala terjadi surplus anggaran.

Di bawah ini disajikan proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 berdasarkan realisasi tahun 2021 dan 2022 serta target pada tahun 2023, seperti pada tabel 3.12 di bawah ini.



**Tabel 3.12**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2025**

URAIAN	REALISASI		TARGET 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025
	2021	2022			
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan SiLPA	115.916.681.211	74.502.501.490	25.898.717.393	5.000.000.000	13.277.794.843
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	40.000.000.000	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.450.000	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	35.315.682	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>115.918.131.211</b>	<b>74.537.817.172</b>	<b>25.898.717.393</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>13.277.794.843</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000	13.899.998.915	2.500.000.000	15.000.000.000	2.384.752.538
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>23.899.998.915</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>2.384.752.538</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>109.918.131.211</b>	<b>50.637.818.257</b>	<b>13.398.717.393</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>10.893.042.305</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Tim RKPD Tahun 2024.

### **3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Majalengka cukup besar namun terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Majalengka. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD Kab yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Untuk pembiayaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama (DUB) yang pengalokasiannya sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi Covid-19. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

#### **3.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi Jawa Barat)**

Sumber pendanaan untuk pembangunan di Kabupaten Majalengka juga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat diantara

Bantuan Keuangan (Bankeu) yang diajukan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka, Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang diajukan langsung oleh Kepala Desa serta Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga/organisasi dan perseorangan yang pengajuan pendanaan tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

### **3.3.3 Dana Masyarakat/Umat**

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Majalengka yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. Tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Majalengka secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.3.4 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Sumber pendanaan pembangunan yang lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka



panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menggunakan *pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rumusan **sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024** mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. *Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**



Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka, 2023.

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama, Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga, Struktur ekonomi yang semakin maju dan

kokoh; dan Pilar Keempat, Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampilkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;

- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
  - e. Meningkatkan budaya literasi.
  
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.  
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
  - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
  - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
  
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.  
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.
  
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.  
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi Kelembagaan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi RPJMN, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Satu sasaran RPD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”, didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Produktifitas Daerah; dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
2. Sasaran Nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”, didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatkan Produktifitas Daerah; dan Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
3. Sasaran Nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di

- wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”, tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka;
4. Sasaran Nasional 4: “Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima.
  5. Sasaran Nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Menurunnya Penduduk Miskin.
  6. Sasaran Nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Derajat Kesehatan.
  7. Sasaran Nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pendidikan; dan Meningkatnya Derajat Kesehatan.
  8. Sasaran Nasional 8: “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Menurunnya Penduduk Miskin.
  9. Sasaran Nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Produktifitas Daerah.
  10. Sasaran Nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
  11. Sasaran Nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Mutu Pendidikan.
  12. Sasaran Nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”, didukung oleh sasaran

- pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kondusifitas Daerah.
13. Sasaran Nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”, didukung oleh sasaran Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kondusifitas Daerah.
  14. Sasaran Nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kondusifitas Daerah.
  15. Sasaran Nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Mutu Pendidikan.
  16. Sasaran Nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
  17. Sasaran Nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
  18. Sasaran Nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan”, tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka.
  19. Sasaran Nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
  20. Sasaran Nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka

yaitu : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.

21. Sasaran Nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
22. Sasaran Nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Kondusifitas Daerah.
23. Sasaran Nasional 23: “Pembangunan rendah karbon”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
24. Sasaran Nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya Kondusifitas Daerah.

#### **4.1.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

##### **1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 baru mencapai 73,12, sedangkan target pada tahun 2024 yaitu 73,56, sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 yaitu 8,78 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,62 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi. Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh

peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana, serta upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

## **2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan**

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 7,98 persen, dengan target pada tahun 2024 yaitu 7,39 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan.

## **3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terkendala tingkat konektivitas antar wilayah yang belum optimal, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah relatif terbatas, ditunjukkan dengan Tingkat Konektivitas pada tahun 2022 baru mencapai 53,20 persen, dengan target tahun 2024 yaitu 57,00 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan ditunjukkan melalui capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 0,670 poin, dengan target tahun 2024 yaitu 0,667 poin.

## **4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2022. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur,

penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mengusung tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Tujuan 1* : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

*Tujuan 2* : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

*Tujuan 3* : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunkan risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

*Tujuan 4* : Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

#### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah :

#### **“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”**

Adapun tujuan dan sasaran dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel 4.1.



**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026**

NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>Poin</b>	0,354	0,367	0,330	0,329	0,328	0,328	0,328
		<b>IPM</b>	<b>Poin</b>	67,81	68,56		68,90	69,00	69,20	69,20
1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56	10,09	9,63	9,63
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,31	7,49	7,52	7,61	7,69	7,78	7,78
1.3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,26	78,09	70,60	71,35	71,65	72,00	72,00
		Prevalensi Stunting	Persen	3,52	3,84	3,50	3,25	3,00	2,75	2,75
<b>2.</b>	<b>Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>4,75</b>	<b>6,63</b>	<b>6,69</b>	<b>6,72</b>	<b>6,28</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>
		<b>Inflasi</b>	<b>Persen</b>	<b>1,81</b>	<b>4,86</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>
2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	64,75	65,18	67,28	68,49	68,49
2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,32	64,81	66,29	67,08	68,26	69,45	69,45
2.3.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	22,79	24,30	25,85	27,58	29,31	31,17	31,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,71	4,16	4,88	4,44	4,40	4,37	4,37
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C	C	B	B



NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Kategori	N/A	N/A	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	CC	B	B	B
3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.



## 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

### 4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi Pembangunan Nasional Tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

**"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Arah Kebijakan yang termuat dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2024 adalah:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2024, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

#### A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;



4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2024

1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. SN 6, Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;



14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; serta
25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

**Tabel 4.2**  
**Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,99-74,02
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3-5,7
3	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,5-7,5
5	Indek Gini (Poin)	0,374-0,377
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27

Sumber: Rancangan Awal RKP 2024.



#### 4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir); 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 periode tahun 2024, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024.

Indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini .



**Tabel 4.3**  
**Indikator Makro Pembangunan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

No	Indikator Pembangunan	Target 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,56
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,42
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,01
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,39
5.	Indeks Gini (nilai)	0,408
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,06
7.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)`	7,11

*Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.*

#### **4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka**

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain :

##### **A. Permasalahan Kesehatan**

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan posyandu dan posbindu di beberapa daerah.
2. Pembangunan sarana Olahraga selain untuk kepentingan kesehatan juga untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga terutama kaum muda.

##### **B. Permasalahan Pendidikan**

1. Untuk kondusifitas, keamanan dan kenyamanan Siswa harus dilakukan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan (SD,SMP,MI, MTS).
2. Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.



### C. Permasalahan sosial dan keagamaan

1. Diperlukan bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Banyak sarana keagamaan yang mulai rusak yang memerlukan rehabilitasi segera untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah.
3. Fasilitasi sarana prasarana pendukung seperti tempat wudhu, sound system, AC, dan sarana lainnya untuk kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya.

### D. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan

1. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa dengan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan diantaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa.
2. Pelatihan dan bantuan modal di sektor pertanian dan peternakan guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah.
3. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana objek daya tarik wisata harus ditata baik objek wisata itu sendiri maupun sarana pendukungnya seperti jalan, tempat parkir, kios untuk meningkatkan kunjungan wisata .
5. Penguatan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, stimulus bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha.
6. Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pengadaan alat-alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.



7. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.
8. Pengadaan bantuan untuk *home industry* berupa pelatihan, modal dan pemasaran.

#### E. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya

1. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian.
3. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/ drainase utama.
4. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.
5. Normalisasi dan pemeliharaan drainase.
6. Penataan Kawasan Kumuh.
7. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
8. Pengadaan sarana penerangan jalan umum bagi wilayah yang minim penerangan guna keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi tindak kriminal diwilayah tersebut.
9. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.
10. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
11. Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan seperti TPS  
Pengadaan armada pengangkut sampah.

#### 4.2.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka



menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 3 (tiga) isu strategis, yaitu : 1) Masih rendahnya pembangunan manusia; 2) Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 3) Kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah belum maksimal. Ketiga isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.4.



**Tabel 4.4**  
**Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

<b>Arah Kebijakan RKP 2024</b>	<b>Isu</b>	<b>Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026</b>	<b>Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024</b>
1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.	<i>Lokal:</i> Daya beli dan Pengangguran Pemerataan	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. 2. Indeks Pembangunan Manusia belum mencapai target. 3. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 4. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. 5. Pendidikan gratis belum maksimal 6. Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun) 7. Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal 8. Penyebaran sekolah yang belum merata 9. Distribusi guru proporsional belum maksimal 10. Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan Pendidikan 11. Masih kurangnya infrastruktur penunjang Pendidikan 12. Masih rendahnya kualitas pelayanan Kesehatan 13. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none"><li>14. Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.</li><li>15. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi</li><li>16. Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi</li><li>17. Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat)</li><li>18. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.</li><li>19. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.</li><li>20. Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Majalengka yang memenuhi standar nasional</li></ol>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.</li><li>2. Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan <i>Decent Job</i>.</li></ol>	<p><i>Nasional:</i> Daya Beli</p> <p><i>Lokal:</i> - Daya Beli - Pengangguran - Pemerataan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase penduduk miskin masih belum mencapai target.</li><li>2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi.</li><li>3. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal.</li><li>4. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li><li>5. Lapangan kerja terbatas.</li><li>6. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia</li></ol>



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			kebutuhan kerja. 7. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong “pekerja rentan/ <i>vulnerable employment</i> ” masih cukup tinggi. 8. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.	
1. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. 2. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau). 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.	<i>Nasional:</i> Defisit Fiskal dan Investasi Rantai nilai Daya Beli  <i>Lokal:</i> Bencana Pemulihan Ekonomi	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. Konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Majalengka belum optimal. 2. Masih terdapat rumah yang tidak layak huni 3. Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum 4. Akses dan standardisasi terhadap layanan air minum belum merata. 5. Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air. 6. Rendahnya kinerja jaringan jalan sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas. 7. Masih terdapat kondisi Jalan dalam keadaan rusak 8. Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Kabupaten belum optimal. 9. Penyediaan sumber daya air untuk	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<p>aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Jaringan irigasi masih banyak terdapat kerusakan.</li><li>11. Cakupan pelayanan air limbah domestik belum optimal.</li><li>12. Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbunan sampah</li><li>13. Penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan tidak memenuhi standar.</li><li>14. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi akibat pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum optimal</li><li>15. Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan belum diantisipasi secara optimal.</li><li>16. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.</li></ol>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong pemulihan dunia usaha.</li><li>2. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.</li><li>3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau).</li></ol>	<p><i>Nasional:</i> Investasi</p> <p><i>Lokal:</i> Pemulihan Ekonomi</p>	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laju Pertumbuhan Ekonomi masih rendah.</li><li>2. Pendapatan per kapita belum sesuai target.</li><li>3. Skor Pola Pangan Harapan belum sesuai target.</li><li>4. Kontribusi lapangan usaha Pariwisata terhadap PDRB masih rendah.</li><li>5. Pertumbuhan sektor industri masih bisa ditingkatkan lagi.</li></ol>	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi usaha</li><li>7. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi.</li><li>8. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan.</li><li>9. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.</li><li>10. Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar pemerintah daerah kondisinya kurang memadai</li><li>11. Belum optimalnya akses (konektivitas), amenitas dan atraksi pada destinasi wisata.</li><li>12. Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata</li><li>13. Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata</li><li>14. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian.</li><li>15. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.</li><li>16. Pemasaran hasil perikanan belum terintegrasi.</li><li>17. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.</li><li>18. Belum optimalnya rantai pasok pemasaran.</li><li>19. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.</li></ol>	



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan	Global: Investasi	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi.</li><li>2. Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada</li><li>3. Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</li><li>4. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa.</li><li>5. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa.</li><li>6. Belum optimalnya Pemanfaatan CSR</li><li>7. Penerapan <i>e-Government</i> belum sepenuhnya dilaksanakan.</li><li>8. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral.</li><li>9. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>).</li><li>10. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Majalengka</li><li>11. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.</li><li>12. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.</li><li>13. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam</li></ol>	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<p>masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>14. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.</li><li>15. Mengurangi potensi konflik antar umat beragama.</li><li>16. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</li></ol>	

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.



Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 4.2, maka 5 (lima) Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 relevan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

### **1. Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,43 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 12,33 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.



## **2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi.

Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.



Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus

### **3. Pembangunan Insfratraktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah**

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk



dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan dan desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

#### **4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan



evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19.

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis**  
**Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan**  
**Provinsi Jawa Barat**

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. <b>Prioritas 1</b> , yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata; 2. <b>Prioritas 2</b> , yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama; 3. <b>Prioritas 3</b> , yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah; 4. <b>Prioritas 4</b> , yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan	1. Masih rendahnya pembangunan manusia 2. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 3. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3. Pembangunan insfratraktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024
	Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; 5. <b>Prioritas 5</b> , yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; 6. <b>Prioritas 6</b> , yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.		

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

#### 4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

#### Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024



**Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**



**Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat**



**Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat**



**Tabel 4.6**  
**Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional**  
**dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2024**

<b>Prioritas Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Majalengka 2024-2026</b>	<b>Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024</b>
Penanggulangan Kemiskinan	PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
	PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Pembangunan insfratraktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing	PN 1,Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
	PN 6, Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim;
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PN 7,Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2024 dan Sasaran RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran RKP Tahun 2024</b>	<b>No</b>	<b>Sasaran RKPD Tahun 2024</b>
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S2.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah



No	Sasaran RKP Tahun 2024	No	Sasaran RKPD Tahun 2024
S3.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan
S4.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima
S5.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin
		2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
S6.	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan
S7.	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1.3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin
S9.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah
S10.	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
S11.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
S12.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S13.	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S14.	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S15.	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
S16.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan
S17.	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan
S18.	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan
S19.	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan



No	Sasaran RKP Tahun 2024	No	Sasaran RKPD Tahun 2024
S20.	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan
S21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
S22.	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S23.	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline	2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
S24.	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga, demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima
		2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S25.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Nilai PDRB
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Nilai PDRB
Rasio kewirausahaan nasional (%)	N/A
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan PDB industri pengolahan ( %)	Nilai PDRB
Kontribusi PDB industri pengolahan ((%)	Nilai PDRB
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar	Nilai PDRB
Kontribusi PDB pariwisata (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	N/A
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	N/A
Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	N/A
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	N/A
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	N/A
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	N/A
Konservasi Kawasan Kelautan (juta ha)	N/A
Produksi ikan (juta ton)	Nilai PDRB
Produksi garam (juta ton)	Nilai PDRB
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan wirausaha (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Nilai PDRB
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	Niali PDRB
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Nilai PDRB
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	TPT



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	TPT
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	Nilai PDRB
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Indeks RB
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	Nilai PDRB
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Nilai PDRB
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	N/A
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	Nilai PDRB
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	N/A
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Indeks RB
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Nilai PDRB
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	N/A
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	N/A
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) yang dikembangkan (WM)	N/A
Perkembangan status pembangunan desa	N/A
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Persentase penduduk miskin
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	N/A
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	N/A
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	N/A
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks RB
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks RB
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Indeks RB
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Indeks RB
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Indeks RB
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks RB
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks RB
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	Indeks RB
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Indeks RB
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Indeks RB
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	N/A
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	AHH
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks RB
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Persentase penduduk miskin
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Persentase penduduk miskin
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Persentase penduduk miskin
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	RLS
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi stunting
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	AHH
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	AHH
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	AHH
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai)	RLS
Membaca (nilai) Sains Nilai)	RLS
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	RLS
Harapan lama sekolah (tahun)	RLS
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	TPT
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	N/A



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Persentase penduduk miskin
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Persentase penduduk miskin
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Persentase penduduk miskin
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	N/A
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	AHH
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	AHH
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	AHH
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Prevalensi stunting
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	AHH
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	AHH
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	AHH
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	AHH
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	AHH
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	AHH
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	AHH
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	AHH
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	AHH
Persentase obat memenuhi syarat (%)	AHH
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Persentase penduduk miskin
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Persentase penduduk miskin
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	RLS
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	RLS
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	RLS
Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	RLS
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	RLS
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	TPT
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	TPT
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Trantibum
Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	TPT
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Persentase penduduk miskin
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Persentase penduduk miskin
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pengetahuan



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha (inovasi)	Nilai PDRB
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Nilai PDRB
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	N/A
Budaya dan Prestasi Olahraga:	RLS
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	N/A
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Pengetahuan
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Indeks Trantibum
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	RLS
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	N/A
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	N/A
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	N/A
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	N/A
Rasio Elektrifikasi (%)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	Indeks Trantibum
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	N/A
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	N/A
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	N/A
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	N/A
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	N/A
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	N/A
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	N/A
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Indeks Gini
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A
Persentase penurunan emisi GRK (%)	N/A
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	N/A
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	N/A
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks RB
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks RB
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Indeks RB
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Indeks Trantibum

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.9

## Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka.

PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Penanggulangan Kemiskinan	1.1. Menurunnya Penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat miskin berbasis data P3KE	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin	Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin Berbasis Data P3KE	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	DKP3
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AKB
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB
Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan	Pemenuhan Infrastruktur dan Mendekatkan Akses Keluarga Miskin	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DK2UKM			
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	DPKPP			
Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Penurunan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
	1.3. Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan dan Kualitas SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES, RSUD CIDERES & MAJALENGKA



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olah Raga	Peningkatan Aktivitas Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISPORA
		Prevalensi Stunting	Meningkatkan Intervensi Gizi Sensitif	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Peningkatan Intervensi Gizi Spesifik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPKPP
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Peningkatkan jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbangun serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
			Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan jalan kabupaten	Melaksanakan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkapya	Program Penyelenggaraan Jalan	PUTR
			Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pengelolaan sumber daya air lainnya di Wilayah Kabupaten Majalengka	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya	Melaksanakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) serta melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	2.2. meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi pencemaran air	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Mengurangi pencemaran Udara	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Meningkatkan tutupan lahan	Pemeliharaan Tutupan Lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Persentase penanganan, Pengurangan sampah	Melaksanakan penanganan, pengurangan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
	2.3.	Meningkatnya produktivitas daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatkan Daya saing sumber daya Lokal	Peningkatan Jumlah IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DISPERDAGIN
					Peningkatan Kualitas Produk Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DK2UKM
					Penguatan Ekosistem Digital	Program Pengembangan UMKM	
				Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERDAGIN
					Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	
					Penguatan Pasar Digital (E-Commerce)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Penguatan Regulasi LP2B dan LSD	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKP3
					Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
					Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Meningkatkan Kualitas Destinasi Layak Kunjung	Peningkatan pengelolaan, promosi destinasi dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPARBUD
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Program Pemasaran Pariwisata							
Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Program Fasilitasi Sarana dan Prasaran dan Pengelolaan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)						



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyarakat Desa	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa	DPMD
				Peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD
				Peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, lembaga desa dan aparatur desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
				Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
				Meningkatkan Iklim Investasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DK2UKM
				penguatan sarana prasarana pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Penguatan Promosi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Menumbuhkan minat sektor pertanian	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKP3
				Peningkatan Minat Pelatihan Keterampilan Angkatan Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Layanan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPPDAMKAR



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH		
			Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan Budaya Tertib dan Sadar Aturan Dalam Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL		
			Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana	peningkatan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD		
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETDA	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA	
						Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA	
					Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
							Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan ketersediaan regulasi daerah, kapasitas dan kapabelitas SDM penyelenggaraan statistik sektoral serta fasilitas dan asesibilitas media data berbasis teknologi informasi	Peningkatan pengelolaan statistik sektoral daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
			Meningkatkan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika	
			Meningkatkan tatakelola standar keamanan, sarana pendukung dan sumberdaya manusia pengelola informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia. Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	
				Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pembangunan Desa/Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KECAMATAN	
					Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN	
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KECAMATAN	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	
			Meningkatnya Kapabilitas APiP	Peningkatan Level PK APiP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Diseminasi inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan	Bappedalitbang	
	Meningkatkan ekosistem inovasi pelayanan publik	One Agency One Innovation	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SETDA			
	3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta koordinasi dana transfer	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
						Program Pengelolaan barang milik daerah	BKAD
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah		

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap masing-masing Kegiatan Prioritas pada prioritas nasional tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 4.10**  
**Tingkat dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas**  
**Pada Prioritas Nasional Tahun 2024**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
<b>PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>					
1.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT	Penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) melalui penyelesaian pembangunan PLT ET <i>on grid</i> yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 secara efisien dan efektif	Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-
		Pembangunan PLT ET <i>off-grid</i> untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)		-	-
		Peningkatan kualitas transmisi dan distribusi untuk mendukung pemanfaatan ET		-	-
		Optimalisasi produksi biofuel disertai kebijakan demand management dalam negeri		-	-
		Restrukturisasi subsidi energi fosil ke EBT secara bertahap		-	-
		Mendorong serta memfasilitasi peran Pemda dalam pengelolaan ET skala kecil		-	-



2.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Memelihara dan meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada DAS kritis serta perhutanan sosial	Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-
		Menyelamatkan DAS dan danau prioritas nasional dalam rangka mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata		-	-
		Meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Debit air termanfaatkan
		Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi secara partisipatif dan melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial peralatan pemeliharaan, atau skema program padat karya		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Debit air termanfaatkan
3.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Regenerasi dan edukasi petani berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan



		Transformasi digital dalam praktik budi daya, pengolahan, dan pemasaran secara luas	Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor
		Regionalisasi sistem pangan yang berbasis komoditas pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan
		Pertanian regeneratif dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan mitigasi risiko dampak negatif perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Penataan WPP yang didukung dengan kelembagaan yang memadai	Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-
		Bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Terpenuhinya produksi perikanan tangkap
					Terfasilitasinya sarana dan prasarana nelayan
					Terfasilitasinya penebaran benih ikan di perairan umum (Rawa, Situ, Sungai, Embung)
		Pengembangan usaha berbasis sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak udang dan bandeng, klaster tambak garam, kampung perikanan budi daya, kampung nelayan, serta desa wisata bahari		-	-



		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional, serta pusat produksi benih dan induk unggul			-	-
		Perluasan akses pasar dan penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah omset pemasaran produk perikanan
		Penguatan kelembagaan usaha melalui pengembangan korporasi, fasilitasi akses pendanaan, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan			-	Jumlah omset pemasaran produk perikanan
		Penguatan teknologi dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan			-	-



5.	Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi	Formalisasi bentuk usaha mikro	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM mempunyai NIB
		Peningkatan nilai tambah produk			Persentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Peningkatan partisipasi UMKM dalam GVC			
		Kemudahan akses pembiayaan			
		Perluasan akses pasar dan kemitraan usaha			
		Pengembangan wirausaha tematik			
		Integrasi program K/L dalam pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi			
		Penguatan regulasi serta ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi			
6.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-
		Peningkatan tenaga kerja berkompotensi tinggi	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi



		Peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, termasuk untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-
		Pengembangan industri dan infrastruktur halal		-	-
		Percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi		-	-
		Penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Layak Kunjung
		Penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif
		Penguatan industri kreatif berbasis konten		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sertifikasi pelaku ekonomi kreatif
		Penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Usaha Skala Menengah dan Besar
		Penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan Fasilitasi Perizinan Usaha Industri
		Peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular		-	-



		Penegakan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan perlindungan pekerja	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	-
7.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN	Peningkatan dan percepatan diversifikasi, nilai tambah, dan teknologi tinggi produk ekspor barang dan jasa	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor
		Peningkatan hilirisasi berbasis sumber daya alam dan komoditas		-	-
		Optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor dengan menjamin ketersediaan di dalam negeri		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor
		Pendalaman dan perluasan pasar ekspor negara tradisional dan non tradisional			
		Penguatan redesain program pelatihan ekspor dan optimalisasi sistem informasi perdagangan yang terintegrasi			
		Penguatan efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i>		-	-
		Penguatan diplomasi ekonomi dalam menghadapi hambatan non tarif dan mendorong keberterimaan negara lain terhadap standar barang dan jasa Indonesia		-	-
		Mendorong kesiapan transisi perdagangan hijau melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan		-	-



		Penguatan daya saing sektor jasa melalui harmonisasi regulasi sektor jasa dan penguatan ketersediaan data perdagangan jasa		-	-
		Pemulihan pasar pariwisata yang didukung kebijakan visa yang kondusif, serta penyelenggaraan event, wisata olahraga, Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE), dan fasilitasi destinasi film		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Layak Kunjung
		Peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif
		Penguatan ekspor gastronomi melalui “Indonesia Spice Up the World”		-	-
		Perluasan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri termasuk melalui gerakan “Bangga Buatan Indonesia” dan “Bangga Berwisata di Indonesia Aja”		-	-
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	-	-



	Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang pokok		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek risiko perlindungan konsumen		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Tingkat Pengaduan Konsumen
	Penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian		-	-
	Penguatan basis data secara terintegrasi antarpemangku kepentingan terhadap pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antarpulau/antardaerah		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Penguatan teknologi informasi dalam mendorong efisiensi logistik nasional		-	-
	Redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat <i>multi-channel</i>		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Tingkat Pengaduan Konsumen
	Perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi		-	-
	Penerapan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau		-	-



	Mengintegrasikan taksonomi hijau ke dalam peraturan perundang-undangan dan kelembagaan			-	-
	Akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif			-	-
	Perbaiki kualitas dan kinerja belanja TKD melalui sinergi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah serta penguatan pengawasan anggaran TKD			-	-
	Pendalaman pasar keuangan yang kondusif utamanya pasar obligasi pemerintah yang melibatkan multi stakeholders pusat-daerah, serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah			-	-
	Penyediaan statistik ekonomi hijau	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	
	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial sesuai dengan standar dan metodologi Internasional di Indonesia, dengan didukung kerangka regulasi yang memadai				



		Peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi dan sinkronisasi penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia			
<b>PN.02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>					
1	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum)	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		
		peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial
		penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase AKIP OPD yang dievaluasi dengan nilai BB
		peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		penataan dan harmonisasi regulasi		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi



		percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital), percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/ Kota), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik
<b>PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>					
1	Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan	peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok khusus	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Pendaftaran Penduduk	Capaian SKM Perangkat Daerah
		pemutakhiran data penduduk berdasarkan hasil <i>Long Form</i> Sensus Penduduk (SP) 2020			Cakupan kepemilikan KTP-el
		pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital			Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk
		penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)



2	Reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	perluasan dan penguatan sosialisasi terpadu jaminan sosial untuk meningkatkan kepesertaan dan kolektabilitas, khususnya bagi pekerja informal	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial
		pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, melalui mekanisme kolaboratif dan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan tidak mampu			
		perluasan program dan manfaat jaminan sosial, mencakup return to work dan perlindungan hari tua pekerja informal			
		Peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi Registrasi Sosial Ekonomi melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Data ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai data acuan dalam melakukan integrasi program-program perlindungan sosial dan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti			
		penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial			
				-	-



		pengembangan mekanisme graduasi yang terintegrasi untuk program-program bantuan sosial			-
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus antara lain	peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
		percepatan penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		pengendalian penyakit menular dan tidak menular terutama pada HIV/AIDS, tuberculosis (TB), Malaria, Kusta, dan Schistosomiasis			
		peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan percepatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik FKTP pemerintah maupun swasta serta akreditasi Rumah Sakit			
		pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar terutama di puskesmas			
		pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional			



4	Pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional	peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD
		peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun			APM SD/MI
		kolaborasi lintas sektor untuk penguatan layanan satu tahun prasekolah			APM SMP/MTs
		peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata			APK Non Formal
		penguatan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan			
		peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan serta strategi peningkatan efektivitas pembiayaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan			
5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	peningkatan kualitas anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	
		peningkatan kualitas perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	



		peningkatan kualitas pemuda		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
6	Mengentaskan kemiskinan	peningkatan keberantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM mempunyai NIB
		peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial			Persentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri
		peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan			



7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
		pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia		Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
		penyelarasan jenis program studi dan arah penelitian dengan kebutuhan pengembangan sektor prioritas di daerah		-	-
		peningkatan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan pengembangan kurikulum serta inovasi pembelajaran yang dapat memperkuat karakter, berorientasi pada kompetensi untuk menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan dengan wawasan pengembangan wilayah		-	-
		pemfokusan sumber daya riset dan inovasi untuk mencapai target flagship Prioritas Riset Nasional 2020-2024 dan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dengan berbasiskan iptekin		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan
		penguatan ekosistem riset dan inovasi, khususnya melalui peningkatan kolaborasi antara lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat			



		Perbaiki pembinaan olahraga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga
<b>PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>					
1	Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten Majalengka
		penerapan nilai-nilai ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) untuk peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial
		penerapan disiplin, reward, dan punishment dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		penguatan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan untuk internalisasi nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti			
		penguatan pendampingan GNRM dan kerja sama multipihak/pentahelix dalam pelaksanaan kegiatan GNRM di daerah			Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)



		internalisasi prinsip dan nilai koperasi serta perbaikan citra koperasi pada generasi muda melalui penguatan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait koperasi kepada generasi muda		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif
		peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan
2	Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
		peningkatan kualitas tata kelola, serta sarana dan prasarana kebudayaan untuk museum, taman budaya, sanggar, dan pusat kegiatan seni budaya		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	jumlah seni tradisional yang direvitalisasi
		pelaksanaan langkah percepatan manajemen talenta nasional seni budaya			-
		revitalisasi jalur rempah sebagai upaya meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia			-
		penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem kebudayaan, termasuk pengembangan pendanaan bidang kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan



		<p>pengembangan wahana ekspresi budaya berbasis digital dalam rangka pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif</p>			-
		<p>pengelolaan dan pemanfaatan arsip sejarah perjalanan bangsa di daerah perbatasan</p>		Program Pembinaan Sejarah	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola
3	Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial	<p>pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif</p>	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		<p>pengembangan dialog lintas agama yang menumbuhkan sikap toleransi, inklusif, serta kerja sama dan solidaritas antarwarga</p>			Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
		<p>pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: mekanisme blended finance untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, dan sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) percontohan ekonomi umat</p>			



		<p>Pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Penjamin Halal (LPH)</p> <p>Fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan Islam</p>			
4	Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan	<p>peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial</p> <p>peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat</p> <p>penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital</p> <p>Pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu</p>		Program Pembinaan Perpustakaan	<p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p>



		pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa			
<b>PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>					
1	Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon	Perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau melalui fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan skema pembiayaan kredit mikro perumahan, serta perluasan kepesertaan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan layanan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)	Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah		
		Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh, serta pengembangan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni
		peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengakses rumah layak huni secara swadaya			



	<p>penjaminan adanya integrasi hulu-hilir dalam penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan serta meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan regulasi, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur</p> <p>pengoordinasian di tingkat pusat dalam mendorong pemicuan perubahan perilaku masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 (lima) pilar untuk mencapai 0 persen BABS di tempat terbuka dan untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya serta untuk memilah sampah sedekat mungkin dengan sumber</p> <p>penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang berfokus untuk melengkapi rantai layanan aman serta sarana pengelolaan persampahan terpadu dan berwawasan lingkungan</p>		<p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)</p>	<p>Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum</p>
--	---	--	---	--



2	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk pengelolaan sumber daya air	<p>menjaga kuantitas dan kualitas sumber pasokan air melalui strategi peningkatan kinerja operasi dan keamanan bendungan eksisting, konservasi daerah tangkapan air untuk mengurangi sedimentasi di tampungan air, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran di badan air</p> <p>Peningkatan ketersediaan dan keamanan air melalui strategi penyelesaian pembangunan 65 bendungan dan tindak lanjut pemanfaatannya, peningkatan kinerja layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan di tingkat lokal dan pengembangan food estate, serta percepatan penyediaan akses air baku yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan distribusi air bersih rumah tangga</p> <p>penguatan ketahanan bencana berbasis wilayah melalui strategi pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir untuk meningkatkan ketangguhan bencana di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, perlindungan wilayah perkotaan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, serta penguatan penyelenggaraan operasi tanggap darurat dan pemulihan di daerah pasca bencana</p>		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Debit air termanfaatkan
---	---	--	--	-------------------------------------	-------------------------



		peningkatan tata kelola dan pendanaan sumber daya air melalui strategi penguatan penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan (OP) untuk menjamin keberlanjutan manfaat infrastruktur sumber daya air bagi masyarakat, akselerasi dan optimalisasi pemanfaatan pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pencapaian sasaran prioritas nasional, serta peningkatan kualitas belanja tidak langsung yang akan berkontribusi pada pencapaian berbagai agenda prioritas seperti penyelesaian turunan UU Sumber Daya Air, penyusunan studi pembiayaan alternatif, reviu Pola dan Rencana Sumber Daya Air			
--	--	---	--	--	--



3	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi	<p>mendorong pelaksanaan Perpres No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ oleh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah, pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi Keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (blackspot) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan</p> <p>Peningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) prasarana perkeretaapian, pemenuhan sarana bantu navigasi pelayaran dan penerbangan terutama di daerah rawan kecelakaan pelayaran, kawasan strategis yang dilalui pelayaran dan penerbangan yang padat, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas Surveillance dan navigasi penerbangan terintegrasi</p>		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun
---	---	---	--	---	---



		optimalisasi pemanfaat DAK Transportasi Perairan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran			
		pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi dan pemberdayaan masyarakat bidang transportasi; dan (5) meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan			
4	Peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi	melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antarkota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan jenis komoditi		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap
		menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas ( <i>food estate</i> , industri dan pariwisata)			



		melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan		-	-
		Melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer, pengembangan bandara pendukung kawasan strategis untuk memenuhi standar pelayanan termasuk pembangunan bandara perairan (waterbase airport) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan dan daerah perairan		-	-
		penataan rute penerbangan yang menghubungkan kawasan prioritas dengan kawasan penyangganya		-	-
		pembangunan baru dan peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan		-	-
5	Mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah 3TP, penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata	penyediaan layanan reguler dan keberintisan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program tol laut bersubsidi dan jembatan udara		-	-



		<p>pengembangan pelabuhan laut dan penyeberangan yang memenuhi aspek standar operasional terutama pelabuhan pendukung kawasan ekonomi strategis dan daerah 3TP yang menjadi pelabuhan singgah tol laut dan layanan keperintisan laut dan penyeberangan</p>			-	-
		<p>mengoptimalkan kapal feeder yang membentuk rute pengumpan dan pengumpul untuk distribusi logistik dan bahan pokok penting, sehingga meningkatkan konsolidasi kargo dan muatan balik pada pelabuhan simpul</p>			-	-
		<p>pengembangan bandara pada daerah-daerah yang masih memiliki kesenjangan yang tinggi, serta bandara pendukung program jembatan udara dan keperintisan angkutan udara</p>			-	-
		<p>meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran APBD, pemanfaatan skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang</p>			-	-



		melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar-infrastruktur lainnya		-	-
6	Peningkatan layanan infrastruktur perkotaan	pembangunan fly-over, underpass dan jalan lingkar perkotaan dalam rangka menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas pada titik kemacetan		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap
		pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, dengan memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun
		Mengembangkan angkutan komuter meliputi Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan layanan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah perkotaan			
		melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema Buy the Service (BTS) dan Public Service Obligation (PSO)			
		mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (smart city)		Program Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi



7	Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung peningkatan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan	mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau		-	-
		menyediakan subsidi listrik tepat sasaran dan bantuan penyediaan akses listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau berada di daerah 3TP, serta mengembangkan kebijakan tarif yang berkelanjutan		-	-
		memperluas pemanfaatan tenaga listrik (electrification) untuk sektor transportasi (e-vehicle dan charging station), rumah tangga, dan industri		-	-
		mendorong implementasi kebijakan harga beli listrik dari energi terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal dan non fiskal yang ada termasuk dana transfer daerah dan penerapan perdagangan karbon (carbon trade)		-	-
8	Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta pendorong enabler TIK dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital	mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan kualitas layanannya, termasuk pada daerah non komersial dan kawasan prioritas		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi



		mendorong pengelolaan sumber daya terbatas termasuk spektrum frekuensi secara optimal untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat			
		integrasi sistem dan data pemerintah melalui pemanfaatan pusat data bersama yang terstandardisasi			
		percepatan adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri dan lainnya			
		eningkatkan literasi digital masyarakat disertai dengan peningkatan etika, kecakapan digital dan penguatan keamanan informasi untuk mendukung produktivitas ekonomi		Program Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi
		mendorong penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, sehat dan beradab dalam mendukung aktivitas masyarakat yang produktif			
		penguatan sarana dan prasarana serta produksi penyiaran publik berkualitas dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat			



PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					
1	Pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis pascapandemi COVID-19	upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
		penanganan limbah B3 dan sampah spesifik		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3
		Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan
2	Penguatan budaya dan kelembagaan yang bersifat antisipatif, responsif dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana dengan kebijakan pada aktivitas pengurangan risiko bencana, perbaikan kualitas penanganan darurat serta pemulihan pascabencana untuk membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan, baik yang bersifat seketika (sudden onset disasters)	penguatan data, informasi dan literasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	persentase tanggap bencana	
		penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana		persentase tanggap bencana	
		peningkatan sarana prasarana kebencanaan		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
		integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	
		penguatan penanganan darurat bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana			



	seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (slow onset disasters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim	penguatan sistem mitigasi multiancamanan bencana terpadu			
3	Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi	pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi			-
		pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan			-
		pengembangan industri hijau			-
		rendah karbon pesisir dan laut melalui pemulihan ekosistem mangrove			-
		Penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular			-
<b>PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>					
1	Pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substansial	Bantuan keuangan kepada partai politik didukung dengan penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik Penguatan pendidikan politik, khususnya generasi muda	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Peme-rintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



		peningkatan kapasitas dan kualitas Ormas		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2	Peningkatan kualitas komunikasi publik	pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah yang mampu menjangkau daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi (4T) dan mengoptimalkan penggunaan media pemerintah penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah 4T peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan talenta digital Peningkatan literasi TIK masyarakat penguatan peran lembaga independen bidang kominfo dan kapasitas SDM media dan jurnalis	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi
3	Politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional	peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-	-



		pelindungan WNI di luar negeri sebagai respons terhadap dinamika global, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jerat hukuman mati, masalah keimigrasian, keamanan ABK, dan fasilitasi pengembalian hak finansial PMI			-	-
		percepatan penyelesaian penetapan batas maritim			-	-
		peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional			-	-
		penguatan peran sebagai prominent player di global south melalui KSST, termasuk kolaborasi kerja sama triangular dengan dual role countries (penyedia keahlian dan penerima manfaat) lainnya			-	-
		penguatan dan sinergi pemberian hibah dengan manfaat ekonomi			-	-
4	Pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan	penguatan database dan sistem informasi dalam tata kelola pembentukan regulasi, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang peraturan perundang-undangan dan percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
		perluasan implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI di seluruh wilayah				



		Pelaksanaan integrasi database rekam jejak hakim			
		perbaikan tata kelola eksekusi perdata di lembaga peradilan dan dukungan K/L terkait untuk mewujudkan ekosistem pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu			Indeks Reformasi Hukum
		penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024 dengan penambahan aksi Penguatan Partai Politik, Penataan Aset Pusat			
		Perluasan akses terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, peningkatan kualitas, kuantitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pemberdayaan hukum masyarakat, perlindungan hak-hak saksi dan korban, serta pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat			Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden			
5	Perbaikan tata kelola dan birokrasi	Penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial
		penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja			



		pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak			
		penyelesaian pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit			
		penegakan disiplin ASN			
		Integrasi layanan pada portal pelayanan publik ( <i>e-services</i> )		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi
		pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan		Program Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi
		koordinasi percepatan implementasi kebijakan SPBE		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Sertifikat Elektronik (SE) yang terakomodir sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI
		koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional			
		percepatan implementasi SRIKANDI di K/L/D		-	-
6	Pelaksanaan perwujudan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan	penguatan kemampuan pertahanan		-	-
		Pembangunan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara		-	-
		Percepatan digitalisasi pelayanan kepolisian		-	-



		penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan penguatan lembaga rehabilitasi		-	-
		penguatan keamanan dan ketahanan siber		-	-
		kerja sama penanggulangan terorisme, pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu		-	-
		penguatan kapasitas penegakan keamanan laut dan pengamanan wilayah laut Natuna		-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.11**  
**Keselarasn Program Perangkat Daerah dengan**  
**Program Prioritas Nasional dalam RPJMN**

No.	RPJMN			RKPD 2024
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	<b>KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis</b>			
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Kab.Majalengka	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	<b>KP 2: Pengembangan Komoditas Unggulan</b>			
	<b>Pengembangan komoditas unggulan Tebu</b>			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kab.Majalengka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	<b>Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap</b>			
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab.Majalengka	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
3.	<b>KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi</b>			
	Pembangunan Desa Terpadu	Kab.Majalengka	1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			2.Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Desa Digital (P3PD)	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa



No.	RPJMN			RKPD 2024
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

### 4.3 Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melalui sasaran :

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan.
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain.
3. Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana.
4. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.
5. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Kebijakan penataan ruang disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria :

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan

4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi yang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Majalengka, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan

andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- Perhubungan : Pelabuhan udara, dan atau pelabuhan laut dan atau terminal tipe B
  - Ekonomi : Pasar induk regional
  - Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B
  - Pendidikan : Perguruan tinggi
- 2) Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung-Cirebon dan koridor Utara-Selatan, sehingga ruang kecamatan yang termasuk kedalam PKW Kadipaten, selain Kecamatan Kadipaten, adalah Kecamatan Dawuan.
- 3) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Namun demikian, dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen No. 16/PRT/M/2009 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW

Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Talaga.

- 4) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Banjaran, Leuwimunding, Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cingambul, Cikijing, dan Kecamatan Sindang.
- 5) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dengan kriteria sebagai berikut:
- Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
  - Melayani satu atau lebih desa;
  - Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan.

#### 4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Majalengka, meliputi pemantapan peran dan fungsi PKW, dan PKL dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana minimal, yang terdiri dari:

**Tabel 4.12**  
**Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka**

STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kadipaten (Kawasan Perkotaan Kadipaten & Dawuan)	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industri
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Majalengka	Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	2. Kertajati	Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BJJ, pengembangan kawasan perkotaan “aerocity”, dan pertanian.
	3. Talaga	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional



STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	4. Rajagaluh	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.
	5. Jatiwangi	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Cigasong	sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	2. Panyingkiran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum serta pendukung kawasan komersial, perumahan, pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan.
	3. Cikijing	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	4. Jatitujuh	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri dan pendukung komersial, pertanian/peternakan dan perikanan.
	5. Kasokandel	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan.
	6. Ligung	Sebagai kawasan pertahanan keamanan (Lanud S. Sukani), pengembangan industri dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	7. Sumberjaya	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	8. Leuwimunding	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	9. Palasah	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	10. Argapura	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	11. Sukahaji	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	12. Sindangwangi	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	13. Bantarujeg	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
	14. Lemahsugih	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	15. Banjaran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	16. Maja	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	17. Sindang	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.



STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	18. Cingambul	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-desa.
	19. Malausma	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Jatitujuh (Pilangsari) 2. Ligung (Kedungsari, Gandawesi) 3. Sumberjaya (Cidenok) 4. Palasah (Najasuka) 5. Jatiwangi (Sukaraja Wetan) 6. Kasokandel (Panjiwetan) 7. Panyingkiran (Cijurey) 8. Cigasong (Tajur, Karayunan) 9. Sukahaji (Jayi, Ciomas) 10. Banjaran (Parimulya) 11. Leuwimunding (Parakan) 12. Rajagaluh (Teja) 13. Sindangwangi (Padaherang) 14. Argapura (Mekarwangi) 15. Maja (Sindangmulya) 16. Bantarujeg (Siliwangi, Cepeundey) 17. Lemahsugih (Mekarwangi, Sinargalih) 18. Malausma (Girimukti, Cimuncang) 19. Cingambul (Wangkelang, Sedareja) 20. Cikijing (Cisoka) 21. Sindang (Banyureja)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan, pengembangan "home industri" yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPd Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

#### 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan atas pertimbangan potensi pengembangan, batasan dan daya dukung lingkungan, serta kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan lainnya, yang meliputi:

##### 1. KAWASAN LINDUNG

- 1) SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 87/IV-SET/2015 tentang Zonasi TN Gunung Ciremai;



- 3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 4) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 5) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 6) Peta Kawasan Rawan Bencana (PVMBG Tahun 2016);
- 7) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan.

## 2. KAWASAN BUDIDAYA

- 1) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 2) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 3) Potensi Pengembangan (Pertanian, Wisata, Pertambangan, Industri, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dll);
- 4) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan;
- 5) Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka Tahun 2017;
- 6) Masterplan BIJB dan Kertajati Aerocity.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.13**  
**Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka**

NO.	POLA RUANG	LUAS (HA)	%
<b>A</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	<b>20.559,49</b>	<b>15,30</b>
<b>1</b>	<b>Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>	<b>8.140,51</b>	<b>6,06</b>
	Hutan Lindung	5.358,40	3,99
	Resapan Air	2.782,11	2,07
<b>2</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>4.468,29</b>	<b>3,33</b>
	Sempadan Sungai	4.444,09	3,31
	Sekitar Danau atau Waduk	24,20	0,02
<b>3</b>	<b>Kawasan Konservasi</b>	<b>6.037,01</b>	<b>4,49</b>
	Taman Nasional Gunung Ceremai	6.037,01	4,49
<b>4</b>	<b>Kawasan Lindung Geologi</b>	<b>1.913,68</b>	<b>1,42</b>
	Sempadan Mata Air	1.913,68	1,42
<b>5</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>	<b>44.301,26</b>	<b>32,98</b>
	Rawan Bencana Gempa Bumi	25.004,96	18,61
	Rawan Bencana Gerakan Tanah	6.667,04	4,96
	Rawan Bencana Gunung Api I	2.974,33	2,21
	Rawan Bencana Gunung Api II	2.951,72	2,20
	Rawan Bencana Gunung Api III	177,70	0,13
	Rawan Bencana Banjir	6.525,51	4,86
<b>B</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>113.781,33</b>	<b>84,70</b>
<b>1</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi</b>	<b>15.581,86</b>	<b>11,60</b>
	Hutan Produksi Tetap	14.142,51	10,53
	Hutan Produksi Terbatas	1.439,35	1,07
<b>2</b>	<b>Kawasan Hutan Rakyat</b>	<b>6.513,48</b>	<b>4,85</b>
<b>3</b>	<b>Kawasan Pertanian</b>	<b>38.589,59</b>	<b>28,73</b>



NO.	POLA RUANG	LUAS (HA)	%
	Pertanian Tanaman Pangan	30.239,55	22,51
	Pertanian Holtikultura	7.518,15	5,60
	Perikanan	831,83	0,62
<b>4</b>	<b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>	<b>880,10</b>	<b>0,66</b>
	Pertambangan Mineral	880,10	0,66
<b>5</b>	<b>Kawasan Industri</b>	<b>3.077,71</b>	<b>2,29</b>
	Kawasan Industri	1.723,78	1,35
	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	8,24	0,01
	Industri	1.063,11	0,94
<b>6</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>40.303,86</b>	<b>30,00</b>
	Kawasan Permukiman Perkotaan	14.704,62	10,43
	Kawasan Permukiman Perdesaan	23.667,17	19,57
<b>7</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>56,97</b>	<b>0,56</b>
<b>8</b>	<b>Kawasan Aerocity</b>	<b>3.480,00</b>	<b>2,29</b>
<b>9</b>	<b>Kawasan Bandara BIJB</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1,34</b>
<b>10</b>	<b>Kawasan Aerotropolis</b>	<b>5.693,52</b>	<b>4,68</b>
<b>11</b>	<b>Jalan</b>	<b>325,27</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>134.650,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Dari tabel di atas, bahwa arahan rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 20.559,49 Ha atau sekitar 15,30% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan luas arahan rencana pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 113.781,33 Ha atau sekitar 84,70% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.

#### 4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, terkait penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: (1) Kabupaten Subang; (2) Kabupaten Sumedang; (3) Kabupaten Indramayu; (4) Kabupaten Majalengka; (5) Kabupaten Cirebon; (6) Kota Cirebon; dan (7) Kabupaten Kuningan. Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kawasan Rebana menjadi salah satu dari 7 (tujuh) ekonomi baru di Jawa Barat yang menjadi solusi dari dinamika dan masalah pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi



Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan eruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan *industry* berwawasan lingkungan.

Rencana aksi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 merupakan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang meliputi:

- a. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi.
- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan.
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar.
- d. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air.



**Tabel 4.14**  
**Proyek dan Program Kawasan Rebana di Kabupaten Majalengka**

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPB
<b>A.</b>	<b>Pembangunan Jalan Bebas Hambatan</b>													<b>12.780.000</b>			
1.	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6)	Kab Sumedang, Kab Majalengka											Kementerian PUPR	5.580.000			v
2.	Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu	Kab.Majalengka, Kab Indramayu											Kementerian PUPR	7.200.000			v
<b>B.</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan</b>													<b>1.571.740</b>			
3.	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - BIJB	Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	1.500.000	v	v	v
4.	Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan)	Kab Kuningan, Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	50.000	v	v	
5.	Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung	Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	21.740	v	v	



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
<b>C.</b>	<b>Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>												<b>20.000.000</b>				
7.	Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka											Kementerian Perhubungan	20.000.000			v
<b>D.</b>	<b>Sarana dan Prasarana Persampahan</b>												<b>25.000</b>				
8.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut	Kec.Kadipaten, Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	25.000	v	v	
<b>E.</b>	<b>Sarana dan Prasarana Permukiman</b>												<b>5.200.000</b>				
9.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan sebagian konstruksi)	2.100.000	v	v	v
10.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	3.100.000	v	v	v
<b>F.</b>	<b>Pembangunan Waduk/Bendungan</b>												<b>1.300.000</b>				
11.	Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik	Kab.Majalengka, Kab.Sumedang											Kementerian PUPR	1.300.000	v		
<b>G.</b>	<b>Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir</b>												<b>305.300</b>				
12.	Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (Normalisasi Sungai Cibolerang, Revitalisasi Situ Cijawura dan	Kec.Kertajati, Kab.Majalengka											Kementerian PUPR	150.000	v		



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA				
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU		
	Cimaneuh)																		
13.	Program Pengembangan Desa Konservasi	100 Desa di Kab.Subang, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan												a. Kementerian KLHK b. Pemerintah Daerah (Pemberdayaan Masyarakat) c. BUMN/BUMD/Swasta	155.300	v	v	v	
<b>H.</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>												<b>500.000</b>						
14.	Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II	Kec.Panyingkiran, Kab.Majalengka												a. Kementerian PUPR b. Kementrian Dikbud-Ristek c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	v	
<b>I.</b>	<b>Daya Saing Kawasan</b>												<b>188.000</b>						
15.	Pembangunan Gedung <i>Creative Center</i>	Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan												a. Kementerian Parekraf (Sarana dan Prasarana) b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan Bangunan)	63.000	v	v		
16.	Pembangunan Gedung Pusat Budaya	Kota Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Majalengka, Kab.Sumedang												Pemerintah Daerah	25.000		v		
17.	Pengembangan desa digital	Kab.Majalengka, Kab.Subang, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang												a. Kementerian Kominfo b. Kementerian Desa dan PDTT c. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan)	100.000	v	v		



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
<b>J.</b>	<b>Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>												<b>350.000</b>				
18.	Pembangunan Rumah Sakit Cideres Tipe B	Kab.Majalengka		■	■	■	■						a. Kementerian Kesehatan b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) c. Swasta	350.000	v	v	V
<b>K.</b>	<b>Infrastruktur Energi</b>												<b>3.930.000</b>				
19.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sangkahurip Ciremai	Kab.Kuningan, Kab.Majalengka		■	■	■	■	■					Kementerian ESDM	3.930.000	v		v
<b>L.</b>	<b>Pengembangan Kawasan Industri</b>												<b>2.280.000</b>				
20.	Pengembangan Kawasan Industri Kertajati	Kec.Kertajati, Kab.Majalengka	■	■	■	■							Swasta	2.280.000			v

Ket:

■ Tahap Persiapan    ■ Tahap Konstruksi

Sumber : Perpres 87 Tahun 2021



## 4.4 Inovasi Pembangunan

Inovasi merupakan sebuah proses untuk mengatasi masalah dalam arti lebih luas melakukan sesuatu dengan cara baru ketika terjadi perubahan situasi dan rutinitas tidak berjalan, manusia melakukan eksperimen dan belajar, lebih singkatnya inovasi adalah mengembang ide baru kedalam produk atau proses baru (Cozzen dan Catalan. 2008). Seringkali permasalahan sosial yang ada dan kompleks tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa sehingga diperlukan terobosan/perubahan pada sistem yang ada agar sistem itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. **Inovasi dalam pembangunan daerah** dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima serta peningkatan daya saing daerah.

### 4.4.1 Inovasi pada Proses Perencanaan

#### 1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah daerah merupakan suatu sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi secara online untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan proses perencanaan pembangunan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan serta tepat waktu. Melalui penerapan aplikasi SIPD, maka penyusunan rencana program dan kegiatan pada RKPD dapat memiliki manfaat dari sisi transparansi, keamanan, satu pintu dan bersifat real time. Pada penyusunan RKPD tahun 2024 penggunaan SIPD sudah dipergunakan ketika pengajuan usulan dari desa/kelurahan untuk proses musrenbang baik tingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi. Proses penyampaian Pokok-pokok Pikiran Dewan secara transparan dapat dimonitor oleh para pemangku kepentingan.



**Gambar 4.3**  
**Tampilan Muka Aplikasi SIPD-RI**



Sumber : web [sipd-ri.kemendagri.go.id](http://sipd-ri.kemendagri.go.id)

## **2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Bimbingan Teknis Perencanaan Kecamatan Melalui e-RENJA”**

E-RENJA ini adalah sebuah aplikasi elektronik yang menyediakan template sistematika penulisan narasi dokumen Renja. Aplikasi e-RENJA ini merupakan upaya memberikan peningkatan pelayanan bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya template narasi Renja ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi perangkat daerah Kecamatan ketika menyusun narasi Renja karena ada sistematika baku yang sudah ditetapkan dalam aplikasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

Kebaruan/keunikan, nilai tambah dan keunggulan dari inovasi e-Renja adalah:

- Memudahkan PD Kecamatan dalam menyusun narasi dokumen Renja setiap tahunnya, karena ada panduan/template;
- Memudahkan Bappedalitbang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dokumen Renja Kecamatan (format seragam dan bisa diakses secara online);
- Paperless*, tidak perlu lagi di print untuk proses assistensi dan verifikasi dokumen;
- Pengumpulan dokumen Renja Kecamatan menjadi lebih cepat dan mudah;



- e. Bisa direplikasi untuk penyusunan narasi dokumen Renja Dinas/Badan dengan penyesuaian pada kinerja pelayanan karena Dinas/badan melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang jadi kewenangannya;

**Gambar 4.4**  
**Tampilan Muka Aplikasi E-Renja**

The screenshot shows the E-Renja application interface. The main content area displays a table titled 'Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra'. The table has columns for 'No', 'Kategori', 'Jumlah Monev Program', 'Target Monev di Aplikasi Program (dalam Persen)', 'Realisasi Target Monev Hasil Program dan Monev Kegiatan 1 & 2 Aplikasi Tahun 2022', 'Target & Realisasi Monev Program & Kegiatan Tahun 2022', 'Target Program dan Aplikasi Renja Tahun 2022', and 'Pencapaian Realisasi Capaian Target Result Pencapaian Renja 2022 (dalam % Renja)'. The table lists various programs under the 'Program Adhikarwal Perikanan' category, such as 'Pembinaan Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan (P3P)', 'Pembinaan Jasa Perikanan', 'Pembinaan Sarung Dabakan dan Pengolahan (SDP)', 'Pembinaan Jasa Sural Perikanan (JSP)', 'Pembinaan Jasa Kumpulku, Sambil Segar dan Sial (KS)', 'Pembinaan Wara Tulu Karan (WT)', 'Pembinaan Manajemen Hutan Lestari Perikanan Bergambar (MHL)', and 'Pembinaan Bahan Baku dan Perikanan Perikanan (PBP)'. Each row shows the number of Monev programs, the target percentage, and the actual realization percentage.

Sumber : Aplikasi E-Renja Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

#### 4.4.2 Inovasi pada Proses Program/Kegiatan Perangkat Daerah

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commmercial institutions*). Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP<sup>1</sup> yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan



meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan BUMDes masih terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMDes ini, khususnya di Kecamatan Cigasong. BUMDes yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk menumbuh kembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat bergantung oleh segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah dan menganggap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan hibah dari pemerintah.

Stabilitas pendapatan BUMDes tidak selalu baik, terkadang banyak masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMDes. Walaupun dalam pelaksanaannya, BUMDes di Kecamatan Cigasong telah menerima bantuan CSR dari beberapa pihak swasta dan sering mengadakan pelatihan, namun pada kenyataannya adalah BUMDes se-Kecamatan Cigasong belum mempunyai keunggulan dalam bidang usahanya tersebut secara signifikan dan belum terasa manfaatnya untuk masyarakat dikarenakan kurangnya minat, kemampuan dan keberanian dari masyarakat desa itu sendiri untuk mengembangkan potensi kewirausahaan, sehingga baik dari pihak pengurus maupun pihak masyarakat masih kurang kesadaran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya di sektor riil dan usaha mikro.

Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan unit kerja, mengidentifikasi beberapa masalah yang patut dipertimbangkan untuk dicarikan solusinya yaitu :

- 1) Kurangnya fasilitasi serta pengelolaan produk BUMDes di desa-desa se-Kecamatan Cigasong.



- 2) Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cigasong.
- 3) Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa se-Kecamatan Cigasong.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bahwa kurang optimalnya kegiatan, fasilitasi serta pengelolaan produk Bumdes di Desa-Desa Se-Kecamatan Cigasong. Maka dari itu melalui Program Kegiatan Inovasi penggunaan Media Sosial “Lapak BAGJA” & Pengemasan Kekinian di Wilayah Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka menjadi sebuah solusi dalam permasalahan tersebut.



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

#### **5.1 Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2024**

##### **5.1.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2024**

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional dan program prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Disajikan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar Rp.95.316.325.170, serta sudah diinput dalam Aplikasi Krisna Selaras dan SIPD, sebagai berikut:



**Tabel 5.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024**

Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran DAK
1. Dinas Pendidikan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	963.000.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	321.000.000
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	320.515.290
				<b>1.604.515.290</b>
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.986.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	551.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.103.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	689.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	153.000.000
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	842.000.000
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	322.000.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	613.281.070
				<b>7.259.281.070</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran DAK
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.924.000.000
			1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	750.000.000
			1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.799.000.000
			1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	200.000.000
			1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.000.000.000
			1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.000.000.000
			1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000
			1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	649.000.000
			1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	450.000.000
			Pembangunan Ruang kelas Baru	599.830.680
				<b>10.471.830.680</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran DAK
<b>Sub total Disdik</b>				<b>19.335.627.040</b>
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	959.500.000
<b>Sub total Arspusda</b>				<b>959.500.000</b>
3. Dinas Kesehatan	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	384.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran DAK
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.400.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	800.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	288.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.076.916.590
<b>Sub total Dinkes</b>				<b>15.165.916.590</b>
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.511.780.104
<b>Sub total RSUD Cideres</b>				<b>15.511.780.104</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran DAK
5. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.610.849.566
<b>Sub total RSUD Majalengka</b>				<b>3.610.849.566</b>
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.098.083.410
<b>Sub total DP3AKB</b>				<b>1.098.083.410</b>
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.000.000.000
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	18.442.090.820
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.455.000.000
<b>Sub total PUTR</b>				<b>26.897.090.820</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran DAK
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.433.586.840
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.243.188.600
<b>Sub total rumkimtan</b>				<b>11.676.775.440</b>
9. Dinas Lingkungan Hidup	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan	1.060.702.200
<b>Sub total DLH</b>				<b>1.060.702.200</b>
<b>Sub Total Bid Sanitasi</b>				<b>2.303.890.800</b>
<b>TOTAL DAK FISIK TA 2024</b>				<b>95.316.325.170</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.



### **5.1.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat (Bankeu) Tahun 2024**

Selain dari dari APBN, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disajikan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan sebesar Rp.515.798.994.098, diinput dalam aplikasi SIPD, sebagai berikut :



**Tabel 5.2**  
**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka**  
**Sumber Dana Bantuan Keuangan Tahun 2024**

Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
1.Dinas Pendidikan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	8.503.600.000
			1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	13.000.000.000
				<b>21.503.600.000</b>
			1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.328.008.000
		<b>Sub total Paud</b>		<b>27.831.608.000</b>
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.749.200.000
			1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	13.801.165.000
			1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	19.000.000.000
			1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	20.000.000.000
		<b>Sub total SD</b>		<b>58.550.365.000</b>
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	23.031.250.000
			1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	23.031.250.000
			1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	22.555.527.000
		<b>Sub total SMP</b>		<b>68.618.027.000</b>
	<b>Total Disdik</b>		<b>155.000.000.000</b>	



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
2. Dinas Kesehatan	1.02.02 PROgram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	10.000.000.000
			1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.000.000.000
			1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000.000
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.467.295.000
			1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38.102.400.000
		<b>Jumlah Dinas Kesehatan</b>		
3. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.000.000.000
	<b>Jumlah RSUD Cideres</b>			<b>14.000.000.000</b>
4. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000
	<b>Jumlah RSUD Majalengka</b>			<b>5.000.000.000</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	153.121.000.000
		Sub total		<b>153.121.000.000</b>
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	1.000.000.000
		Sub total		<b>1.000.000.000</b>
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	29.980.000.000
		Sub total		<b>29.980.000.000</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>184.101.000.000</b>
6.Dinas Permukiman dan Pertanahan	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.000.000.000
		Sub total		<b>4.000.000.000</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000
		Sub total		<b>1.500.000.000</b>
	<b>Jumlah Dinas Rumkimtan</b>			<b>5.500.000.000</b>
7.Dinas Sosial	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000.000
	<b>Total Dinsos</b>			<b>10.000.000.000</b>
8.Dinas Ketenagakerjaan. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	12.400.000.000
	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5.000.000.000
	<b>Jumlah DK2UKM</b>			<b>17.400.000.000</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000
	2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000
	<b>Jumlah Dinas P3AKB</b>			<b>600.000.000</b>
10.Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.400.000.000
	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan	7.700.000.000
	<b>Jumlah Dinas LH</b>			<b>9.100.000.000</b>
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1.100.000.000
	<b>Total Disdukcapil</b>			<b>1.100.000.000</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02 Program Penataan Desa	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	600.000.000
	2.13.02 Program Penataan Desa	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	400.000.000
	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	500.000.000
	<b>Jumlah DPMD</b>			<b>1.500.000.000</b>
13.Dinas Perhubungan	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	10.885.875.000
	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	5.442.937.500
	<b>Jumlah Dishub</b>			<b>16.328.812.500</b>



Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran BANKEU
14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.01 Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	672.000.000
	<b>Jumlah DPMPSTP</b>			<b>672.000.000</b>
15.Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.03 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.400.000.000
	<b>Jumlah DISPORA</b>			<b>2.400.000.000</b>
16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.500.000.000
	<b>Jumlah PARBUD</b>			<b>3.500.000.000</b>
17.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.420.000.000
	<b>Jumlah ARPUSDA</b>			<b>11.420.000.000</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.



## **5.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dirumuskan kedalam 6 prioritas pembangunan daerah yang dalam implemtasinya diperlukan adanya sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah dengan program, indikator program serta pendanaan setiap Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 5.3**  
**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab**

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH					
1.	Penanggulangan Kemiskinan	1.1. Menurunnya Penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,37	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat miskin berbasis data P3KE	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	Persen	95,73	6.156,99	DISDIK					
									APM SD/MI	Persen	91,25	15.982,73						
									APM SMP/MTs	Persen	88,15	3.721,08						
									APK Non Formal	Persen	86,60	1.990,68						
													Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	100	77.492,00	DINKES
													Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial	Persen	100	985,78	DINSOS
													Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin	Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin Berbasis Data P3KE	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persen	100



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
								Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	80	1.468,00	DKP3
								Persentase petani miskin yang mendapat bantuan	RTS		100		
								Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun	Persen		2,5		
								Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen		80		
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan kepala keluarga miskin yang meningkat pendapatannya	Persen	25	510,20	DP3AKB
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan	Usia/Tahun	20	6.717,00	DP3AKB



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	jumlah UMKM mempunyai NIB	Unit usaha	2.000	66.208,00	DK2UKM
									Presentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri	orang	1		
								Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan	Pemenuhan Infrastruktur dan Mendekatkan Akses Keluarga Miskin	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Presentase rumah tidak layak huni	Persen	3
2.	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Tahun	7,61	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Penurunan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	Persen	95,73	6.156,99	DISDIK
									APM SD/MI	Persen	91,25	15.982,73	
									APM SMP/MTs	Persen	88,15	3.721,08	
									APK Non Formal	Persen	86,60	1.990,68	



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
		1.3. Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	Tahun	71,35	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan dan Kualitas SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	100	77.492,00	DINKES, RSUD CIDERES & MAJALENGKA
						Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olah Raga	Peningkatan Aktivitas Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	33,47	3.086,25	DISPORA
									Tingkat Partisipasi pada Penyelenggaraan kejuaraan/Event	Persen	80,00	6.191,15	
			Prevalensi Stunting	Persen	13,76	Meningkatkan Intervensi Gizi Sensitif	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	100	77.492,00	DINKES
						Peningkatan Intervensi Gizi Spesifik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	Persen	95,73	6.156,99	DISDIK
									APM SD/MI	Persen	91,25	15.982,73	



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
									APM SMP/MTs	Persen	88,15	3.721,08	
									APK Non Formal	Persen	86,60	1.990,68	
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	Persen	8	1.600,00	DPKPP
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Terlayani Air Limbah	Persen	5	1.000,00	
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial	Persen	100	985,78	DINSOS
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	185,00	DKP3



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
									Tingkat ketersediaan Laporan Ketersediaan Harga dan Pasokan	Persen	100		
									Persentase desa yang memanfaatkan lahan pekarangan	Persen	89,1		
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Persen	100	1.600,00	DPMD
								Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	Persen	75	4.996,21	
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan	Usia/Tahun	20	6.717,00	DP3AKB
								Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi	Jumlah	10	750.000,00	DISKOMINFO



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
3.	Pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Persen	65,18	Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Peningkatkan jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbangun serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	persen	54	7.052.000	DISHUB
							Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	persen	90	4.952.150			
						Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan jalan kabupaten	Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkapanya	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap	Persen	89,5	169.000,00	PUTR
Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pengelolaan sumber daya air lainnya di Wilayah Kabupaten Majalengka	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Debit air termanfaatkan	Liter/Detik	45.294	130.431,00							



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
						Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya	Melaksanakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi	Unit	25	18.876,20	DLH
								Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan	Unit	6	5.970,90	
						Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) serta melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	85,56	997,70	
	2.2.	meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,08	Mengurangi pencemaran air	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	58,16	425,00	
						Mengurangi pencemaran Udara	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	58,16	425,00	
						Meningkatkan tutupan lahan	Pemeliharaan Tutupan Lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	58,16	425,00	



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
		2.3. Meningkatnya produktivitas daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	27,58	Meningkatkan Daya saing sumber daya Lokal	Peningkatan Jumlah IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan industri kecil dan menengah di kabupaten sesuai rencana	IKM	40	154,09	DISPERDAGIN
							Peningkatan Kualitas Produk Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	jumlah UMKM mempunyai NIB	Unit usaha	2000	66,208	DK2UKM
							Penguatan Ekosistem Digital	Program Pengembangan UMKM	Presentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri	orang	1		
						Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terfasilitasi	persen	7,04	790,88	DISPERDAGIN
							Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	Persen	5	382,72	
							Penguatan Pasar Digital (E-Commerce)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Produk yang dipromosikan	Persen	33	79,09	
						Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Penguatan Regulasi LP2B dan LSD	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	Persen	65	321	DKP3



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
									Luas lahan LP2B dan LSD	Peraturan	1		
							Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Persen	100	1.133	
							Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	80	1.468	
								Persentase petani miskin yang mendapat bantuan	RTS	100			
								Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun	Persen	2,5			
								Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	80			
						Meningkatkan Kualitas Destinasi Layak Kunjung	Peningkatan pengelolaan, promosi dan destinasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi layak kunjung	destinasi	1	330,000	DISPARBUD



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
							Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sertifikasi Pelaku ekonomi Kreatif	persen	3	230,00	
								Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	1.010	280,00	
							Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	1	55,00	
						Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyarakat Desa	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan	Persen	9,39	2.000,00	DPMD
							Peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase RT/RW yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	50	2.600,00	DPMD
							Peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, lembaga desa dan aparatur desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	Persen	75	4.996,21	DPMD



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
							Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Persen	100	1.600,00	DPMD
							Meningkatkan iklim Investasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	50	40,00	DK2UKM
							penguatan sarana prasarana pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	Poin	88,70	1.174,36	DPMPTSP
							Penguatan Promosi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	event	2	100,00	
							Menumbuhkan minat sektor pertanian	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Usaha Skala Menengah dan Besar	Investor	748	100,00	
							Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	Persen	65	321	DKP3
									Luas lahan LP2B dan LSD	Peraturan	1		



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
							Peningkatan Minat Pelatihan Keterampilan Angkatan Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	Persen	95,73	6.156,99	DISDIK
									APM SD/MI	Persen	91,25	15.982,73	
									APM SMP/MTs	Persen	88,15	3.721,08	
									APK Non Formal	Persen	86,60	1.990,68	
		2.4. Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Poin		Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Layanan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	2.993,00	SATPOLPPDAMKAR
						Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan Budaya Tertib dan Sadar Aturan Dalam Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	12.378,00	



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
									Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100		
						Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Persen	100	775,00	BAKESBANGPOL
						Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana	peningkatan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	persentase tanggap bencana	persen	100	9.860,00	BPBD
								Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	100	25,00		
								Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	orang	40	10,00		
								Jumlah warga negara yang memperoleh	Jiwa	11.000	35.333,34		



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.1. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	Meningkatkan reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	248,33	SETDA
								Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	25.141,48		
								Capaian IKM Kabupaten	Nilai	B	667,48		
								Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	20.326,00		
								Capaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	BB	343,38		
								Indeks Implementasi BERAKHLAK	Nilai	63,5	699,99		
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Tinggi	349,41	SETDA
Indeks Reformasi Hukum	Predikat	BB	910,80										



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
									Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks	100	11.534,23	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	478,80	SETDA
									Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	67,71	1.569,38	
						Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial	Persen	100	1.857,75	BKPSDM
								Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Kepegawaian	Persen	100	3.619,66	BKPSDM
						Meningkatkan ketersediaan regulasi daerah, kapasitas dan kapabelitas SDM penyelenggaraan statistik sektoral serta fasilitas dan asesibilitas media data berbasis teknologi informasi	Peningkatan pengelolaan statistik sektoral daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Dokumen	248	500.000,00	DISKOMINFO
						Meningkatkan pemerataan akses, kualitas pelayanan,	Peningkatan pemerataan akses, kualitas pelayanan,	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi	Jumlah	10	750.000,00	



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
						keamanan dan keterbukaan informasi publik	keamanan dan keterbukaan informasi publik	Program Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi	Aplikasi	18	1.261.824,00	
						Meningkatkan tatakelola standar kemanan, sarana pendukung dan sumberdaya manusia pengelola informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Sertifikat Elektronik (SE) yang terakomodir sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)				
							Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia.			Dokumen	16	300.000,00	
							Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						
							Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana keamanan informasi						



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	169,00	KECAMATAN
							Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pembangunan Desa/Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	8.513,00	KECAMATAN
								Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	31,00	KECAMATAN
								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	99,00	KECAMATAN
							Peningkatan kapasitas melalui pendampingan terhadap aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	118,00	KECAMATAN



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persen	96,00	788,00	Bappedalitbang
									Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	Persen	96,00	788,00	
						Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Level PK APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	77	1.009,00	INSPEKTORAT
						Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Diseminasi inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan	persen	70	675,00	BAPPEDALITBANG
								Indeks Inovasi Daerah yang diraih	predikat	Inovatif			
						Meningkatkan ekosistem inovasi pelayanan publik	One Agency One Innovation	Program Urusan Daerah Penunjang Pemerintah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	248,33	SETDA
								Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	25.141,48		



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp) x Juta	PERANGKAT DAERAH
									Capaian IKM Kabupaten	Nilai	B	667,48	
									Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	20.326,00	
									Capaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	BB	343,38	
									Indeks Implementasi BERAKHLAK	Nilai	63,5	699,99	
		3.2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta koordinasi dana transfer	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Realisasi Penerimaan PAD	persen	100	7.292,90	BAPENDA
								Program Pengelolaan barang milik daerah	Capaian Dana Transfer	Persen	100	2.406,60	BKAD
								Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	3.469,00	

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.



### **5.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD Tahun 2024**

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2024 dengan sasaran PN RKP Tahun 2024; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan PN RKP Tahun 2024; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2024. Dukungan Program Prioritas dan Pendanaan Daerah terhadap Program prioritas nasional dalam Rancangan RKP 2024 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 5.4**  
**Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional Dalam Rancangan RKP 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Majalengka 2024**

NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>		
1	01 . 03	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	355.000.000
			2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000
			2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.710.000.00
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	667.068.200
2	01 . 04	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	958.489.500
			3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	120.000.000
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.710.000.000
3	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	593.503.816.159
			2.17.03 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.000.000
			2.17.04 - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000
			2.17.05 - Program Pendidikan Dan Latihan	40.000.000



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			2.17.06 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	40.000.000
			2.17.07 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dasaha Mikro (UMKM)	175.000.000
			2.17.08 - Program Pengembangan UMKM	25.000.000
			2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000
			3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	449.999.800
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	113.399.500
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	71.700.000
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	667.068.200
4	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000
			2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal	100.000.000
			2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	552.300.000
			2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	448.248.198
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	113.399.500



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	71.700.000
			3.31.02 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	139.999.900
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	667.068.200
5	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.100.000.000
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	71.700.000
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.710.000.000
			5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	588.352.045.901
			5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.107.565.860
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.626.337.050
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	667.068.200
<b>II.</b>	<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>		
1	02 . 02	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.006.321.650
			2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	39.001.948.709



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
III.	3	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>		
1	03 . 01	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	2.12.02 - Program Pendaftaran Penduduk	196.090.000
			2.12.03 - Program Pencatatan Sipil	95.290.000
			2.12.04 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.460.000
			2.12.05 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.500.000
			2	03 . 02
			1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial	1.983.967.000
			1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.312.000.000
			1.06.06 - Program Penanganan Bencana	1.160.400.000
			1.06.07 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	61.200.000
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000
3	03 . 03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	593.503.816.159
			1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.463.208.974.531
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	667.068.200
4	03 . 04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	593.503.816.159
			1.01.04 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	65.000.000



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	03 . 05	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	400.000.000
			2.08.03 - Program Perlindungan Perempuan	150.000.000
			2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	175.000.000
			2.08.06 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	225.000.000
			2.08.07 - Program Perlindungan Khusus Anak	4.719.750.000
			2.14.02 - Program Pengendalian Penduduk	417.000.000
			2.14.03 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.262.398.185
			2.14.04 - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.885.000.000
			2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	490.409.000
			2.19.03 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	6.505.941.550
2.19.04 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.350.000.000			
6	03 . 07	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	593.503.816.159
			1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi	995.000.000
			1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.568.497.400



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.453.537.250
			2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.006.321.650
			2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.100.000.000
			2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	490.409.000
			2.19.03 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	6.505.941.550
			2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	287.697.360
			3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	958.489.500
			3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	120.000.000
			3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739.000.000
			3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	449.999.800
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	113.399.500
			5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	5.730.187.905
			5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.235.605.370



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
<b>IV.</b>	<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>		
1	04 . 02	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2.13.03 - Program Peningkatan Kerja Sama Desa	2.250.000.000
			2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan	8.420.000.000
			2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.000.000
			2.22.06 - Program Pengelolaan Permuseuman	5.000.000
2	04 . 04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	2.168.559.000
			2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan	8.420.000.000
			2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.000.000
			2.23.02 - Program Pembinaan Perpustakaan	32.062.400.000
			8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.370.739.000
			8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.210.163.000
			8.01.04 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	291.020.000
			8.01.05 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	250.000.000



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	625.000.000
<b>V.</b>	<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>		
1	05 . 01	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	593.503.816.159
2	05 . 02	Infrastruktur Ekonomi	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	958.489.500
			3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	320.000.000
			3.26.03 - Program Pemasaran Pariwisata	211.300.000
			3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	253.700.000
			3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	739.000.000
3	05 . 03	Infrastruktur Perkotaan	1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	104.225.966.216
			1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	39.497.977.017
			1.03.04 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	5.800.000.000
			1.03.05 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air	3.789.318.498



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			1.03.06 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	248.620.000
			1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung	5.625.000.000
			1.03.09 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	27.911.750.000
			1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan	282.114.807.903
			1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi	995.000.000
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.110.000.000
			1.04.03 - Program Kawasan Permukiman	600.000.000
			1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	548.620.000
			2.13.03 - Program Peningkatan Kerja Sama Desa	2.250.000.000
			2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	39.001.948.709
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	9.086.584.284
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.626.337.050
			5	05 . 05
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.110.000.000
			2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	552.300.000



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			2.18.06 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	95.000.000
			3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	40.000.000
			4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	15.310.222.504
			5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.639.015.000
			5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.150.708.300
<b>VI.</b>	<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>		
1	06 . 01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	2.168.559.000
			2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000
			2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	291.300.000
			2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.868.210.000
			2.11.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.500.000
			2.11.10 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan	6.540.684.736
			3.28.04 - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	100.000.175
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.710.000.000
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	667.068.200
2	06 . 02	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan	85.395.200
			1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	2.168.559.000
			1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.453.537.250
			2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	291.300.000
<b>VII.</b>	<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>		
1	07 . 01	Konsolidasi Demokrasi	4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	9.086.584.284
2	07 . 03	Penegakan Hukum Nasional	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.568.497.400
3	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	593.503.816.159
			2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	287.697.360
			2.24.02 - Program Pengelolaan Arsip	248.055.500
			2.24.03 - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	132.880.000



NO	RKP		RKPD 2024	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	149.999.400
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	113.399.500
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	71.700.000
4	07 . 05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.568.497.400
			2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	198.000.000
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	149.999.400
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	9.086.584.284
			5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.150.708.300

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.



Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Rencana Program Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 5.2 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 terlampir pada Buku 2 RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Sedangkan rincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 5.5**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran**  
**Per Perangkat Daerah Tahun 2024**

Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	3	12	104	1,141,931,547,080
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	5	22	75	334,107,247,273
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Argapura	4	4	25	2,366,502,696
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Maja	4	4	25	4,037,779,966
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Sukahaji	4	4	25	2,237,052,704
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Talaga	4	4	25	4,886,855,178
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sumberjaya	4	4	25	3,640,486,198
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Cikijing	4	4	25	4,830,534,442
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Cingambul	4	4	25	2,709,794,870
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Majalengka	3	3	24	2,317,005,586
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kertajati	4	4	25	1,636,302,091
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Leuwimunding	4	4	25	3,678,905,742
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Ligung	4	4	25	4,167,940,904
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kadipaten	4	4	25	3,202,745,075
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Jatiwangi	4	4	25	3,523,984,499
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Salagedang	4	4	25	1,243,645,784
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Munjul	4	4	25	1,890,094,936
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Lemahsugih	4	4	25	2,251,185,913
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Jatitujuh	4	4	25	2,408,519,586



Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Banjaran	4	4	25	1,878,502,342
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Loji	4	4	25	2,128,452,124
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Rajagaluh	4	4	25	3,177,968,071
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Sindangwangi	3	3	24	2,177,861,398
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Kasokandel	4	4	25	2,729,621,616
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Panyingkiran	4	4	25	2,103,239,886
1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Malausma	4	4	25	3,117,044,585
1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Margajaya	4	4	25	2,251,433,343
1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Panongan	4	4	25	1,286,599,432
1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Balida	4	4	25	2,224,849,930
1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Waringin	4	4	25	2,594,124,656
1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Sindang	4	4	25	1,455,512,046
1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Bantarujeg	4	4	25	4,256,995,514
1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Sukamulya	4	4	25	1,256,741,006
1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Cigasong	4	4	25	2,433,718,793
1.02.0.00.0.00.01.0033	Labkesda Majalengka	2	2	2	950,000,000
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	2	3	2	157,477,211,963
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	2	3	2	224,223,573,569
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	19	63	262,527,435,280
1.04.2.10.1.03.1..0000	Dinas Perumahan, Kawasan	10	16	31	28,418,602,682



Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Permukiman dan Pertanahan				
1.05.0.00.0.00.2..0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	47	4,980,674,805
1.05.0.00.0.00.3..0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	11	52	15,020,826,000
1.06.0.00.0.00.1..0000	Dinas Sosial	6	13	40	18,666,869,000
2.07.2.17.3.32.1..0000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	18	45	23,814,362,328
2.08.2.14.0.00.1..0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9	22	50	22,010,604,390
2.09.3.27.3.25.1..0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11	24	50	36,195,285,100
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	9	15	50	26,105,817,638
2.12.0.00.0.00.1..0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	43	8,092,030,500
2.13.0.00.0.00.1..0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	10	38	14,065,090,400
2.15.0.00.0.00.1..0000	Dinas Perhubungan	2	16	53	39,801,887,282
2.16.2.20.2.21.1..0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	34	6,505,724,585
2.18.0.00.0.00.1..0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	35	6,517,364,546
2.19.0.00.0.00.1..0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	15	45	15,036,820,280



Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
2.24.2.23.0.00.1..0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	4	14	37	17,502,864,145
3.26.2.22.0.00.1..0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9	20	49	10,579,094,783
3.30.3.31.0.00.1..0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	15	45	8,991,237,151
4.01.0.00.0.00.1..0000	Sekretariat Daerah	3	20	64	55,015,739,497
4.02.0.00.0.00.1..0000	Sekretariat DPRD	2	15	48	56,829,367,297
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5	19	57	10,607,454,300
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	51	506,660,375,643
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	2	8	37	12,675,181,480
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	44	19,964,802,000
6.01.0.00.0.00.1..0000	Inspektorat	3	11	42	11,832,608,700
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Majalengka	6	16	44	15,841,168,518
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Jatiwangi	6	15	38	4,583,298,100
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Palasah	6	14	37	2,262,164,600
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sumberjaya	6	14	42	1,989,237,700
7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Leuwimunding	6	14	40	2,292,273,000
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Rajagaluh	6	14	43	2,736,620,600
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Sindangwangi	6	14	43	2,723,592,000
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Sindang	6	14	41	2,398,764,849
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Sukahaji	6	14	40	2,610,569,300



Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.18.00	Kecamatan Maja	6	14	37	2,635,454,300
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Argapura	6	14	39	2,674,265,500
7.01.0.00.0.00.2..0000	Kecamatan Cigasong	6	15	45	6,521,565,500
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Malausma	6	14	43	2,262,567,100
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Talaga	6	15	34	2,402,249,500
7.01.0.00.0.00.22.00	Kecamatan Cikijing	6	14	44	2,391,686,600
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Dawuan	6	14	36	2,283,367,900
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Banjaran	6	14	35	2,490,357,600
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Bantarujeg	6	14	42	2,325,009,600
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Lemahsugih	6	14	36	2,253,542,100
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Cingambul	6	14	35	2,699,373,600
7.01.0.00.0.00.3..0000	Kecamatan Panyingkiran	6	14	43	2,011,622,000
7.01.0.00.0.00.4..0000	Kecamatan Kadipaten	6	13	38	2,735,380,400
7.01.0.00.0.00.6..0000	Kecamatan Kasokandel	6	14	37	2,282,614,600
7.01.0.00.0.00.7..0000	Kecamatan Kertajati	6	14	43	2,813,870,900
7.01.0.00.0.00.8..0000	Kecamatan Jatitujuh	6	14	38	2,683,830,600
7.01.0.00.0.00.9..0000	Kecamatan Ligung	6	14	36	2,878,693,800
8.01.0.00.0.00.1..0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	27	4,879,325,167
<b>Jumlah</b>					<b>3,271,872,166,043</b>

Sumber: SIPD Perencanaan RKPD Tahun 2024, diolah.



#### 5.4 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal karena Peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa *mandatory spending* bagi pemerintah daerah yaitu: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). *Mandatory spending* tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran SPM di Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan



pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 5.6**  
**Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	461.873.330.186	DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK, BANKEU PROVINSI
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	79.047.897.356	DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK, BANKEU PROVINSI
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	13.360.048.580	DAU, DAK NON FISIK
		3.	Pendidikan Anak Usia Dini		Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	481.493.412.724	DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK, BANKEU PROVINSI



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
				Masyarakat	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
7.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
8.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
9.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
10.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
11.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
12.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang	100 %				



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	penderita Diabetes Melitus	mendapatkan layanan kesehatan					
13.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %				
14.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
15.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %				
16.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	39.997.000.000	DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK, BANKEU PROVINSI



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
17.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten	3.789.320.000	DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK, BANKEU PROVINSI
18	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Bantuan relokasi Korban Bencana	100%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.615.456.000,00	DAU,
19	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan ketentraman dan Ketertiban umum	100%	Program Peningkatan ketentraman dan ketertuban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.275.111.400,00	DAU
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.447.651.211,00	DAU, DBHCHT



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
20	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	10.000.000,00	DAU
21	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Program penanggulangan bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.359.564.000,00	DAU
22	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25.000.000,00	DAU
23	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelanatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	603.595.000,00	DAU
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	13.907.700,00	DAU



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Investigasi Kejadian Kebakaran	14.999.900,00	DAU
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	201.158.900,00	DAU
24.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, telantar serta gelandangan pengemis diluar Panti sosial	1.980.000.000	DAU
25.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %				
26.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %				
27.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %				



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
28.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten	210.000.000	DAU

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.



## **5.5 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024**

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan serta kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terpetakan kedalam setiap urusan pemerintahan yang meliputi; urusan wajib Pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan dan 40 program yang dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah; urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan dan 70 program yang dilaksanakan oleh 13 Perangkat Daerah; urusan pilihan terdiri dari 5 urusan dan 20 program yang dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 urusan dan 5 program yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah; unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 5 urusan dan 13 program yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan terdiri dari 1 unsur pengawasan dan 3 program yang dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah, unsur kewilayahan terdiri dari 1 unsur kewilayahan dan 6 program yang dilaksanakan oleh 26 Kecamatan, unsur pemerintahan umum terdiri dari 1 urusan dan 6 program yang dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah dengan dukungan pendanaan masih bersifat indikatif. Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, dapat dilihat Buku 2 (dua) RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada awal periode RPD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. **Aspek kesejahteraan masyarakat** diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Majalengka terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. **Aspek pelayanan umum** mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan **aspek daya saing daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Majalengka, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka Indikator Kinerja Daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

**Indikator Makro Pembangunan** untuk melihat kemajuan pembangunan daerah secara rinci pada kondisi normal sesuai RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1**

**Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		PROYEKSI
			2021	2022	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,81	68,56	68,90
	<i>Usia Harapan Hidup</i>	Tahun	70,46	70,76	71,35
	<i>Harapan Lama Sekolah</i>	Tahun	12,23	12,24	12,26
	<i>Rata-Rata Lama Sekolah</i>	Tahun	7,31	7,49	7,61
	<i>Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan</i>	Ribu Rupiah	9.591	9.950	9.955
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,71	4,16	4,44
	Jumlah Pengangur	jiwa	37.182	27.089	28.912
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,33	11,94	10,56
	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	151.140	147.120	143.245
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	6,63	6,72
5.	Indeks Gini	Poin	0,354	0,367	0,329

Sumber: Diolah dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian

beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
			2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56
2.	Rata rata Lama Sekolah	Persen	7,31	7,49	7,52	7,61
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	70,46	70,76	70,60	71,35
4.	Prevalensi Stunting	Persen	3,52	3,84	3,5	3,25
5.	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	N/A	65,18
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,32	64,81	66,29	67,08
7.	Nilai PDRB (ADHK)	Opini	22,79	24,30	25,85	27,58
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	5,71	4,16	4,88	4,44
9.	Indeks Indeks Trantibum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	CC
11.	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Diolah dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Selanjutnya indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 6.3

**Tabel 6.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
<b>1.</b>	<b>Aspek kesejahteraan masyarakat</b>	
<b>A.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>	
1.1	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]	6,72
1.2	PDRB per kapita ADHB	28.750
1.3	PDRB per kapita ADHK Tahun Dasar 2010	20,205,102
1.4	Indeks Gini	0,329
<b>B.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>	
1.5	Tingkat kemiskinan	10,56
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,9

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
1.7	Harapan Lama Sekolah	12,26
1.8	Rata lama sekolah	7,61
1.9	Usia harapan hidup	71,35
1.10	Persentase balita gizi buruk	0,02
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,75%
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	4,44
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
1.15	Opini BPK	WTP
1.16	Indeks Pembangunan Gender	86,7
1.17	Indeks Pemberdayaan Gender	62,5
<b>2.</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>	
<b>A.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>	
2.1	PDRB ADHB [Milliar Rp]	31,223,404
2.2	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [Milliar Rp]	27,58
2.3	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	9.960

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>PENDIDIKAN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	506.177,17	DISDIK
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	108,41	DISDIK
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	502.748,35	DISDIK
					3.320,41	DISDIK
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				496.355,44	DISDIK
		APM PAUD	Persen	95,73	24.625,07	DISDIK
		APM SD/MI	Persen	91,25	379.431,71	DISDIK
		APM SMP/MTs	Persen	88,15	77.714,88	DISDIK
		APK Non Formal	Persen	86,6	14.583,78	DISDIK
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persen	15	65,00	DISDIK



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
<b>KESEHATAN</b>						
					123.316,11	DINKES
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	101,00	DINKES
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	120.835,44	DINKES
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	2.379,67	DINKES
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	100	110.271,41	DINKES
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase standar kompetensi tenaga kesehatan	Persen	100	127,72	DINKES
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	Persen	100	419,73	DINKES
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penguatan Gerakan Masyarakat Menuju Hidup Sehat	Persen	80	812,86	DINKES
<b>RSUD MAJALENGKA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			82	150.829,78	RSUD MAJALENGKA
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Persen	82	123.050,00	RSUD MAJALENGKA
		Standar Pelayanan Minimal	Persen	81	27.779,78	RSUD MAJALENGKA
		Akreditasi Rumas Sakit	Nilai	Pari purna		RSUD MAJALENGKA
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit	persen	78	0,00	RSUD MAJALENGKA
<b>RSUD CIDERES</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			82	150.829,78	
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Persen	82	123.050,00	RSUD CIDERES
		Standar Pelayanan Minimal	persen	81	27.779,78	RSUD CIDERES
Akreditasi Rumas Sakit	Nilai	Pari purna	RSUD CIDERES			
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	78	0,00	RSUD CIDERES
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
					34.355,00	DPUTR
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	180,00	DPUTR
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	30.000,00	DPUTR
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	4.175,00	DPUTR



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Debit air dimanfaatkan	Persen	85	130.431,00	DPUTR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	persen	8	20.098,00	DPKPP
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang Terlayani Air Limbah	persen	5	1.000,00	DPKPP
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	3	600,00	DPKPP
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan poros desa dalam kondisi baik	persen	25	5.000,00	DPKPP
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah gedung yang memiliki Sertifikat Laif Fungsi	Unit	0,62	18.876,70	DPUTR
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan	Unit	6	5.970,90	DPUTR
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap	Persen	89,5	169.000,00	DPUTR
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan teruji	Persen	2	370,00	DPUTR
		Persentase kelembagaan jasa konstruksi yang tertib administrasi	Persen	8	295,00	DPUTR
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	85,56	997,70	DPUTR
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.480,84	DPKPP
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	21,54	DPKPP
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	6.713,30	DPKPP
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	1.746,00	DPKPP
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase rumah tidak layak huni	Presentase			
		Tersedianya dokumen rumah tidak layak huni	Dokumen	1	100,00	DPKPP
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase rumah tidak layak huni	Persen			DPKPP
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum	Lokasi	2	400,00	DPKPP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik	Lokasi	2	9.937,00	DPKPP



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,00	SATPOL PP DAMKAR
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		SATPOL PP DAMKAR
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		SATPOL PP DAMKAR
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		SATPOL PP DAMKAR
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9,10	SATPOL PP DAMKAR
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100		SATPOL PP DAMKAR
		Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100		SATPOL PP DAMKAR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.022,66	BPBD
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	80,00	BPBD
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.059,66	BPBD
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	883,00	BPBD
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase tanggap bencana	persen	100	9.860,00	BPBD
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	100	25,00	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	orang	40	10,00	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh	Jiwa	11.000	35.333,00	BPBD
5	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	941,00	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.470,16	DINSOS
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	80,00	DINSOS
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.268,19	DINSOS
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100,19	DINSOS
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	persen	100	10.871,50	DINSOS
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial	Persen	100	1.143,96	DINSOS



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
		Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial	persen	100	985,78	DINSOS
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	1.066,36	DINSOS
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	129,09	DINSOS
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>						
<b>TENAGA KERJA</b>						
					5.529,50	DK2UKM
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	52,50	DK2UKM
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	5.093,49	DK2UKM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	334,91	DK2UKM
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	100,00	DK2UKM
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	10	17.440,00	DK2UKM
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	2.300	8.365,82	DK2UKM
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Memiliki dokumen Hubungan Industrial	Persen	50	146,21	DK2UKM
<b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
					4.618,38	DP3AKB
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	73,00	DP3AKB
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.034,47	DP3AKB
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	525,74	DP3AKB
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22	508,00	DP3AKB



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	70,75	DP3AKB
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan kepala keluarga miskin yang meningkat pendapatannya	Persen	25	550,00	DP3AKB
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Nilai (Minimal )	500,06	64,25	DP3AKB
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Anak	Persen	100	75,00	DP3AKB
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Fertilitas total (TFR/Total Fertility Rate)	Anak	2,17	664,83	DP3AKB
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	80,09	8.429,76	DP3AKB
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan	Usia/Tahun	20	6.922,70	DP3AKB
<b>PANGAN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	78	31.791,27	DKP3
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		
		Capain SKM Perangkat Daerah	Predikat	B		
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	78		
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	185,00	DKP3
		Tingkat ketersediaan Laporan Ketersediaan Harga dan Pasokan	Persen	100		
		Persentase desa yang memanfaatkan lahan pekarangan	Persen	0,5		
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa rentan pangan yang mendapatkan penanganan kerawanan pangan	Desa	4	57,50	DKP3
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.392,26	DLH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	20,81	DLH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	8.036,20	DLH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	319,00	DLH
2	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Pemenuhan	Persen	25	0	DLH



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Lingkungan Hidup				
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	58,16	311,30	DLH
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan Lahan	Poin	50,97	1.555,57	DLH
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	100	0	DLH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	55,50	DLH
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	100	60,00	DLH
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan	Buah	1	0	DLH
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	10,00	DLH
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	Persen	99	69.604,77	DLH
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	Persen	7,12	8.760,70	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.797,81	DISDUKCAPIL
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	21,00	DISDUKCAPIL
		Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Penunjang Pelayanan	Persen	100	6.678,00	DISDUKCAPIL
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.283,50	DISDUKCAPIL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	A	916,00	DISDUKCAPIL
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	Persen	99	300,00	DISDUKCAPIL
		Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk	Persen	100	5,00	DISDUKCAPIL
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				45,65	DISDUKCAPIL
		Cakupan	Persen	99	30,00	DISDUKCAPIL



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
		Kepemilikan Akta Kelahiran Anak				L
		Cakupan Pelayanan Perkawinan Penduduk	Persen	100	15,65	DISDUKCAPI L
					47,37	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana SIAK	Persen	100	12,37	DISDUKCAPI L
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	17	35,00	DISDUKCAPI L
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten	Dokumen	1	17,70	DISDUKCAPI L
<b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
					5.026,87	DPMD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	80,00	DPMD
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.968,72	DPMD
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	50,17	DPMD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan	Persen	9,39	3.810,00	DPMD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase RT/RW yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	50	3.150,00	DPMD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	Persen	75	4.888,21	DPMD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Persen	100	2.100,00	DPMD
<b>PERHUBUNGAN</b>						
					14.012,25	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B	17,00	DISHUB
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	12.672,28	DISHUB
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	2.086,03	DISHUB
					25.789,93	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	persen	54	20.585,07	DISHUB
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	persen	90	4.952,15	DISHUB
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Sakip	Nilai	BB	5.218,00	
					55,50	DISKOMINF



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah				O
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	5.116,55	DISKOMINF O
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100,58	DISKOMINF O
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi	Jumlah	10	576,82	DISKOMINF O
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi	Aplikasi	18	638,91	DISKOMINF O
<b>PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Sertifikat Elektroknik (SE) yang terakomodir sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Dokume n	16	81,00	DISKOMINF O
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- undangan	Persen	10	20,00	DK2UKM
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Persen	3	20,00	DK2UKM
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	persen	5	298,83	DK2UKM
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentasi peningkatan Volume usaha Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	1	46,20	DK2UKM
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	jumlah UMKM mempunyai NIB	Unit usaha	2000	57,50	DK2UKM
		Presentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri	Persen	1		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Rata-rata peningkatan omset usaha mikro	Persen	3	571,54	
<b>PENANAMAN MODAL</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.396,75	DPMTSP
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	30,00	DPMTSP
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	3.926,12	DPMTSP
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	345,80	DPMTSP
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Usaha Skala Menengah dan Besar	Investor	0	100,00	DPMTSP
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	event	0	25,00	DPMTSP
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	Point	88,07	560,36	DPMTSP
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA/PMDN yang tertib LKPM	Pelaku Usaha	50	358,24	DPMTSP
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA	Persentase Pemanfaatan Data	Persen	0	672,00	DPMTSP



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	dan Informasi Penanaman Modal				
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
					4.307,01	DISPORA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	74,07	DISPORA
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	3.991,98	DISPORA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	343,16	DISPORA
						726,99
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	Persen	3,5	226,99	DISPORA
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	21,81	500,00	DISPORA
						13.059,25
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	33,47	3.086,25	DISPORA
		Tingkat Partisipasi pada Penyelenggaraan kejuaraan/Event	Persen	80	10.191,15	DISPORA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	Persen	47,05	500,00	DISPORA
<b>STATISTIK</b>						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Dokume n	500	140,99	DISKOMINF O
<b>KEBUDAYAAN</b>						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	OPK	10	241,68	DISPARBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi	Seni Tradisio nal	1	150,00	DISPARBUD
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola	Sejarah desa/kel urahan	1	15,00	DISPARBUD
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	1	50,00	DISPARBUD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	jumlah Museum yang direvitalisasi	Museum	1	49,95	DISPARBUD
<b>PERPUSTAKAAN</b>						
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				11.580,36	ARPUSDA
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47	6.837,12	ARPUSDA
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	1,79	4.767,59	ARPUSDA
<b>KEARSIPAN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				4.755,07	ARPUSDA
		Capaian Sakip	Nilai	BB	60,54	ARPUSDA



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah				
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.037,74	ARPUSDA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	713,72	ARPUSDA
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	45,00	254,31	ARPUSDA
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				128,60	
		Rasio pengelola arsip	Persen	100	60,30	ARPUSDA
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	45,00	68,30	ARPUSDA
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	Persen	2	217,19	DKP3
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah omset pemasaran produk perikanan	Persen	1	90,00	DKP3
		Jumlah pelaku usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah	5		DKP3
<b>PARIWISATA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.750,55	DISPARBUD
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	95,60	DISPARBUD
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	5.384,32	DISPARBUD
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	268,00	DISPARBUD
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi layak kunjung	destina si	1	3.818,27	DISPARBUD
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjung an	1.010.00 0	241,71	DISPARBUD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	Persen	30	31,80	DISPARBUD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase Sertifikasi Pelaku ekonomi Kreatif	persen	3	230,00	DISPARBUD
<b>PERTANIAN</b>						
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	80	5.009,82	DKP3
		Persentase petani miskin yang	RTS	100		



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
		mendapat bantuan				
		Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun	Persen	2,5		
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	80		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertania	Persen	65	7.112,89	DKP3
		Luas lahan LP2B dan LSD	Peraturan	1		
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menula	Persen	100	378,95	DKP3
		Penjaminan Keamanan pangan asal hewan	Ekor / Sampel	600		
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan pertanian yang terfasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Ha	6.100	50,00	DKP3
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Persen	100	1.435,47	DKP3
<b>PERDAGANGAN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.013,17	DISPERDAGI N
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Persen	BB	51,95	DISPERDAGI N
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	6.837,21	DISPERDAGI N
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	401,27	DISPERDAGI N
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terfasilitasi	persen	3,64	927,28	DISPERDAGI N
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedia pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	persen	100	291,82	DISPERDAGI N
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	Persen	5	200,00	DISPERDAGI N
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat pengaduan konsumen	Persen	10	105,00	DISPERDAGI N
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Produk yang dipromosikan	Persen	33	150,00	DISPERDAGI N
<b>PERINDUSTRIAN</b>						
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan industri kecil dan menengah di kabupaten sesuai rencana	IKM	40	1.349,47	DISPERDAGI N
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan fasilitasi perizinan usaha industri	Persen	100	43,00	DISPERDAGI N
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFROMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha industri Kecil dan Mengengah dalam melaporkan	Persen	56	95,00	DISPERDAGI N



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
		aktivitasnya				
<b>URUSAN PENUNJANG</b>						
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.822,27	BAPPEDA LITBANG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	109,20	BAPPEDA LITBANG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	7.707,25	BAPPEDA LITBANG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	200,42	BAPPEDA LITBANG
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.462,49	BAPPEDA LITBANG
		Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persen	96	351,00	BAPPEDA LITBANG
		Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	Persen	96	1.111,49	BAPPEDA LITBANG
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD	Persen	96	1.416,84	BAPPEDA LITBANG
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				474,10	BAPPEDA LITBANG
		Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan	persen	70	272,05	BAPPEDA LITBANG
		Indeks Inovasi Daerah yang diraih	predikat	Inovatif	212,05	BAPPEDA LITBANG
<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.530,06	BKPSDM
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	80,00	BKPSDM
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	13.727,33	BKPSDM
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	1.164,05	BKPSDM
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Dokumen Kepegawaian	Persen	100	3.674,66	BKPSDM
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial	Persen	100	1.902,75	BKPSDM
<b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.183,95	BKAD
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	80,00	BKAD
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	24.381,42	BKAD



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	969,32	BKAD
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	487.039,78	BKAD
		Capaian Dana Transfer	Persen	100		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	100	2.292,00	BKAD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.870,57	BAPENDA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	30,00	BAPENDA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	5.961,17	BAPENDA
		Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	803,82	BAPENDA
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Realisasi Penerimaan PAD	persen	100	5.834,56	BAPENDA
<b>FUNGSI LAINNYA</b>						
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				54.151,03	SETDA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	248,33	
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	25.318,23	
		Capaian IKM Kabupaten	Nilai	B	667,48	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	27.449,25	
		Capaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	BB	343,38	
		Indeks Implementasi BERAKHLAK	Nilai	63,5	699,99	
						15.672,67
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Tinggi	952,64	
		Indeks Reformasi Hukum	Predikat	BB	910,80	
		Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	40	13.534,23	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Nilai	40	2.455,16	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	67,71	2.169,38	
<b>INSPEKTORAT</b>						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase AKIP OPD yang dievaluasi dengan nilai BB	Persen	100	1.303,10	INSPEKTORAT
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	77	889,35	INSPEKTORAT



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	Persen	100	9.640,15	INSPEKTORAT
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya Kebutuhan Urusan Dasar/Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100	47.233,47	SEKRETARIAT DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	9.595,65	SEKRETARIAT DPRD
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				3.699,60	KESBANGPOL
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KESBANGPOL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KESBANGPOL
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KESBANGPOL
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	671,90	KESBANGPOL
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	46.815,78	KESBANGPOL
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	169,00	KESBANGPOL
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	125,00	KESBANGPOL
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	319,85	KESBANGPOL
<b>KECAMATAN</b>						
<b>KECAMATAN ARGAPURA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.536,21	KECAMATAN ARGAPURA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN ARGAPURA
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN ARGAPURA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan	Persen	100		KECAMATAN ARGAPURA



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
		Perkantoran				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	40,00	KECAMATAN ARGAPURA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	10,00	KECAMATAN ARGAPURA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	11,400	KECAMATAN ARGAPURA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	49,28	KECAMATAN ARGAPURA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	27,78	KECAMATAN ARGAPURA
<b>KECAMATAN BANJARAN</b>						
					2.329,75	KECAMATAN BANJARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN BANJARAN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN BANJARAN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN BANJARAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	33,75	KECAMATAN BANJARAN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	4,5	KECAMATAN BANJARAN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	8,50	KECAMATAN BANJARAN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	88,93	KECAMATAN BANJARAN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	24,93	KECAMATAN BANJARAN
<b>KECAMATAN BANTARUJEG</b>						
					2.130,91	KECAMATAN BANTARUJEG
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN BANTARUJEG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN BANTARUJEG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN BANTARUJEG
2	PROGRAM	Persentase warga	Persen		37,60	KECAMATAN



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan		100		BANTARUJE G
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	12,16	KECAMATAN BANTARUJE G
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	13,91	KECAMATAN BANTARUJE G
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	105,56	KECAMATAN BANTARUJE G
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	24,87	KECAMATAN BANTARUJE G
<b>KECAMATAN CIGASONG</b>						
					5.368,65	KECAMATAN CIGASONG
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN CIGASONG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN CIGASONG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN CIGASONG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	51,00	KECAMATAN CIGASONG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	963,92	KECAMATAN CIGASONG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	10,00	KECAMATAN CIGASONG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	87,00	KECAMATAN CIGASONG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	41,00	KECAMATAN CIGASONG
<b>KECAMATAN CIKIJING</b>						
					2.231,60	KECAMATAN CIKIJING
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN CIKIJING
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN CIKIJING
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN CIKIJING
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	41,29	KECAMATAN CIKIJING
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Pemberdayaan	Persen	100	12,50	KECAMATAN CIKIJING



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH	
				TARGET	PAGU (Juta Rp )		
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	masyarakat desa dan kelurahan					
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	10,90	KECAMATAN CIKIJING	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	73,03	KECAMATAN CIKIJING	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	28,21	KECAMATAN CIKIJING	
<b>KECAMATAN CINGAMBUL</b>							
					2.469,91	KECAMATAN CINGAMBUL	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN CINGAMBUL	
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN CINGAMBUL	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100			KECAMATAN CINGAMBUL
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	64,31	KECAMATAN CINGAMBUL	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	17,78	KECAMATAN CINGAMBUL	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	16,00	KECAMATAN CINGAMBUL	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	96,60	KECAMATAN CINGAMBUL	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	34,78	KECAMATAN CINGAMBUL	
<b>KECAMATAN DAWUAN</b>							
					2.089,00	KECAMATAN DAWUAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN DAWUAN	
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN DAWUAN	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100			KECAMATAN DAWUAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	45,93	KECAMATAN DAWUAN	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	24,78	KECAMATAN DAWUAN	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Peningkatan Wawasan	Persen	100	56,70	KECAMATAN DAWUAN	



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAHAN UMUM	Kebangsaan				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	46,95	KECAMATAN DAWUAN
<b>KECAMATAN JATITUJUH</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.683,83	KECAMATAN JATITUJUH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN JATITUJUH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN JATITUJUH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN JATITUJUH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	38,52	KECAMATAN JATITUJUH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Persen	100	4,30	KECAMATAN JATITUJUH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	4,68	KECAMATAN JATITUJUH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	97,55	KECAMATAN JATITUJUH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	21,64	KECAMATAN JATITUJUH
<b>KECAMATAN JATIWANGI</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.356,79	KECAMATAN JATIWANGI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN JATIWANGI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN JATIWANGI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN JATIWANGI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	79,58	KECAMATAN JATIWANGI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	28,70	KECAMATAN JATIWANGI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	22,22	KECAMATAN JATIWANGI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	56,71	KECAMATAN JATIWANGI



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	57,05	KECAMATAN JATIWANGI
<b>KECAMATAN KADIPATEN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.561,11	KECAMATAN KADIPATEN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN KADIPATEN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN KADIPATEN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN KADIPATEN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	43,40	KECAMATAN KADIPATEN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	3,31	KECAMATAN KADIPATEN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	27,26	KECAMATAN KADIPATEN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	78,40	KECAMATAN KADIPATEN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	26,20	KECAMATAN KADIPATEN
<b>KECAMATAN KASOKANDEL</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.232,10	KECAMATAN KASOKANDEL
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN KASOKANDEL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN KASOKANDEL
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN KASOKANDEL
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	17,75	KECAMATAN KASOKANDEL
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	0,00	KECAMATAN KASOKANDEL
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	0,00	KECAMATAN KASOKANDEL
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	54,50	KECAMATAN KASOKANDEL
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase desa yang meningkat	Persen	100	17,06	KECAMATAN KASOKANDEL



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAHAN DESA	status perkembangannya				L
<b>KECAMATAN KERTAJATI</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.614,03	KECAMATAN KERTAJATI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN KERTAJATI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN KERTAJATI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN KERTAJATI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	44,71	KECAMATAN KERTAJATI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	19,35	KECAMATAN KERTAJATI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	18,14	KECAMATAN KERTAJATI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	78,20	KECAMATAN KERTAJATI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	39,45	KECAMATAN KERTAJATI
<b>KECAMATAN LEMAHSUGIH</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.003,22	KECAMATAN LEMAHSUGI H
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN LEMAHSUGI H
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN LEMAHSUGI H
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN LEMAHSUGI H
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	67,45	KECAMATAN LEMAHSUGI H
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	9,58	KECAMATAN LEMAHSUGI H
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	18,53	KECAMATAN LEMAHSUGI H
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	83,68	KECAMATAN LEMAHSUGI H
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	30,53	KECAMATAN LEMAHSUGI H



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
<b>KECAMATAN LEUWIMUNDING</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.189,68	KECAMATAN LEUWIMUN DING
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN LEUWIMUN DING
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN LEUWIMUN DING
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN LEUWIMUN DING
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	22,79	KECAMATAN LEUWIMUN DING
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	5,38	KECAMATAN LEUWIMUN DING
4	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	7,05	KECAMATAN LEUWIMUN DING
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	44,60	KECAMATAN LEUWIMUN DING
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	22,78	KECAMATAN LEUWIMUN DING
<b>KECAMATAN LIGUNG</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.631,42	KECAMATAN LIGUNG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN LIGUNG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN LIGUNG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN LIGUNG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	66,39	KECAMATAN LIGUNG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	20,36	KECAMATAN LIGUNG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	17,43	KECAMATAN LIGUNG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	82,54	KECAMATAN LIGUNG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	60,56	KECAMATAN LIGUNG



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
<b>KECAMATAN MAJA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.454,52	KECAMATAN MAJA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN MAJA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN MAJA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN MAJA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	67,94	KECAMATAN MAJA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	19,00	KECAMATAN MAJA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	24,50	KECAMATAN MAJA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	42,00	KECAMATAN MAJA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	40,50	KECAMATAN MAJA
<b>KECAMATAN MAJALENGKA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.363,52	KECAMATAN MAJALENGKA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN MAJALENGKA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN MAJALENGKA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN MAJALENGKA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	86,25	KECAMATAN MAJALENGKA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	4.207,47	KECAMATAN MAJALENGKA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	10,21	KECAMATAN MAJALENGKA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	128,99	KECAMATAN MAJALENGKA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	44,74	KECAMATAN MAJALENGKA



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
<b>KECAMATAN MALAUSMA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.160,95	KECAMATAN MALAUSMA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN MALAUSMA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN MALAUSMA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN MALAUSMA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	27,13	KECAMATAN MALAUSMA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	6,18	KECAMATAN MALAUSMA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	8,64	KECAMATAN MALAUSMA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	54,44	KECAMATAN MALAUSMA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	20,19	KECAMATAN MALAUSMA
<b>KECAMATAN PALASAH</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.101,01	KECAMATAN PALASAH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN PALASAH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN PALASAH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN PALASAH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	26,80	KECAMATAN PALASAH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	6,80	KECAMATAN PALASAH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	10,10	KECAMATAN PALASAH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	90,00	KECAMATAN PALASAH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	27,45	KECAMATAN PALASAH
<b>KECAMATAN PANYINGKIRAN</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				1.895,62	KECAMATAN PANYINGKIR



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					AN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN PANYINGKIR AN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN PANYINGKIR AN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN PANYINGKIR AN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	20,00	KECAMATAN PANYINGKIR AN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	0,00	KECAMATAN PANYINGKIR AN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	0,00	KECAMATAN PANYINGKIR AN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	71,00	KECAMATAN PANYINGKIR AN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	25,00	KECAMATAN PANYINGKIR AN
<b>KECAMATAN RAJAGALUH</b>						
					2.601,30	KECAMATAN RAJAGALUH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN RAJAGALUH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN RAJAGALUH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN RAJAGALUH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	51,83	KECAMATAN RAJAGALUH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	7,45	KECAMATAN RAJAGALUH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	11,20	KECAMATAN RAJAGALUH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	62,38	KECAMATAN RAJAGALUH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	20,96	KECAMATAN RAJAGALUH
<b>KECAMATAN SINDANG</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				2.346,32	KECAMATAN SINDANG



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN SINDANG
		Capaian SKM Perangkat Daerah (B)	Nilai	B		KECAMATAN SINDANG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN SINDANG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	34,82	KECAMATAN SINDANG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	17,50	KECAMATAN SINDANG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	8,00	KECAMATAN SINDANG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	40,95	KECAMATAN SINDANG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	8,57	KECAMATAN SINDANG
<b>KECAMATAN SINDANGWANGI</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.852,19	KECAMATAN SINDANGWA NGI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN SINDANGWA NGI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN SINDANGWA NGI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN SINDANGWA NGI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	41,50	KECAMATAN SINDANGWA NGI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	8,00	KECAMATAN SINDANGWA NGI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	9,65	KECAMATAN SINDANGWA NGI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	48,05	KECAMATAN SINDANGWA NGI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	20,85	KECAMATAN SINDANGWA NGI
<b>KECAMATAN SUKAHAJI</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				2.433,80	KECAMATAN SUKAHAJI



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		KECAMATAN SUKAHAJI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN SUKAHAJI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	38,93	KECAMATAN SUKAHAJI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	11,62	KECAMATAN SUKAHAJI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	12,67	KECAMATAN SUKAHAJI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	74,71	KECAMATAN SUKAHAJI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	38,80	KECAMATAN SUKAHAJI
<b>KECAMATAN SUMBERJAYA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.855,87	KECAMATAN SUMBERJAY A
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Persen	BB		KECAMATAN SUMBERJAY A
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN SUMBERJAY A
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN SUMBERJAY A
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	39,55	KECAMATAN SUMBERJAY A
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	5,95	KECAMATAN SUMBERJAY A
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	5,95	KECAMATAN SUMBERJAY A
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	70,55	KECAMATAN SUMBERJAY A
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	18,37	KECAMATAN SUMBERJAY A
<b>KECAMATAN TALAGA</b>						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				2.240,53	KECAMATAN TALAGA
		Capaian Sakip	Nilai	BB		KECAMATAN



NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU (Juta Rp )	
	KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah				TALAGA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		KECAMATAN TALAGA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		KECAMATAN TALAGA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	40,80	KECAMATAN TALAGA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	12,50	KECAMATAN TALAGA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	0,00	KECAMATAN TALAGA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	70,40	KECAMATAN TALAGA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	35,88	KECAMATAN TALAGA

Sumber: Diolah dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

## BAB VII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah “*dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024*”. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005–2025. Tema Pembangunan tahun 2024 adalah “ **Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat**” sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka harus memiliki kebermanfaatan untuk kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Semua rangkaian ketetapan program, kegiatan, sub kegiatan, strategi pembangunan, dan kebijakan-kebijakan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target-target pembangunan tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Majalengka, melaksanakan RKPD Tahun 2024 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi/APBN dan



sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka tentang RKPD Tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024.

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara proporsional.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
7. Kepala Bappedalitbang melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2024 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan RPKD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka dan harus menjadi landasan pijak pembangunan pada tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak semua pemangku



kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan ekonomi daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI